STRATEGI INTERVENSI DINAS SOSIAL DALAM MENDORONG TRANSFORMASI KEMANDIRIAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN LIMBOTO BARAT

SKRIPSI

ANATASIA PUTRI AMUNTU
NIM. D02422001

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
2026

STRATEGI INTERVENSI DINAS SOSIAL DALAM MENDORONG TRANSFORMASI KEMANDIRIAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN LIMBOTO BARAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Wajib Dalam Menyelesaikan Jenjang Pendidikan Sarjana (S1)

ANATASIA PUTRI AMUNTU
NIM. D02422001

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
2026

PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap	: Anatasia Putri Amuntu
Nim	: D02422001
Tempat/Tanggal Lahir	: Kab Gorontalo, 12 Juli 2004
Program	: Sarjana
Program Studi	: Administrasi Publik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Strategi Intervensi Dinas Sosial Dalam Mendorong Transformasi Kemandirian Penerima Program keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat" merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

Gorontalo, April 2026



Anatasia Putri Amuntu

NIM: D02422001

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muh. Firyal Akbar S.IP., M.Si	Sri Lestari H. Gintulangi S.Sos., M.Si
NIDN : 0931088901	NIDN 0913027504
Tanggal :	Tanggal :

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial	Ketua Program Studi Administrasi Publik
Dr. Aprie Ara Tilome, S.Ag., M.Si	Dr. Rifka S. Akibu, S.Pd., M.Si
NIDN: 0916017402	NIDN: 0909019001
Tanggal :	Tanggal :

Nama	: Anatasia Putri Amuntu
NIM	: D02422001
Angkatan	: 2022

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Penelitian	:Strategi Intervensi Dinas Sosial Dalam Mendorong Transformasi Kemandirian Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat
Nama	: Anatasia Putri Amuntu
NIM	: D02422001
Program Studi	: Administrasi Publik

Telah Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi: Tanggal 13-04-2026

KOMISI PENGUJI

1. Dr. Irwan Halid M.SI :.....
2. Dr. Muh. Firyal Akbar S.IP., M.Si :.....
3. Sri Lestari H. Gintulangi S.Sos., M.Si :.....

Mengetahui

Dekan	Ketua Program Studi
Fakultas Ilmu Sosial	Administrasi Publik
Dr. Apris Ara Tilome, S.Ag., M.Si	Dr. Rifka S. Akibu, S.Pd., M.Si
NIDN: 0916017402	NIDN: 0909019001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah memang tidak menjajikan hidupmu akan selalu mudah, tapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah:5-6)

"aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku bekerja tiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia sia"
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Atas izin dan kehendak-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, hambatan, serta tantangan yang dihadapi selama proses penelitian dan penulisan.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Mama dan Papa, yang dengan kasih sayang, doa, serta pengorbanan telah mengantarkan penulis hingga mencapai tahap ini. penulis menyadari bahwa setiap pencapaian yang diraih hari ini merupakan hasil dari perjuangan, keikhlasan, dan harapan besar yang senantiasa Mama dan Papa titipkan dalam setiap langkah kehidupan penulis. mama dan papa memang tidak menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, namun dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan doa yang tak pernah berhenti, mereka mampu mengantarkan anaknya menjadi seorang sarjana. Teristimewah ucapan terima kasih yang penuh cinta penulis berikan kepada Mama, pintu surgaku wanita yang melahirkan penulis, Dari tangannya yang lembut, penulis belajar arti ketulusan. Dari doanya yang tak pernah putus, penulis menemukan cinta sejati yang tak bersyarat. seribu halaman pun tidak akan mampu menggambarkan besarnya kasih sayang dan seluruh

pengorbanan mama. Tanpa sosok mama, penulis bukanlah siapa-siapa. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, serta atas kesabaran dan pengorbanan yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan hidup penulis. Dalam setiap tutur dan tindakannya, penulis belajar banyak tentang arti sebuah keikhlasan. mama adalah guru kehidupan yang luar biasa dengan ketulusan dan keikhlasan telah mendidik penulis menjadi pribadi yang kuat, berbakti, dan penuh rasa syukur. Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan juga kepada Papa, sosok yang dengan keteguhan hati dan kerja kerasnya selalu mengupayakan yang terbaik demi masa depan anak-anaknya. Meski jarang mengungkapkan perasaan, papa selalu memberikan usaha, pengorbanan, serta doa yang tidak pernah putus demi memberikan yang terbaik bagi penulis.

2. Kepada keluarga tercinta, terkhusus kepada oma, om dan tante tersayang yang dengan senang hati senantiasa hadir memberikan bantuan, doa, serta perhatian dalam setiap langkah perjuangan penulis selama menempuh pendidikan. Dukungan keluarga, baik secara moril maupun melalui pengorbanan yang penuh keikhlasan, menjadi kekuatan besar bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan studi ini. Kasih sayang dan ketulusan akan selalu menjadi bagian terpenting dalam setiap keberhasilan yang penulis raih.
3. Kepada teman-teman angkatan 2022 (Authority) yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Kebersamaan, canda, dan saling menguatkan dalam setiap proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi menjadi kenangan yang tak terlupakan. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah terjalin sampai saat ini.
4. Kepada seorang teman yang telah menemani perjalanan penulis selama menyusun skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan semangat yang selalu diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Terakhir, karya ini penulis persembahkan untuk diri sendiri. Perempuan yang selama ini berjalan dalam diam, yang tetap bertahan meski sering kali harus berjuang sendirian tanpa banyak kata. Terima kasih karena tidak menyerah, bahkan di saat lelah terasa lebih besar daripada harapan. Terima kasih

karena tetap memilih melangkah, meski jalan yang dilalui tidak selalu mudah dan sering dipenuhi keraguan. Perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan tentang siapa yang tetap bertahan ketika ingin berhenti. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap dalam sunyi, dan setiap malam panjang yang penuh kegelisahan, kini menjelma menjadi bagian dari cerita yang menguatkan. Tidak ada yang sia-sia dari setiap proses yang telah dilalui. Hari ini adalah bukti bahwa diri ini mampu melewati hal-hal yang dulu terasa mustahil. Bahwa di balik rasa takut, ada keberanian yang perlahan tumbuh. Bahwa di balik lelah yang tak terlihat, ada kekuatan yang terus bertahan. Skripsi ini bukan sekadar akhir dari sebuah kewajiban, melainkan saksi dari perjalanan panjang tentang belajar percaya pada diri sendiri. Tentang jatuh, bangkit, dan tetap memilih untuk tidak berhenti. Untuk diri ini, terima kasih telah sampai sejauh ini. Tetaplah melangkah, tetaplah percaya karena sejatinya, kekuatan terbesar itu selalu ada, tumbuh diam-diam dari dalam diri sendiri.

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membersamai proses ini. Karya ini saya dedikasikan untuk orang-orang tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa. Semoga tulisan sederhana ini tidak hanya menjadi syarat akademik, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi semua orang yang membacanya.

ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

TEMPATKU MENUNTUT ILMU DAN BERAMAL.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi penelitian yang berjudul "Strategi Intervensi Dinas Sosial dalam Mendorong Transformasi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat". Penyusunan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program sarjana (S1) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

Selama meyelesaikan penyusunan proposal ini penulis mendapat banyak bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo yaitu Bapak Prof Dr. H. Abdul Kadim Masaong M.Pd.
3. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dalam Bidang Akademik sekaligus Dosen pembimbing I yaitu Bapak Dr. Muh. Firyal Akbar, S.IP., M.Si.
4. Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dalam Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Perencanaan dan Sumber Daya yaitu Bapak Dr. Salahudin Pakaya, S.Ag., MH.
5. Wakil Rektor III, dalam Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Universitas Muhammadiyah Gorontalo yaitu Bapak Dr. Thamrin Koem, M.Pd
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo yaitu Bapak Dr. Apris Ara Tilome, S.Ag., M.Si.
7. Ketua Program Studi Administrasi Publik yaitu Ibu Dr. Rifka S. Akibu S.Pd M.Si
8. Dosen Pembimbing II yaitu Ibu Sri Lestari Gintulangi S.Sos., M.Si yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, serta masukan dalam menyelesaikan Proposal ini.

9. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Program Studi Administrasi publik Universitas Muhammadiyah Gorontalo, terima kasih atas ilmu yang diberikan.
10. Orang tua yang selalu membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian proposal ini.
11. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian proposal ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih saya ucapkan semuanya.
12. Terima Kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah hingga proposal ini terselesaikan. Terima Kasih telah tetap kuat di tengah lelah, tetap berusaha saat ragu, dan terus percaya bahwa setiap langkah kecil membawa arti besar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan strategi pemberdayaan sosial, khususnya dalam mendorong transformasi kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat.

Gorontalo, April 2026

Anatasia Putri Amuntu

Abstract

The problem of poverty and the high dependency of Beneficiary Families (KPM) on the Family Hope Program (PKH) social assistance remain challenges in community empowerment efforts. Although PKH is designed to encourage independence, in practice, there are still gaps between the program's objectives and conditions on the ground, particularly in West Limboto District. Therefore, a more effective intervention strategy from the Social Services Agency is needed. This study aims to analyze the Social Services Agency's intervention strategy in encouraging the transformation of independence among PKH recipients and identify supporting and inhibiting factors. The research method used is a qualitative approach with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. While data analysis used data reduction, data presentation, and conclusion drawing with validity testing through triangulation. The research results indicate that the intervention strategy implemented encompasses the Plan, Pattern, Position, Perspective, and Ploy aspects. However, its implementation has not been optimal due to resource limitations, a lack of program integration, and a low level of change in the mindset of beneficiary families (KPM). Furthermore, support from social assistants and empowerment programs are supporting factors in promoting independence. The study's conclusions confirm that the Social Services Agency's intervention strategy has not been fully effective in transforming beneficiary families' independence, necessitating the strengthening of more integrated, sustainable, and community-based programs.

Keywords: *Intervention strategy, Independence, Family Hope Program (PKH), Community Empowerment, Social Services.*

Abstrak

Permasalahan kemiskinan dan tingginya ketergantungan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) masih menjadi tantangan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Meskipun PKH dirancang untuk mendorong kemandirian, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara tujuan program dan kondisi di lapangan, khususnya di Kecamatan Limboto Barat, sehingga diperlukan strategi intervensi yang lebih efektif dari Dinas Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi intervensi Dinas Sosial dalam mendorong transformasi kemandirian penerima PKH serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi intervensi yang dilakukan mencakup aspek *Plan, Pattern, Position, Perspective, Ploy*. Namun, implementasinya belum optimal karena masih terdapat keterbatasan sumber daya, kurangnya integrasi program, serta rendahnya perubahan pola pikir KPM. Di sisi lain, dukungan pendamping sosial dan program pemberdayaan menjadi faktor pendukung dalam mendorong kemandirian. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa strategi intervensi Dinas Sosial belum sepenuhnya efektif dalam mentransformasi kemandirian KPM, sehingga diperlukan penguatan program yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: *Strategi intervensi, Kemandirian, Program Keluarga Harapan (PKH), Pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KARYA ILMIAH ..... **iii**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **iv**
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI ..... **v**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **x**
Abstract ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 6
1.3 Fokus Penelitian 6
1.4 Tujuan Penelitian 7
1.5 Manfaat Penelitian 7
BAB II KAJIAN TEORI **8**
2.1 Landasan Teori 8
2.1.1 Administrasi Publik 8
2.1.2 Strategi 10
2.1.3 Intervensi Sosial 12
2.1.4 Pemberdayaan 14
2.1.5 Transformasi Sosial 15
2.1.6 Kemandiran 17
2.1.7 Program Keluarga Harapan (PKH) 19
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 21
2.3 Kerangka Berpikir 25
BAB III METODE PENELITIAN **28**
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 28
3.2 Kehadiraan Peneliti 28
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 29
3.4 Sumber Data 29

3.4.1 Data Primer 30
3.4.2 Data sekunder 30
3.5 Teknik Pengumpulan Data 30
3.5.1 Observasi 31
3.5.2 Wawancara 31
3.5.3 Dokumentasi 31
3.6 Analisis Data 32
3.6.1 Redukasi Data 32
3.6.2 Penyajian Data 32
3.6.3 Penarikan Kesimpulan 33
3.7 Pengecekan Keabsahan Data 33
3.7.1 Triangulasi Sumber Data 33
3.7.2 Triangulasi Metode 33
3.7.3 Triangulasi Waktu 34
3.8 Tahap-Tahap Penelitian 34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36
4.1 Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian 36
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 36
4.1.2 Sejarah Kecamatan Limboto Barat 36
4.1.3 Kondisi Wilayah 36
4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo 37
4.2.1 Profile 37
4.2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi 39
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian 41
4.3.1 *Plan* 42
4.3.2 Pattern 48
4.3.3 *Position* 55
4.3.4 *Perspective* 61
4.3.5 *Ploy* 67
4.4 Pembahasan 73
4.4.1 *Plan* 74
4.4.2 *Pattern* 76
4.4.3 *Position* 79

4.4.4 *Perspective* 81
4.4.5 *Ploy* 84
BAB V PENUTUP 86
5.1 Kesimpulan 86
5.2 Saran 86
DAFTAR PUSTAKA 88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan penelitian 23
Tabel 3.8 Tahap-tahap Penelitian 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir..... 27
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup 91
Lampiran 2. Pedoman Wawancara 92
Lampiran 3. Daftar Informan 97
Lampiran 4. Matriks Hasil Wawancara 98
Lampiran 5. SK Pembimbing 121
Lampiran 6. Surat Permohonan Ijin Penelitian 123
Lampiran 7. Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol..... 124
Lampiran 8. Surat Rekomendasi Penelitian Kantor Camat Limboto Barat..... 125
Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian Dinas Sosial..... 126
Lampiran 10. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian di Kecamatan..... 127
Lampiran 11. Dokumentasi Kegiatan Penelitian..... 128

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Kemiskinan dapat menghambat pembangunan suatu bangsa, yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak manusia. Dampak yang timbul akibat dari kemiskinan bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh (Najidah & Lestari, 2019). Oleh sebab itu, upaya pengentasan kemiskinan menjadi agenda prioritas dalam pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) secara global, yang juga menjadi fokus utama pemerintah Indonesia.

Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan, sebab pertumbuhan ekonomi yang positif belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini berpotensi menghambat pembangunan manusia, karena masyarakat miskin cenderung tidak memiliki kemampuan dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dampak kemiskinan menjadi salah satu isu paling kompleks yang berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan politik. Meskipun pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan hingga tahun 2019, masalah ini tetap menjadi isu utama dalam proses pembangunan nasional. Sebab, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan menikmati kualitas hidup yang layak (Susanti et al., 2024).

Dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah sebagai *policy maker* memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah peluncuran berbagai Program Bantuan Sosial (Bansos) yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan gizi. Program-program tersebut didasarkan pada payung hukum yang kuat, yaitu

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan kewajiban negara dalam memberikan jaminan sosial bagi seluruh warga negara. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Nuraida, 2020).

Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan atar-generasi. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer (CCT).* Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut sebagai keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Sana, 2023). Program bantuan sosial ini adalah program bersyarat kepada keluarga atau orang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Nur Aeda & Riadul Jannah, 2022). Penggunaan bantuan PKH memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, sedangkan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. PKH juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang kini dilanjutkan dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Nuraida, 2020). Oleh karena itu, keberhasilan PKH tidak hanya diukur dari penurunan angka kemiskinan sesaat, melainkan dari sejauh mana program ini mampu mentransformasi penerimanya menjadi individu yang mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

Meskipun PKH telah terbukti mampu menekan angka kemiskinan di tingkat nasional, salah satu tantangan terbesar yang muncul dalam implementasinya adalah fenomena ketergantungan (*dependency*) di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ketergantungan ini muncul ketika bantuan sosial yang diterima secara terus-menerus justru melemahkan motivasi KPM untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri. Penelitian yang dilakukan oleh

(Setyawardani et al., 2020) mengenai “Dampak Bantuan PKH terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado” menunjukkan bahwa meskipun bantuan PKH membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, sebagian besar penerima masih belum mampu bertransformasi menjadi mandiri secara ekonomi. Bantuan tersebut cenderung menimbulkan persepsi bahwa kesejahteraan dapat dicapai melalui ketergantungan pada program pemerintah.Temuan tersebut sejalan dengan penelitian oleh (Silviana & Chilmy, 2024) berjudul “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mencapai Graduasi Mandiri di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember” yang menyoroti pentingnya peran pendamping dalam mendorong perubahan perilaku dan pola pikir penerima manfaat. Namun, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa upaya pendamping sering kali terbatas pada aspek administratif dan belum diikuti dengan strategi intervensi yang sistematis dari pihak Dinas Sosial dalam menciptakan kemandirian yang berkelanjutan.

Menyadari tantangan tersebut, peran intervensi sosial yang dilakukan oleh lembaga pelaksana seperti Dinas Sosial menjadi sangat krusial. Intervensi sosial ini tidak terbatas pada pendampingan administratif, tetapi mencakup serangkaian kegiatan pemberdayaan yang dirancang untuk membangun kapasitas KPM. Strategi ini idealnya mencakup pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, bimbingan motivasi, dan penguatan kelembagaan kelompok. Keberhasilan transformasi kemandirian sangat ditentukan oleh kualitas dan relevansi program pendampingan yang diberikan. Intervensi yang efektif adalah yang mampu mengidentifikasi potensi lokal dan kebutuhan riil KPM, sehingga program yang dijalankan bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, (Nurhayati, 2025) menegaskan bahwa pendamping sosial memiliki peran sentral sebagai agen perubahan di lapangan yang menjembatani kebijakan pemerintah dengan realitas sosial penerima manfaat. Pendamping tidak hanya bertugas sebagai penghubung administratif, tetapi juga berfungsi sebagai motivator, edukator, dan fasilitator dalam proses pemberdayaan KPM agar mampu mencapai kemandirian. Peran ini menuntut kemampuan pendamping dalam memahami kondisi sosial-ekonomi masyarakat, mengelola dinamika kelompok, serta membangun hubungan yang partisipatif dan empatik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pendampingan sangat dipengaruhi oleh sejauh

mana pendamping mampu menjadi katalisator perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat miskin menuju kemandirian yang berkelanjutan.

Akan tetapi, dalam praktiknya, strategi intervensi yang diterapkan sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat tercapainya tujuan kemandirian. Program pelatihan dan pendampingan yang seharusnya menjadi sarana pemberdayaan kerap kali belum tepat sasaran, tidak terintegrasi secara maksimal, atau bahkan bersifat seremonial semata tanpa diikuti oleh tindak lanjut yang berkelanjutan. Kurangnya sinergi antar-lembaga pelaksana serta belum adanya pemetaan kebutuhan yang akurat menyebabkan intervensi yang dilakukan tidak mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi KPM. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kapasitas pendamping, juga menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan intervensi sosial yang intensif dan berkesinambungan. Kondisi ini menyebabkan transformasi menuju kemandirian berjalan lambat, bahkan dalam beberapa kasus tidak terjadi sama sekali, sehingga penerima manfaat tetap terjebak dalam lingkaran ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Konteks permasalahan ini menjadi sangat relevan di wilayah Kabupaten Gorontalo, khususnya di Kecamatan Limboto Barat. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2024, tingkat kemiskinan di kabupaten ini masih signifikan, dengan total 82.981 keluarga (268.384 jiwa) masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin. Kecamatan Limboto Barat sendiri menyumbang angka yang cukup besar, yaitu sebanyak 5.456 keluarga atau 16.207 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan kantong kemiskinan yang memerlukan perhatian serius dan intervensi yang efektif. Keberadaan 1.485 KPM PKH di kecamatan ini pada tahun 2024, dengan realisasi penyaluran yang fluktuatif, menandakan besarnya skala tantangan sekaligus potensi untuk mendorong perubahan sosial-ekonomi jika dikelola dengan strategi yang tepat. Tingginya jumlah KPM ini menjadi justifikasi kuat untuk mendalami bagaimana intervensi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial di tingkat lokal dapat dioptimalkanBerdasarkan data rekapitulasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Berdasarkan data rekapitulasi penerima PKH dalam tiga tahun terakhir, jumlah KPM mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.748 KPM, kemudian

menurun menjadi 1.522 KPM pada tahun 2023 (turun sekitar 12,9%), dan kembali menurun menjadi 1.485 KPM pada tahun 2024 (turun sekitar 2,4% dari tahun sebelumnya). Secara keseluruhan, terjadi penurunan sebesar 263 KPM atau sekitar 15% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Namun demikian, pada tahun 2024 rata-rata realisasi penyaluran bantuan masih mencapai sekitar 1.448 KPM per tahap atau sekitar 97,5% dari total penerima yang terdaftar. Tingginya persentase realisasi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh KPM yang terdaftar masih aktif menerima bantuan. Dengan demikian, meskipun secara kuantitatif terjadi penurunan jumlah penerima, angka yang tetap berada di atas seribu keluarga setiap tahunnya serta tingginya persentase realisasi menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap bantuan sosial masih tergolong tinggi.

Selain persoalan ketergantungan secara umum, dinamika sosial di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat masih dihadapkan pada masalah yang cukup kompleks. Salah satu isu yang sering muncul adalah praktik nepotisme atau kedekatan sosial dalam proses penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam beberapa kasus, masyarakat menyampaikan bahwa terdapat penerima bantuan yang tetap memperoleh PKH bukan karena memenuhi kriteria kemiskinan, tetapi karena adanya hubungan kedekatan dengan aparat desa atau tokoh tertentu. Kondisi ini menyebabkan bantuan tidak selalu tepat sasaran dan justru memperkuat budaya ketergantungan.

Fenomena ini turut menciptakan pola pikir bahwa PKH merupakan bantuan yang dapat diterima secara terus-menerus tanpa adanya dorongan untuk meningkatkan kapasitas diri atau melakukan perubahan perilaku. Sebagian KPM bahkan memiliki keyakinan bahwa PKH adalah “hak turun-temurun,” sehingga muncul sikap enggan untuk keluar dari program meskipun kondisi ekonomi mereka sudah lebih baik. Persepsi seperti ini menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya transformasi kemandirian yang menjadi tujuan utama program.

Berbagai fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan pola pikir masyarakat. Dalam konteks nilai-nilai Islam, kemandirian merupakan prinsip yang sangat dijunjung tinggi. Islam mengajarkan pentingnya usaha, kerja

keras, dan tanggung jawab individu dalam memperbaiki kehidupannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11:

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗوَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚوَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ

Artinya "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Ayat ini menjadi refleksi bahwa keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada kebijakan dan bantuan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan usaha masyarakat itu sendiri untuk memperbaiki kehidupannya melalui pemberdayaan dan perubahan perilaku menuju kemandirian.

Dengan demikian, adanya kesenjangan antara tujuan ideal Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menciptakan kemandirian dan realitas di lapangan yang menunjukkan masih tingginya ketergantungan menjadikan penelitian ini penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mendorong transformasi kemandirian penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas kebijakan pemberdayaan, sehingga proses transformasi menuju kemandirian keluarga penerima manfaat dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan."

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka identifikasi permasalahan yang akan di bahas adalah :

1. Masih tingginya fenomena ketergantungan *(dependency)* di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) meskipun program sudah berjalan sejak lama.
2. Strategi intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum sepenuhnya sistematis dan berkelanjutan untuk mendorong kemandirian penerima PKH.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah pada strategi intervensi Dinas Sosial dalam mendorong transformasi kemandirian penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis strategi intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mendorong transformasi kemandirian penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi intervensi Dinas Sosial untuk mendorong kemandirian penerima PKH.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini :

A. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam bidang kebijakan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai strategi intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dalam mendorong transformasi kemandirian penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih dalam mengenai efektivitas dan keberlanjutan program bantuan sosial dalam konteks pengentasan kemiskinan di daerah.

B. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam merumuskan dan memperbaiki strategi intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mendorong kemandirian penerima PKH di Kecamatan Limboto Barat. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pendamping sosial dalam meningkatkan kualitas pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga mereka tidak hanya bergantung pada bantuan tunai, tetapi juga mampu mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan sosial yang lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kemandirian masyarakat miskin.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Administrasi Publik

Secara etimologis, kata administrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *ad* yang berarti intensif dan *ministrare* yang berarti melayani (*to serve*). Dengan demikian, administrasi dapat dimaknai sebagai kegiatan melayani dengan sungguh-sungguh. Dalam arti sempit, administrasi diartikan sebagai kegiatan tata usaha yang mencakup catat-mencatat dan tulis-menulis, sedangkan dalam arti luas, administrasi adalah proses kerja sama yang rasional antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Administrasi mengandung dua arti yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Administrasi dalam arti sempit didefinisikan sebagai kegiatan catat mencatat, tulis-menulis atau kegiatan yang sering disebut dengan tata usaha, sedangkan administrasi dalam arti luas adalah proses kerjasama secara rasional yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Widanti, 2022).

Seiring perkembangannya, administrasi kemudian diaplikasikan dalam konteks pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang dikenal dengan istilah administrasi publik. Dalam perjalanannya, administrasi publik dapat ditinjau dari tiga sisi, yaitu sebagai ilmu, seni, dan profesi. Administrasi publik sebagai ilmu memiliki sifat yang universal, artinya berlaku bagi seluruh praktik administrasi publik di dunia. Administrasi publik sebagai ilmu mengandung makna bahwa bidang ini memiliki teori-teori atau prinsip-prinsip tertentu yang bersifat rasional, objektif, sistematis, telah teruji kebenarannya secara empiris melalui metode ilmiah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Administrasi sebagai ilmu juga tidak terlepas dari kontribusi berbagai disiplin lain seperti ilmu politik, ekonomi, hukum, psikologi, sosiologi, antropologi, lingkungan, dan ilmu-ilmu lainnya (Collins et al., 2021)

Dalam konteks yang lebih modern, administrasi publik berfokus pada kebutuhan efisiensi tata kelola pemerintahan. Denhardt dan Denhardt (2003) dalam bukunya menyatakan bahwa administrasi publik berfokus pada kepentingan publik dan pemberian layanan publik yang efisien, penggunaan tenaga kerja

profesional pada bidang layanan publik, serta kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta agar pemberian layanan publik merata tanpa klasifikasi guna mencapai kesejahteraan masyarakat bersama (Albertus, 2024). Senada dengan pendapat tersebut, Henry (1989) dalam bukunya tentang teori administrasi publik menjelaskan bahwa administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan publik. Di sisi lain, Hughes (1994) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan aktivitas melayani publik dan/atau aktivitas pelayan publik dalam melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain (Collins et al., 2021).

Administrasi publik memiliki peran penting dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi-fungsi utama administrasi publik meliputi:

1. Implementasi Kebijakan Publik

   Proses penerapan keputusan pemerintah menjadi program dan tindakan konkret. Menurut Goodnow, ini adalah fungsi utama administrasi publik; Simon menekankan pentingnya pengambilan keputusan efektif, dan Elmore mengusulkan *backward mapping* agar pelaksanaan selaras dengan tujuan kebijakan.
2. Penyediaan Layanan Publik

   Administrasi Publik bertanggung jawab atas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Henry menekankan efisiensi, Frederickson fokus pada hasil, dan Ostrom menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan efektivitas layanan.
3. Pengelolaan Sumber Daya

   Meliputi pengelolaan anggaran, SDM, dan infrastruktur secara efisien. Simon menekankan perencanaan sumber daya, Henry menyoroti transparansi anggaran, dan Anderson menekankan pengelolaan tenaga kerja yang profesional (Gede Wirata, I Wayan Astawa, Sri Sulandari, I Nyoman Suargita, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi public merupakan proses kerja sama yang rasional dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan. Administrasi publik tidak hanya berfokus pada efisiensi birokrasi, tetapi juga pada kepentingan publik, profesionalisme aparatur, dan kolaborasi antar sektor. Melalui fungsi-fungsinya,

administrasi publik berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan, penyediaan layanan, serta pengelolaan sumber daya yang transparan dan akuntabel guna mewujudkan *good governance*.

2.1.2 Strategi

Strategi berasal dari kata dalam bahasa Yunani kuno *(strategos)* yang mengacu pada "seni berperang". Sebuah strategi memiliki landasan atau rencana untuk melncapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, strategi dapat dianggap sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi merupakan perencanaan yang cermat mengenai langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu.

Michaell El. Porter, memandang bahwa strategi dipahami sebagai metode untuk meraih keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Porter menekankan bahwa strategi tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga pada bagaimana organisasi menciptakan nilai tambah dan posisi unggul dibandingkan pihak lain (Porter, 2024).

Sejalan dengan itu, Mardiasmo dalam Ningtihana et al., (2021) menjelaskan bahwa strategi merupakan suatu cara yang digunakan organisasi untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Suatu strategi memuat serangkaian petunjuk yang menjelaskan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan mengarahkannya pada visi. Dalam konteks bentuk dan pelaksanaan strategi Kotten dalam Salusu sebagaimana dikutip oleh (Thariq Riawan et al., 2024) membagi bentuk-bentuk strategi menjadi empat bagian, yaitu: *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi), *Program Strategy* (Strategi Program), *Recourse Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya), *Institusional Strategy* (Strategi Kelembagaan).

David menegaskan bahwa strategi adalah sasaran bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan sumber daya dan keputusan puncak dalam jumlah besar. Jadi strategi aalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau seseorang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Izza et al., 2021).

Pemikiran mengenai strategi juga diperkuat oleh Chandler, yang mendefinisikan strategi sebagai: *”the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for those goals*. Kontribusi penting dari Chandler

yang ditulis dalam bukunya berjudul *Strategy* and *Structure* ini adalah bahwa struktur organisasi harus beradaptasi dengan perubahan strategi, artinya *"structure follows strategy".* Secara fundamental simpulan ini menyatakan sebuah proses berurutan dimana strategi secara sentral ditentukan pertama kali dan kemudian diimplementasikan melalui struktur organisasi yang tepat. Tetapi kemudian pada tahun 1989 Chandler juga mengakui bahwa antara struktur dan strategi saling mempengaruhi. Ahli-ahli setelah Chandler seperti Ansoff dan Andrew ternyata mengadopsi asumsi bahwa *structure-follows-strategy* (Rachman, 2018).

Mintzberg berpendapat bahwa strategi merupakan konsep yang luas dan tidak cukup dijelaskan hanya dengan satu definisi. Mereka memperkenalkan lima pendekatan atau 5P *Strategy*, yaitu *Plan, Pattern, Position, Perspective,* dan *Ploy*.

- Sebagai *Plan*, strategi adalah pedoman, arahan, atau jalur menuju masa depan yang menggambarkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan (*intended strategy*).
- Sebagai *Pattern*, strategi adalah konsistensi perilaku sepanjang waktu di masa lalu yang membentuk pola tertentu (*realized strategy*).
- Sebagai *Position*, strategi menempatkan produk atau kebijakan tertentu pada konteks pasar atau lingkungan tertentu.
- Sebagai *Perspective*, strategi melihat ke dalam organisasi, menelaah nilai, budaya, dan visi besar yang dimiliki.
- Sebagai *Ploy*, strategi merupakan manuver khusus yang dimaksudkan untuk memperdaya atau mengecoh pesaing (Hasbullah, 2016).

Strategi dibuat berdasarkan tujuan tertentu. Strategi mampu menjadi jembatan yang memberi kemudahan dalam berjalannya suatu rencana. Oleh karena itu, tujuan dari strategi adalah:

1. Menjaga kepentingan
2. Memberikan gambaran tujuan
3. Sebagai sarana evaluasi
4. Memperbarui strategi sebelumnya

Dengan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi. Strategi juga

mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyesuaian terhadap lingkungan internal maupun eksternal.

2.1.3 Intervensi Sosial

Intervensi sosial merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terencana untuk menciptakan perubahan pada individu, kelompok, maupun komunitas. Istilah perubahan terencana digunakan karena setiap bentuk bantuan yang diberikan dapat dinilai serta diukur tingkat keberhasilannya. Secara lebih luas, intervensi sosial juga dapat diartikan sebagai langkah untuk meningkatkan keberfungsian sosial dari sasaran perubahan, baik itu individu, keluarga, maupun kelompok. Keberfungsian sosial sendiri mengacu pada kondisi ketika seseorang mampu menjalankan perannya secara optimal sesuai dengan tuntutan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang dimilikinya.

Menurut Adi (2013) intervensi sosial menjadi suatu perubahan terencana yang dilakukan oleh pelaku perubahan dengan tujuan untuk memperbaiki fungsi sosial orang individu (mikro), kelompok (mezzo), dan masyarakat (makro) yang menjadi sasarannya. Sedangkan menurut Johnson (2001) (dalam Achmad et al., 2019), dijelaskan bahwa Intervensi sosial merupakan suatu tindakan spesifik oleh seorang pelaku intervensi dalam kaitannya dengan sistem atau proses manusia dalam rangka menimbulkan perubahan. Definisi Intervensi Sosial adalah suatu metode perubahan sosial yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran intervensi dalam melakukan perubahan sosial yang diinginkan oleh pelaku perubahan (Rivaldi et al., 2020).

Dalam pengertian yang lain juga dijelaskan bahwa Intervensi sosial merupakan suatu tindakan spesifik oleh seorang pelaku intervensi dalam kaitannya dengan sistem atau proses manusia dalam rangka menimbulkan perubahan (Johnson, 2001). lebih lanjut Johnson mengungkapkan bahwa melalui intervensi sosial, hambatan sosial yang dihadapi kelompok sasaran perubahan akan diatasi. Dengan kata lain, intervensi sosial berupaya memperkecil jarak antara harapan lingkungan dengan kondisi kenyataan klien (Johnson, 2001) (Achmad et al., 2019).

Menurut Argyris (1970) dalam Hariyanto (2012) bahwa, Intervensi sosial yaitu kegiatan pekerja sosial yang mencoba masuk ke dalam permasalahan individu, kelompok maupun suatu objek lain dengan tujuan utamanya membantu keluar dari masalah tersebut. Di mana tujuan utama bantuan yang diberikan ialah

memperbaiki fungsi dan peran sosial klien. Dengan asumsi bahwa bila fungsi sosial menjadi baik maka akan berimplikasi pada stabilitas kondisi lainnya. Sehingga intervensi sosial itu sendiri bisa dikatakan sebagai pemicu terhadap pencapaian fungsi-fungsi kesejahteraan lahir dan batin yang selama ini mungkin mengalami hambatan atau berbenturan dengan masalah lainnya (Deva Ilham Koirunnada et al., 2024).

Tujuan utama dari intervensi sosial adalah membantu individu maupun kelompok masyarakat dalam memulihkan keberfungsian sosialnya, meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah secara lebih efektif, serta menyesuaikan diri dengan peran-peran baru yang muncul seiring dengan perkembangan yang dialami.

Adapun strategi intervensi sosial adalah pendekatan sistematis yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam suatu masyarakat guna menciptakan perubahan yang positif. Strategi ini digunakan dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pengendalian masalah sosial. Intervensi sosial biasanya melibatkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga sosial, komunitas, dan individu (Suherman et al., 2025).

Menurut (Rahmanindita & Djumiarti, 2021), di kutip dari (Suherman et al., 2025) ada beberapa tahapan untuk melakukan strategi intervensi sosial, sebagai berikut:

1. Penggalian Masalah
2. Pengumpulan Data
3. Melakukan Kontak Awal
4. Negosiasi Kontrak
5. Membentuk Sistem Aksi
6. Menjaga dan Mengkoordinasikan Sistem Aksi
7. Memberikan Pengaruh
8. Pengakhiran/Evalusasi

Secara keseluruhan, teori intervensi sosial menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses yang terencana dan terarah. Intervensi sosial berfungsi sebagai upaya sistematis untuk memperbaiki keberfungsian sosial individu, kelompok, maupun masyarakat agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan mengatasi berbagai hambatan

sosial yang dihadapi. Melalui tahapan-tahapan intervensi yang terstruktur, teori ini menekankan pentingnya peran aktor perubahan dalam menciptakan kesejahteraan sosial serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mandiri dan berdaya.

2.1.4 Pemberdayaan

Secara etimologis, istilah pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut, pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu proses untuk menjadi berdaya, yakni proses memperoleh, meningkatkan, atau memberikan kekuatan, kemampuan, maupun potensi dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum atau kurang berdaya. Pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai upaya memaksimalkan pemanfaatan sumber daya agar memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan potensi awal yang dimiliki.

Dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan, istilah pemberdayaan semakin sering digunakan. Konsep ini muncul dari realitas sosial yang menunjukkan adanya individu atau kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi lemah atau tidak berdaya (*powerless*). Ketidakberdayaan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, seperti keterbatasan pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, jaringan sosial, semangat, etos kerja, maupun ketekunan. Kelemahan dalam berbagai aspek tersebut seringkali menimbulkan ketergantungan, ketidak mampuan, serta kemiskinan. Pemberdayaan (*empowerment*) memiliki keterkaitan erat dengan konsep kekuasaan (*power*). Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi, mengatur, atau mengarahkan dirinya sendiri maupun pihak lain sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, kekuasaan mencerminkan kapasitas seseorang untuk menjadikan individu lain sebagai subjek atau objek dari pengaruhnya, baik dalam konteks individu, kelompok, maupun organisasi (Margayaningsih, 2018).

Menurut Wuradji yang dikutip oleh Azis Muslim, menyatakan bahwa: Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondidi hidup sesuai dengan harapan (Kholik, 2021).

Sumodiningrat menyampaikan pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi "daya" bukan "kekuasaan" daripada "pemberdayaan" itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah "energize" atau katakan memberi "energi" pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. Pernyataan tersebut di perkuat oleh (Djhoni, 2003) yang menyampaikan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan *(power)* kepada pihak yang lemah *(powerless),* dan mengurangi kekuasaan *(disempowered)* kepada pihak yang terlalu berkuasa *(powerful)* sehingga terjadi keseimbangan. Begitu pula menurut Rappaport (1984), pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Margayaningsih, 2018).

Tujuan utama dari pemberdayaan adalah memperkuat posisi dan kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok lemah yang mengalami ketidakberdayaan, baik yang disebabkan oleh faktor internal seperti persepsi atau pandangan negatif terhadap diri sendiri maupun faktor eksternal, seperti adanya tekanan atau ketidakadilan dalam struktur sosial. Untuk memahami konsep pemberdayaan secara lebih utuh, penting pula untuk menelaah pengertian mengenai kelompok lemah serta bentuk-bentuk ketidakberdayaan yang mereka alami (RD Tiani, 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, melainkan pada upaya membangun kesadaran, kemampuan, dan kemandirian masyarakat agar mampu mengelola kehidupan serta lingkungannya secara berkelanjutan. Pemberdayaan menekankan transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian melalui penguatan potensi, kapasitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

2.1.5 Transformasi Sosial

Transformasi pada dasarnya diartikan sebagai proses perubahan bentuk, sedangkan transformasi sosial merujuk pada perubahan yang bersifat menyeluruh terhadap struktur, karakter, sifat, maupun watak masyarakat. Dalam konteks hubungan timbal balik antarindividu maupun antarkelompok, transformasi sosial

kerap disamakan dengan istilah perubahan sosial. Beberapa faktor yang berperan penting dalam terjadinya perubahan sosial antara lain adalah dinamika kependudukan, perkembangan teknologi, perubahan nilai-nilai budaya, serta munculnya gerakan sosial. Adapun faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya perubahan sosial mencakup akumulasi kebudayaan, interaksi dengan kebudayaan lain, keberagaman penduduk, disorganisasi sosial, serta perubahan itu sendiri. Selain itu, secara etimologis, istilah transformasi berasal dari dua kata dasar, yaitu *trans* dan *form*. Kata *trans* berarti melintasi atau melampaui, sedangkan *form* berarti bentuk. Dengan demikian, transformasi mengandung makna sebagai proses perpindahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya yang tidak hanya terbatas pada perubahan fisik semata, tetapi juga mencakup perubahan yang lebih mendalam pada aspek sosial dan kultural (Mahmuddin, 2017).

Menurut Enda (2024) dan Ismunandar (2019), transformasi sosial merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan dan membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Proses ini meliputi pembentukan struktur sosial baru, perubahan sistem nilai, serta penyesuaian terhadap norma-norma yang mengatur interaksi sosial (Rafiq, 2020). Lauren (2023) menambahkan bahwa ketika kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberagaman semakin meningkat, pola interaksi sosial pun ikut berubah. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi dalam ranah budaya, tetapi juga meluas ke bidang ekonomi, politik, dan sosial. Dengan demikian, transformasi sosial terjadi secara komprehensif dan memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat (Raidifi & Emiyati, 2024).

Menurut Dawam Rahardjo, istilah transformasi memiliki dua makna utama. Pertama, transformasi berkaitan dengan perubahan mendasar yang berskala besar dalam kehidupan masyarakat global, yakni peralihan dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi. Kedua, pemaknaan transformasi juga lahir dari kajian historis yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu sekitar dua hingga tiga abad terakhir telah terjadi perubahan fundamental, yaitu pergeseran dari masyarakat agraris-tradisional menuju masyarakat industrial modern (Mahmuddin, 2017).

Tujuan dari transformasi sosial pada dasarnya adalah menciptakan perubahan yang lebih adaptif dan progresif dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses ini, masyarakat diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan

perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas sosial dan nilai-nilai budaya yang dimilikinya. Transformasi sosial juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat solidaritas sosial, serta memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan.

Dapat disimpulkan, transformasi sosial dipahami sebagai proses perubahan yang menyeluruh dan berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat. Proses ini mencakup perubahan struktur sosial, nilai, norma, dan pola interaksi yang terbentuk akibat dinamika internal maupun pengaruh eksternal. Dengan demikian, transformasi sosial bukan sekadar perubahan yang terjadi secara spontan, tetapi merupakan proses terencana yang mengarah pada pembentukan tatanan sosial baru yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan.

2.1.6 Kemandiran

Secara etimologis, istilah kemandirian berasal dari kata dasar mandiri yang mendapatkan awalan “ke” dan akhiran “an”, sehingga membentuk kata benda yang menggambarkan suatu keadaan di mana seseorang mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Dengan demikian, kemandirian dapat diartikan sebagai kondisi atau kemampuan untuk berfungsi secara independen, baik dalam berpikir maupun bertindak.

Secara konseptual, kata kemandirian juga berakar dari istilah autonomy, yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk berkembang dari dalam dirinya sendiri sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Istilah ini menggambarkan fase kematangan psikologis, yaitu ketika individu mulai membentuk identitas dan kemampuan untuk mengatur dirinya secara mandiri.

Menurut Barnadib (1983), kemandirian mencakup perilaku yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam mengambil inisiatif, menghadapi hambatan atau permasalahan, serta memiliki rasa percaya diri tanpa bergantung pada pihak lain. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Karniti dan Dali (2000) yang menyatakan bahwa kemandirian merupakan dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan segala sesuatu secara mandiri (Ataza et al., 2025). Pandangan tersebut menegaskan bahwa kemandirian tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pembelajaran dan pengalaman hidup yang membentuk kepercayaan diri individu.

Selanjutnya, Ali dan Asrori menjelaskan bahwa kemandirian merupakan suatu kekuatan internal individu yang diperoleh melalui proses individuasi, yaitu

proses realisasi diri menuju kesempurnaan. Diri dipandang sebagai inti dari kepribadian dan menjadi pusat yang menyelaraskan serta mengoordinasikan seluruh aspek kepribadian. Kemandirian yang sehat dapat dicapai melalui proses perkembangan dan ekspresi sistem kepribadian hingga mencapai tingkatan yang matang (Endriani et al., 2020).

Sejalan dengan hal tersebut, Hasan Basri menegaskan bahwa kemandirian adalah keadaan di mana seseorang mampu mengambil keputusan dan melakukan tindakan tanpa bantuan orang lain. Kemandirian muncul ketika individu dihadapkan pada situasi yang menuntut kepercayaan diri dan tanggung jawab pribadi. Menurut Steinberg (dalam Desmita), kemandirian berbeda dengan ketidaktergantungan. ketidaktergantungan hanyalah salah satu tahap menuju terbentuknya kemandirian yang sesungguhnya (Fadilah & Himmawan, 2023).

Lebih lanjut, Steinberg (2014) membagi kemandirian ke dalam tiga aspek utama, yaitu kemandirian emosional, kemandirian perilaku, dan kemandirian nilai. Kemandirian emosional berhubungan dengan kemampuan individu untuk mengelola hubungan interpersonal secara sehat dan tidak lagi bergantung secara emosional pada orang tua atau figur otoritas. Kemandirian perilaku mencakup kemampuan untuk membuat keputusan serta bertindak berdasarkan pemikiran dan pertimbangan pribadi. Sedangkan kemandirian nilai mencerminkan kemampuan individu dalam menginternalisasi nilai-nilai dan keyakinan moral secara mandiri tanpa harus dipengaruhi oleh tekanan sosial (Husna & Wungu, 2018).

Kemandirian merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan individu. Tanpa adanya kemandirian, seseorang akan sulit mencapai tujuan hidupnya karena cenderung bergantung pada bantuan orang lain. Desmita (2010) menegaskan bahwa kemandirian adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan sendiri, serta berupaya mengatasi rasa malu dan keragu-raguan. Dengan demikian, kemandirian memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari (Model et al., 2018).

Tujuan utama dari pembentukan kemandirian adalah menciptakan individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri, mampu mengambil keputusan secara dewasa, dan dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi kehidupan. Melalui kemandirian, seseorang diharapkan mampu

mengembangkan potensi diri, meningkatkan rasa percaya diri, serta berkontribusi secara positif terhadap lingkungan sosialnya.

Sebagai kesimpulan, kemandirian merupakan kemampuan dasar yang memungkinkan seseorang untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosialnya. Kemandirian tidak hanya mencakup aspek kemampuan fisik atau ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, emosional, dan moral yang membentuk karakter individu. Dengan kata lain, kemandirian adalah wujud dari kematangan pribadi yang diperoleh melalui proses belajar, pengalaman hidup, dan kemampuan reflektif untuk mengelola diri secara utuh dan bertanggung jawab.

2.1.7 Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis (Sana, 2023)

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional (Nur Aeda & Riadul Jannah, 2022)

Program Keluarga Harapan merupakan bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam kluster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia.Program ini merupakan bantuan besyarat dan disesuikan dengan

persyaratan pendidikan dan kesehatan. Kesembungan dari program ini akanberkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan melenium *(Millennium Developmen Goals atau MDGs)*. Setidaknya ada 5 komponem tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapain pendidikan untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu (Bakulu et al., 2021).

Program ini memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Selanjutnya, pelaksanaan PKH diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan, sasaran penerima, serta tujuan program dalam mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat (Nuraida, 2020)

Tujuan utama PKH dalam kesehatan adalah meningkatkan status kesehehatan ibu dan anak, khususnya bagi kelompok masyarakat miksin. Sedangkan dalam bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan angka paristisipasi pendidikan dasar wajib 12 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluar miskin. Dan yang terakhir bantuan PKH ditujukan kepada lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat guna membantu memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidupnya (Hakim, 2018).

Dengan demikian, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan sosial dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui pendekatan yang bersyarat. PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial semata, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang menekankan perubahan perilaku keluarga miskin agar lebih mandiri dan produktif. Program ini menjadi pondasi penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan kajian pustaka yang ditemukan, belum ada objek secara spesifik sama dalam penelitian ini, hanya saja berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dikaitkan dengan permasalahan yang ada yaitu:

1. Eka Rifka, Adam, dan Samsinas (2023), yang berjudul: Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Tingkat Kemiskinan di Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu. Adapun persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Sementara perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada strategi intervensi Dinas Sosial dalam mendorong transformasi kemandirian penerima PKH di Kecamatan Limboto Barat.
2. Dyan Silviana dan Nur Wahdatul Chilmy (2024), yang berjudul: Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mencapai Graduasi Mandiri di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Adapun persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH), menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, serta menyoroti upaya menuju kemandirian penerima bantuan sosial. Sementara perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menitikberatkan pada peran pendamping PKH sebagai fasilitator, edukator, dan motivator dalam membantu KPM mencapai graduasi mandiri, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada strategi intervensi Dinas Sosial dalam mendorong transformasi kemandirian penerima PKH di Kecamatan Limboto Barat, dengan menelaah langkah-langkah kebijakan dan pendekatan sosial yang digunakan oleh instansi pemerintah, bukan pada peran individu pendamping.
3. Pakaya, Djaafar, Kamuli, dan Mozin (2024), yang berjudul: Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Desa Pentadio Barat Kabupaten Gorontalo. Adapun persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang

dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH), menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, serta menyoroti upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui pelaksanaan kebijakan sosial. Sementara perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menitikberatkan pada implementasi kebijakan PKH dalam tiga bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta membahas faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program di tingkat desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada strategi intervensi Dinas Sosial dalam mendorong transformasi kemandirian penerima PKH di Kecamatan Limboto Barat, dengan menelaah upaya kelembagaan dan pendekatan sosial yang digunakan untuk menciptakan perubahan perilaku serta kemandirian penerima manfaat.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Eka Rifka, Adam, dan Samsinas (2023)	Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Tingkat Kemiskinan di Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu.	Kualitatif Deskriptif	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah keduanya meneliti Program Keluarga Harapan (PKH), menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan menyoroti peran Dinas Sosial dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Eka Rifka dkk. berfokus pada peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi intervensi Dinas Sosial dalam mendorong transformasi kemandirian penerima PKH di Kecamatan Limboto Barat.

2	Dyan Silviana dan Nur Wahdatul Chilmy (2024)	Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mencapai Graduasi Mandiri di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.	Kualitatif Deskriptif	Sama-sama meneliti Program Keluarga Harapan (PKH), menggunakan pendekatan kualitatif, serta memiliki fokus pada upaya mencapai kemandirian penerima bantuan sosial	Penelitian Dyan Silviana dkk. menitikberatkan pada peran pendamping PKH sebagai fasilitator dan motivator dalam mendorong graduasi mandiri KPM, sedangkan penelitian ini menyoroti strategi intervensi kelembagaan Dinas Sosial dalam mendorong transformasi kemandirian penerima PKH
3	Pakaya, Djaafar, Kamuli, dan Mozin (2024),	Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Desa Pentadio Barat Kabupaten Gorontalo.	Kualitatif Deskriptif	Sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH), menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, serta menyoroti upaya pemberdayaan masyarakat miskin	Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menitikberatkan pada implementasi kebijakan PKH dalam tiga bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan

		melalui pelaksanaan kebijakan sosial	sosial, serta membahas faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program di tingkat desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada strategi intervensi Dinas Sosial dalam mendorong transformasi kemandirian penerima PKH

2.3 Kerangka Berpikir

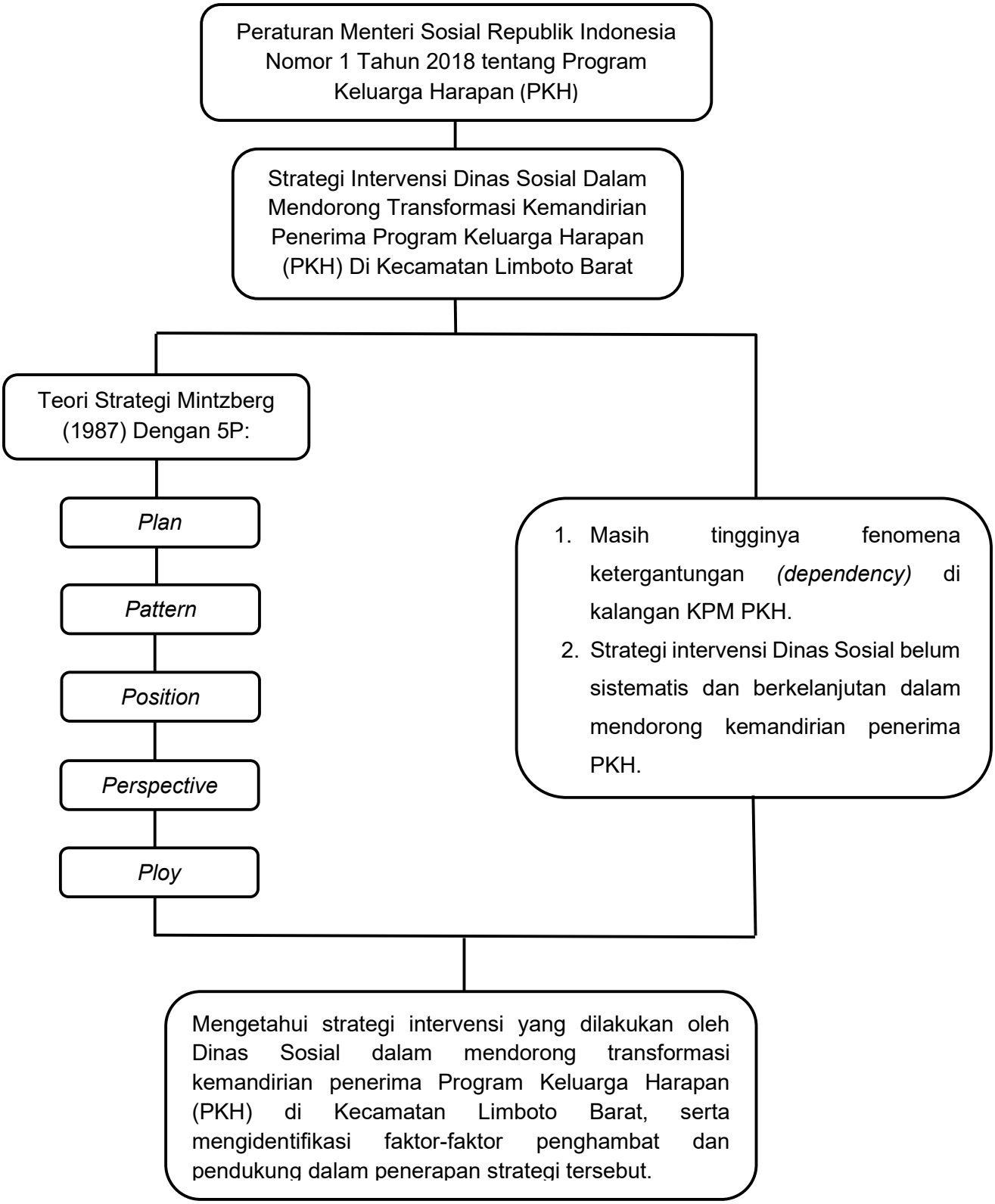
Kerangka berpikir dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan ketergantungan yang masih tinggi di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat. Meskipun PKH telah berjalan sejak tahun 2007 dan memberikan dampak positif dalam menurunkan angka kemiskinan, namun sebagian besar penerima manfaat belum mampu bertransformasi menjadi mandiri secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum sepenuhnya efektif dalam mendorong perubahan perilaku dan pola pikir KPM menuju kemandirian.

Kondisi ini menandakan perlunya strategi intervensi sosial yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi lokal masyarakat. Dinas Sosial sebagai lembaga pelaksana memiliki peran penting dalam merancang strategi intervensi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menekankan aspek pemberdayaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas.

Dalam konteks ini, teori strategi yang dikemukakan oleh Mintzberg dan kawan-kawan (1987) digunakan untuk menganalisis langkah-langkah intervensi Dinas Sosial dalam mendorong transformasi kemandirian penerima PKH. Teori ini menjelaskan strategi melalui lima pendekatan yang saling berhubungan, yaitu *Plan, Pattern, Position, Perspective, dan Ploy*, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagai *Plan*, strategi intervensi Dinas Sosial dipahami sebagai perencanaan terarah dalam bentuk program pemberdayaan dan pendampingan untuk mencapai tujuan kemandirian penerima PKH.
2. Sebagai Pattern, strategi menggambarkan pola konsistensi pelaksanaan program sosial yang dilakukan dari waktu ke waktu, termasuk kegiatan pelatihan, sosialisasi, serta evaluasi yang menjadi bagian dari rutinitas kelembagaan.
3. Sebagai *Position*, strategi menempatkan Dinas Sosial sebagai institusi yang berperan penting dalam menghubungkan kebijakan pusat dengan implementasi di tingkat lokal, sekaligus mengakomodasi karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat Limboto Barat.
4. Sebagai *Perspective*, strategi mencerminkan nilai, visi, dan komitmen Dinas Sosial dalam membangun masyarakat yang berdaya dan mandiri melalui penguatan mental, keterampilan, dan etos kerja penerima manfaat.
5. Sebagai *Ploy*, strategi digunakan sebagai langkah taktis dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul, seperti rendahnya motivasi KPM, keterbatasan sarana, dan kurangnya koordinasi antar pihak terkait.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini memposisikan strategi intervensi Dinas Sosial sebagai variabel utama yang berperan dalam proses transformasi kemandirian penerima PKH, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat, seperti kebijakan, kapasitas pendamping sosial, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan sumber daya lokal.



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Strategi Intervensi Dinas Sosial dalam Mendorong Transformasi Kemandirian Penerima PKH di Kecamatan Limboto Barat adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2005:6)**,** penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alami (zuchri abdussamad, 2021)

Menurut (Sugiyono, 2013) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada generalisasi.

Pendekatan kualitatif ini dipilih karena dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan strategi intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mendorong transformasi kemandirian penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, serta melihat bagaimana strategi tersebut berpengaruh terhadap perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

3.2 Kehadiraan Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan berperan penting sebagai bentuk keterlibatan langsung dengan para informan, baik melalui kegiatan observasi maupun wawancara mendalam. Kehadiran ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam, terutama dalam memahami bagaimana strategi intervensi

Dinas Sosial dijalankan dalam mendorong kemandirian penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain itu, kehadiran peneliti memungkinkan terjalinnya hubungan komunikasi yang baik dengan informan, seperti pejabat Dinas Sosial, pendamping sosial PKH, maupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Melalui interaksi yang intens, peneliti dapat menangkap dinamika pelaksanaan program serta mengamati berbagai faktor pendukung maupun hambatan yang dihadapi dalam upaya membangun kemandirian penerima bantuan.

Dalam proses penelitian, peneliti akan berada secara langsung di kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dan di wilayah Kecamatan Limboto Barat untuk melakukan wawancara, observasi, serta pengumpulan data dokumentasi. Kehadiran peneliti secara langsung di lapangan juga dimaksudkan untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh agar data yang terkumpul benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dan wilayah Kecamatan Limboto Barat. Lokasi ini dipilih karena Dinas Sosial merupakan instansi yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)**,** termasuk upaya intervensi sosial untuk mendorong kemandirian para penerima manfaat. Kecamatan Limboto Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang cukup tinggi, sehingga relevan untuk meneliti bagaimana strategi intervensi Dinas Sosial diterapkan dalam meningkatkan kemandirian penerima PKH di tingkat lapangan. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan relevansi dengan fokus penelitian**,** ketersediaan data yang dibutuhkan, serta kemudahan akses bagi peneliti untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi selama proses penelitian. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua bulan, yaitu mulai dari November 2025 hingga Januari 2026, dengan tahapan meliputi persiapan, pengumpulan data di lapangan, analisis data, serta penyusunan laporan penelitian.

3.4 Sumber Data

Dalam kegiatan penelitian ada banyak hal penting menyertainya, selain topik penelitian dan metodologi ada juga data penelitian. Tanpa adanya data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Maka penelitian tersebut akan stagnan,

sebab tidak ada yang bisa diputuskan atau disimpulkan alias penelitian tidak memberi hasil. Dalam penelitian, data memiliki sifat krusial karena akan menjadi pembuktian dari landasan teori dan memberi jawaban atas rumusan masalah. Sekaligus menjadi penentu apakah hipotesis yang disusun sesuai atau sebaliknya. Untuk itu sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

3.4.1 Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2013), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh peneliti itu sendiri (misalnya melalui wawancara atau kuesioner), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak langsung dari objek penelitian (misalnya melalui dokumen, buku, atau laporan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu mereka yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan strategi intervensi Dinas Sosial. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

- Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo: 1 orang
- Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH): 1 orang
- Kepala Seksi atau Pejabat Teknis terkait di Dinas Sosial: 1 orang
- Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan: 6 orang
- Aparat Desa di Kecamatan Limboto Barat: 1 orang

3.4.2 Data sekunder

Menurut (Sugiyono, 2013) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, laporan, dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan strategi intervensi Dinas Sosial. Sumber data sekunder ini mencakup: Dokumen resmi dari Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, seperti laporan kegiatan, pedoman pelaksanaan, dan data KPM PKH.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metoode yang digunakan untuk memperoleh data dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, Teknik pengumpula teknik pengumpulan data dilakukan melalui purposive sampling.

Menurut Sugiyono (2019) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh penelti (Ani et al., 2021)

Teknik purposive sampling dipilih agar peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian dari para informan yang memiliki pengetahuan serta pengalaman langsung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan jelas mengenai objek penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan guna mengamati serta menganalisis secara langsung permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

3.5.2 Wawancara

Dalam hal pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara terhadap informan dengan menggunakan pedoman instrumen wawancara yang berkaitan dengan strategi intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mendorong transformasi kemandirian penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hambatan, serta hasil dari strategi intervensi yang dijalankan oleh Dinas Sosial. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya memperoleh informasi yang mendalam dari para informan, seperti pejabat Dinas Sosial, pendamping sosial PKH, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), guna memahami sejauh mana strategi intervensi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian penerima bantuan.

3.5.3 Dokumentasi

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi sebagai bukti pendukung dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh serta memastikan keabsahan informasi yang dikumpulkan. Data dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai bentuk, seperti foto kegiatan, laporan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), data jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta dokumen resmi dari Dinas Sosial

Kabupaten Gorontalo. Pengambilan dokumentasi dilakukan menggunakan kamera handphone dan arsip digital yang relevan dengan fokus penelitian.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain (Muhadjir, 2000). Sedangkan menurut Moleong analisis data adalah proses mengukur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Hal ini mengandung beberapa pengertian bahwa dalam pelaksanaannya analisis data harus dilakukan sejak awal pengumpulan data di lapangan, hal ini perlu dilakukan secara intensif agar data di lapangan terkumpul semuanya. (Oktober et al., 2022)

Menurut Ulber Silalahi kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

3.6.1 Redukasi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Pada tahap ini peneliti menyeleksi dan mengorganisasi data yang relevan dengan fokus penelitian mengenai strategi intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mendorong transformasi kemandirian penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Reduksi dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan catatan lapangan, seperti perencanaan strategi, bentuk pelaksanaan intervensi, kendala yang dihadapi, dan dampak terhadap kemandirian penerima PKH. Data yang tidak relevan atau tidak mendukung fokus penelitian akan disisihkan agar analisis lebih terarah dan bermakna.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah kedua setelah data direduksi, di mana data disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan strategi intervensi Dinas Sosial dalam mendorong kemandirian penerima PKH di Kecamatan Limboto Barat. Selain narasi, peneliti juga menggunakan tabel dan diagram sederhana untuk memperlihatkan hubungan antar tema atau temuan yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Penyajian data ini memudahkan peneliti dalam melihat pola hubungan antara strategi yang diterapkan, hambatan yang muncul, dan dampak terhadap penerima manfaat.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data kualitatif. Pada tahap ini peneliti menafsirkan makna dari data yang telah disajikan dan menarik kesimpulan berdasarkan pola serta hubungan antar tema yang ditemukan. Dalam penelitian ini, kesimpulan diperoleh dari hasil analisis mengenai strategi intervensi Dinas Sosial, faktor penghambat dan pendukung pelaksanaannya, serta pengaruhnya terhadap kemandirian penerima PKH. Kesimpulan tersebut kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan, yaitu teori strategi Mintzberg et al. (1998) tentang 5P *Strategy,* yang meliputi *Plan, Pattern, Position, Perspective,* dan *Ploy,* untuk memperkuat interpretasi dan validitas temuan penelitian.

3.7 Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan proses untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian memiliki tingkat kepercayaan dan kebenaran yang tinggi. Pengecekan keabsahan ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber atau cara lain di luar data itu sendiri sebagai alat pembanding. Salah satu teknik yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menjamin keabsahan data adalah *triangulasi*. Teknik ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya:

3.7.1 Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan dan mengecek informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dan menelaah data yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, serta dokumen pendukung. Tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi antara hasil wawancara dengan data dokumentasi yang diperoleh.

3.7.2 Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memeriksa keabsahan data dengan melihat kesesuaian hasil dari beberapa metode yang digunakan, baik terhadap informan yang sama maupun situasi penelitian yang serupa.

3.7.3 Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor waktu dalam proses pengumpulan data. Waktu pelaksanaan pengumpulan data dapat memengaruhi tingkat keakuratan dan keandalan informasi yang diperoleh. Misalnya, wawancara yang dilakukan pada pagi hari, ketika informan masih dalam kondisi segar dan belum banyak mengalami gangguan atau tekanan, cenderung menghasilkan data yang lebih valid dan dapat dipercaya dibandingkan dengan waktu lainnya.

3.8 Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Persiapan

   Pada tahap ini, peneliti melakukan berbagai langkah awal sebelum penelitian dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pra-penelitian, pemilihan lokasi penelitian, pemanfaatan lingkungan penelitian, serta penyiapan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terarah.

2. Tahap Pelaksanaan

   Pada tahap pelaksanaan, peneliti mulai melakukan kegiatan pengumpulan data dengan menggali informasi dari berbagai sumber yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap ini merupakan inti dari proses penelitian karena berfokus pada pengumpulan dan pengolahan data di lapangan.

3. Tahap Pelaporan

   Tahap ini merupakan bagian akhir dari penelitian, di mana peneliti mengelola serta menganalisis data yang telah diperoleh, baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Data tersebut kemudian disusun secara terstruktur dan dituangkan ke dalam bentuk laporan penelitian sebagai hasil akhir yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau dasar pengambilan keputusan.

Tabel 3. 8 Tahap-tahap Penelitian

No	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN						
		Juni 2025	September 2025	Oktober 2025	November 2025	Desember 2025	Januari 2026	Februari 2026
1.	Pra Observasi							
2.	Acc Judul							
3.	Penyusunan Laporan							
4.	Seminar Proposal							
5.	Revisi Proposal Penelitian							
6.	Operasional Penelitian							
7.	Revisi Hasil Penelitian							
8.	Bimbingan							
9.	Penulisan Laporan akhir							

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Pada bab ini, peneliti menyajikan hasil penelitian yang berkaitan dengan Strategi Dinas Sosial dalam Mendorong Transformasi Kemandirian Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat. Selain itu, peneliti juga menguraikan secara singkat profil lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Limboto Barat, sebagai wilayah pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang menjadi objek penelitian. Uraian tersebut mencakup peran Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, pendamping PKH, pemerintah desa, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pelaksanaan, pendampingan, dan upaya mendorong kemandirian penerima bantuan sosial.

4.1.2 Sejarah Kecamatan Limboto Barat

Sejarah Kecamatan Limboto Barat berkaitan erat dengan sejarah Limboto sebagai ibukota Kabupaten Gorontalo, dengan asal-usul penduduknya yang signifikan dari migrasi orang Jaton (Jawa Tondano) yang dibawa oleh Belanda, termasuk leluhur tokoh seperti Amal Limojo, yang membentuk desa-desa seperti Yosonegoro dan mengembangkan pertanian serta budaya Jawa di wilayah tersebut sejak akhir abad ke-19, menjadikannya bagian penting dari perkembangan Gorontalo.

4.1.3 Kondisi Wilayah

Kecamatan Limboto Barat merupakan salah satu dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Kecamatan ini terdiri atas 10 Desa dan 47 dusun. Luas wilayah Kecamatan Limboto Barat adalah sebesar 168,67 km2 atau sebesar 168,67 % dari luas wilayah Kabupaten Gorontalo. Desa terluas adalah Desa Daenaa, Dilihat dari morfologi permukaan bumi, yang terluas adalah daerah dataran tinggi. Batas Wilayah Kecamatan Limboto Barat, sebelah timur Kecamatan Limboto, sebelah barat Kecamatan Tibawa, Sebelah Utara Kabupaten Gorontalo utara dan sebelah selatan Kecamatan Tabongo dan Dungaliyo.

4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

4.2.1 Profile

Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Dinas Sosial tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah daerah dalam menangani berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat, seperti kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok rentan.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo terus mengalami penyesuaian kelembagaan dan fungsi guna meningkatkan efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial. Dinas ini berperan penting dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk pelaksanaan program bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah.

Salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bantuan sosial bersyarat. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial bekerja sama dengan pendamping PKH, pemerintah kecamatan dan desa, serta berbagai pihak terkait untuk memastikan program berjalan sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran.

Secara struktural, Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo berada di bawah Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial didukung oleh beberapa unsur pimpinan dan bidang, antara lain:

a. Kepala Dinas Sosial, merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan urusan sosial, termasuk perumusan kebijakan, koordinasi program, serta pengawasan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

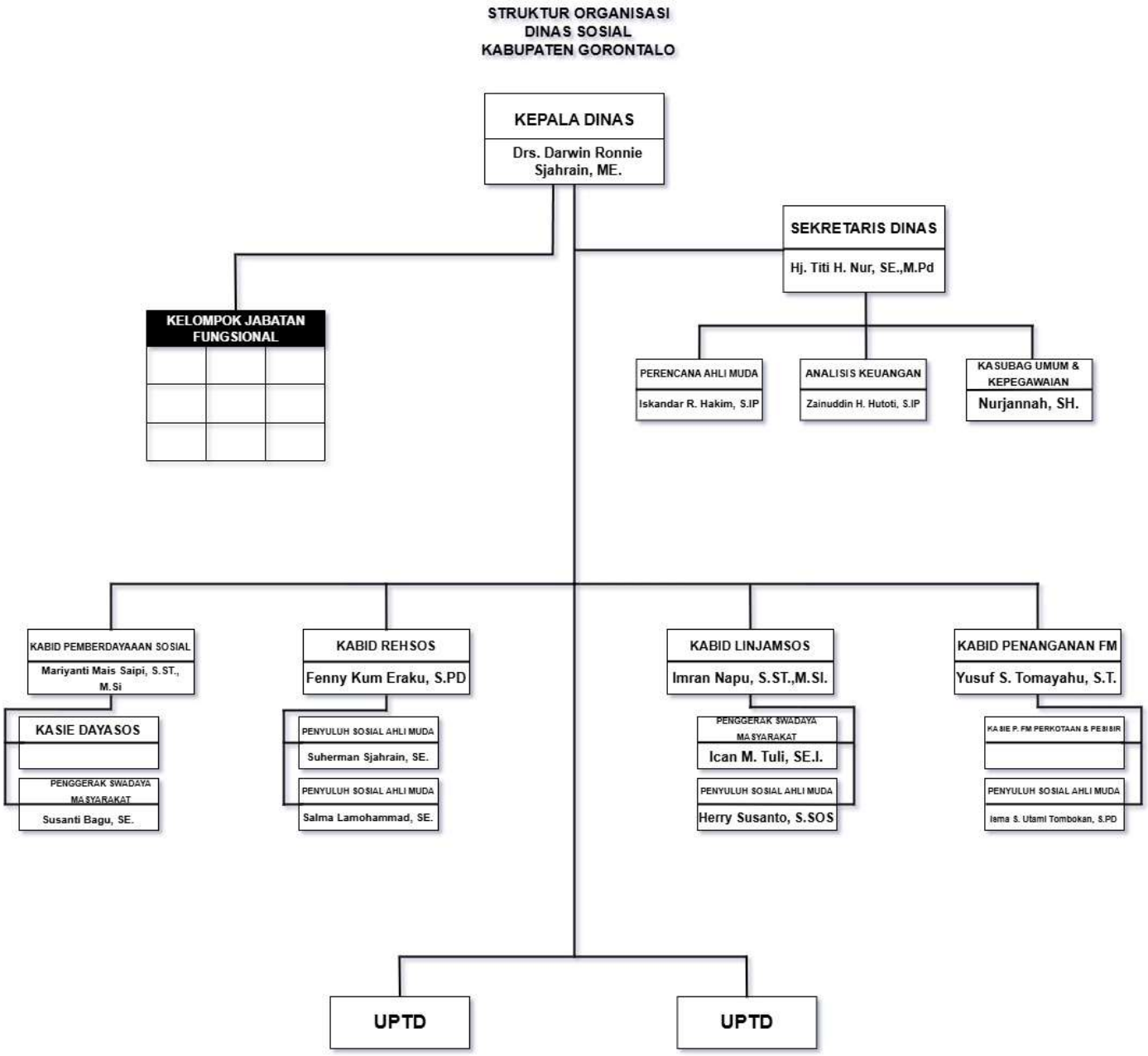
b. Sekretaris Dinas, bertugas mengoordinasikan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, serta perencanaan program dan kegiatan dinas.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, bertanggung jawab dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan jaminan sosial, termasuk pengelolaan dan pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH).

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, melaksanakan pelayanan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti penyandang disabilitas, anak terlantar, dan kelompok rentan lainnya.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**,** bertugas dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan sosial.

f. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)**,** yang berperan langsung di lapangan dalam melakukan pendampingan, verifikasi data, pembinaan, serta mendorong transformasi kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya di Kecamatan Limboto Barat.



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

4.2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi

a. Visi

Gorontalo Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saling Ditopang Pemerintahan Yang Bersih Dan Terbuka

b. Misi

1. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat melalui Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mandiri.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui Pemberdayaan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan di bidang Ekonomi, Politik serta Meningkatkan Pemahaman tentang Pengarustamaan Gender Kepada Semua Pemangku Kepentingan.
4. Terlapornya Kasus Kekerasan, Eksploitasi terhadap Perempuan dan Anak melalui Peningkatan Perlindungan Hak - Hak Perempuan dan Anak.
5. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Kualitas Sumber Daya Aparatur.

c. Tujuan

1. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama bagi perempuan dan anak melalui berbagai program sosial, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan hak-hak dasar.
3. Menyediakan layanan dan fasilitas yang diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial.
4. Melakukan pengembangan sumber daya manusia terutama bagi para tenaga kerja sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan berdaya saing.
5. Menyediakan informasi, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai program sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
6. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

d. Fungsi

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sosial

b. Menyusun rencana program/kegiatan tahunan tingkat Provinsi sejalan dengan perencanaan nasional dalam bidang sosial;
c. Pembinaan, pelayanan, rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan serta pemberian bantuan dan jaminan sosial
d. Pemantauan dan evaluasi program dibidang sosial
e. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas
f. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial
g. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial
h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial
i. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial
j. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam deskripsi hasil penelitian ini, peneliti akan menguraikan secara menyeluruh hasil penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara mendalam dengan para informan yang telah ditentukan sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mendorong transformasi kemandirian penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat. Data yang dianalisis merupakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap berwenang dan kompeten, seperti pejabat Dinas Sosial, pendamping sosial PKH, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program. Selain itu, data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan pelaksanaan program, serta data pendukung lainnya juga digunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan dari teori strategi yang dikemukakan oleh Mintzberg melalui konsep *5P Strategy*, yaitu *Plan, Pattern, Position, Perspective, dan Ploy*. Kelima indikator tersebut digunakan untuk menganalisis strategi intervensi Dinas Sosial dalam mendorong transformasi kemandirian penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

di Kecamatan Limboto Barat. Masing-masing indikator diuraikan dan dianalisis berdasarkan hasil kajian dan temuan penelitian yang telah dilakukan.

4.3.1 *Plan*

Plan merupakan tahap awal dalam pendekatan Mintzberg 5P yang menekankan pada bagaimana suatu organisasi menyusun perencanaan strategis sebelum melaksanakan kebijakan atau program. Dalam konteks penelitian ini, indikator *Plan* digunakan untuk melihat bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, khususnya Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyusun rencana kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Limboto Barat.

Perencanaan ini menjadi penting karena PKH tidak hanya dimaknai sebagai penyaluran bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang diharapkan mampu menghasilkan program yang tepat sasaran dan berorientasi pada pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial / Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bapak “IN”, yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025 pukul 11.04 WITA, diperoleh informasi mengenai perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial dalam mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Limboto Barat.

Adapun pertanyaan pertama yang diajukan pada indikator *Plan* yaitu “Bagaimana Bapak selaku Kepala Bidang menyusun rencana kegiatan yang berkaitan langsung dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial untuk mendorong kemandirian KPM di Kecamatan Limboto Barat?” Informan menyatakan:

> *“Perencanaan kegiatan dilakukan pada awal tahun anggaran melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan pelaksana program, termasuk SDM PKH. Dalam rapat tersebut dibahas agenda kegiatan selama satu tahun ke depan, salah satunya terkait strategi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat, baik secara individu maupun kelompok.”*

Pertanyaan kedua yang diajukan pada indikator ini adalah “Apa saja hal utama yang Bapak pertimbangkan dalam merancang kegiatan pemberdayaan

atau perlindungan sosial bagi penerima PKH?"

Informan menyampaikan:

> *"Dalam merancang kegiatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, kami berpedoman pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pendamping PKH juga kami dorong untuk melaporkan masyarakat kurang mampu yang belum tersentuh bantuan agar dapat diusulkan ke program bantuan lain selain PKH."*

Selain itu, informan menegaskan bahwa pendamping PKH tidak hanya difokuskan pada pelaksanaan pertemuan kelompok bulanan (P2K2), tetapi juga diarahkan untuk melakukan kunjungan rumah *(home visit)* guna mengetahui kondisi sosial, ekonomi, dan keluarga KPM secara langsung. Pendekatan ini dinilai penting untuk membangun kedekatan emosional antara pendamping dan KPM sehingga berbagai permasalahan kesejahteraan dapat teridentifikasi dan ditangani secara lebih komprehensif.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan PKH dilakukan secara sistematis dan partisipatif, dengan menekankan aspek edukasi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep Plan dalam teori Mintzberg, di mana perencanaan dipahami sebagai upaya sadar dan terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi, dalam hal ini mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat melalui Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kedua yaitu Pejabat Teknis Dinas Sosial, Bapak "FSN", yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025 pukul 12.19 WITA, diperoleh informasi mengenai perencanaan teknis kegiatan pemberdayaan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat.

Adapun pertanyaan yang diajukan pada indikator *Plan* yaitu "Bagaimana proses unit teknis menyusun rencana kegiatan pemberdayaan?"

Informan menyampaikan:

> *"Dalam proses penyusunan perencanaan pemberdayaan SDM PKH, setiap pendamping memiliki wilayah kerja masing-masing. Pelaksanaan kegiatan pendamping disesuaikan dengan arahan dan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kegiatan yang dilaksanakan cukup beragam, seperti pertemuan kelompok, P2K2, pendataan, hingga pembaruan data. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan oleh pendamping dengan menyesuaikan kondisi wilayah dan jumlah target survei yang harus dicapai."*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu “Apa pertimbangan teknis utama dalam menentukan kegiatan mana yang perlu diprioritaskan?” Informan menyatakan:

> *“Prioritas kegiatan pada dasarnya telah diatur oleh Kementerian Sosial. Kami bekerja berdasarkan waktu yang telah ditentukan, sehingga apabila diberikan batas waktu satu hari, maka kegiatan tersebut harus diselesaikan dalam waktu satu hari sesuai dengan arahan yang ada.”*

Pernyataan informan tersebut menegaskan bahwa penentuan prioritas kegiatan lebih menitikberatkan pada kepatuhan terhadap jadwal dan target waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa unit teknis di daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan, dengan fokus utama pada efektivitas waktu dan ketepatan pelaksanaan kegiatan agar target program PKH dapat tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Limboto Barat, Bapak “SHM”, yang dilaksanakan pada Selasa, 30 Desember 2025 pukul 10.59 WITA, diperoleh informasi mengenai proses perencanaan pendampingan yang dilakukan untuk mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Adapun pertanyaan pertama yang diajukan pada indikator *Plan* yaitu “Menurut Bapak, bagaimana proses perencanaan pendampingan untuk membantu KPM supaya lebih mandiri?”

Informan menyampaikan:

> *“Pendampingan dalam Program Keluarga Harapan direncanakan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan secara rutin minimal satu kali dalam sebulan. Setiap desa dibagi ke dalam beberapa kelompok PKH yang beranggotakan sekitar 20 sampai 30 KPM berdasarkan kedekatan wilayah tempat tinggal, seperti pembagian per dusun. Setiap kelompok melaksanakan pertemuan bulanan dengan materi P2K2 yang telah ditetapkan.”*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu “Faktor apa saja yang biasanya Bapak pertimbangkan saat merencanakan kegiatan pendampingan?” Informan menyatakan:

> *“Faktor utama yang dipertimbangkan dalam perencanaan pendampingan adalah kondisi sosial dan kondisi tempat tinggal KPM. Pembentukan kelompok dilakukan berdasarkan kedekatan wilayah dan karakteristik KPM, termasuk usia dan kondisi ekonomi. KPM yang berusia lanjut biasanya digabungkan dengan KPM usia produktif agar tercipta interaksi dan saling mendukung dalam kelompok.”*

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perencanaan pendampingan mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis KPM, tidak semata-mata aspek administratif program. Hal ini menunjukkan bahwa pendamping PKH berupaya menciptakan lingkungan kelompok yang mendukung, inklusif, dan partisipatif sebagai bagian dari strategi perencanaan pendampingan untuk memperkuat solidaritas serta mendorong perubahan perilaku KPM menuju kemandirian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, yaitu Bapak “IAH”, yang dilaksanakan pada Senin, 29 Desember 2025, pukul 11.18 WITA diperoleh gambaran mengenai perencanaan dukungan desa terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mendorong kemandirian masyarakat.

Adapun pertanyaan pertama yang diajukan yaitu “Bagaimana desa merencanakan dukungan bagi KPM PKH agar bisa lebih mandiri?” Informan menyampaikan bahwa:

> *“Langkah awal yang dilakukan adalah melihat terlebih dahulu kondisi para penerima PKH. Rata-rata mereka berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, sebagian sudah lanjut usia dan masih memiliki tanggungan anak yang bersekolah. Karena keterbatasan dana desa, kami belum bisa menyediakan program khusus yang besar. Oleh karena itu, bentuk dukungan utama yang kami lakukan adalah memberikan motivasi dan dorongan agar mereka tetap berusaha dan bekerja sesuai kemampuan masing-masing, sehingga tidak terus bergantung pada bantuan PKH.”*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu “Apa yang menjadi dasar pertimbangan desa saat menentukan program bantuan atau pemberdayaan?” Informan menjelaskan bahwa:

> *“Dasar pertimbangan desa dalam menentukan program bantuan atau pemberdayaan adalah tingkat kemiskinan dan kondisi kehidupan masyarakat. Namun, untuk penentuan penerima PKH secara teknis lebih diketahui oleh pendamping PKH. Kami di desa hanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Selain itu, keterbatasan anggaran dana desa juga menjadi pertimbangan, sehingga kami lebih fokus pada kegiatan yang sifatnya mendorong dan memotivasi masyarakat, seperti bantuan pertanian jagung dan padi, atau mendorong usaha kecil bagi warga yang memiliki keterampilan.”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan desa dalam mendukung KPM PKH didasarkan pada kondisi riil masyarakat serta kemampuan keuangan desa. Dalam perspektif teori Mintzberg, kondisi ini mencerminkan konsep *Plan*, di mana perencanaan dilakukan secara realistis dan

adaptif, dengan menyesuaikan tujuan pemberdayaan masyarakat terhadap keterbatasan sumber daya yang dimiliki desa.

Peneliti selanjutnya melihat perspektif masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak langsung dari pelaksanaan program, khususnya dalam upaya peningkatan kondisi ekonomi keluarga. Pada indikator *Plan*, peneliti mewawancarai 6 informan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satu informan merupakan masyarakat yang tinggal di Desa Huidu dan telah menjadi penerima PKH sejak tahun 2015 hingga 2025. Wawancara dilaksanakan pada Senin, 29 Desember 2025 pukul 11.00 WITA dengan informan bernama “LD”.

Pertanyaan pertama yang diajukan pada indikator *plan* yaitu “Apa rencana anda untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga ke depannya?” Informan menyampaikan bahwa:

> *“Kalau menghadapi kesulitan ekonomi, saya lebih memilih untuk meningkatkan usaha dan bekerja lebih giat. Saya tidak langsung bergantung pada bantuan, karena sejak awal saya menanamkan pada diri sendiri bahwa bantuan itu hanya penunjang.”*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu “Ketika usaha atau kegiatan ekonomi keluarga terhambat, langkah apa yang paling sering keluarga ambil?” Informan menyampaikan bahwa:

> *“Jika kegiatan ekonomi terhambat, saya biasanya mencari cara lain untuk tetap bekerja dan menyesuaikan pengeluaran keluarga. Selain itu, pengalaman dan pembelajaran dari kegiatan PKH juga membantu saya lebih kuat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit.”*

Selanjutnya, informan kedua yaitu Ibu “H”, selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2019 hingga 2026, pada hari Senin, 29 Desember 2025 pukul 13.00 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

> *"Jadi rencana saya ke depan tetap berusaha untuk mandiri dan tidak bergantung pada PKH. Walaupun saat ini saya masih menerima PKH karena masih masuk desil 3, saya tetap berusaha mengatur keuangan dengan baik dan mencukupi kebutuhan keluarga dari hasil usaha sendiri, supaya kalau suatu saat PKH dihentikan saya sudah siap."*

Menanggapi pertanyaan kedua:

> *"PKH sangat membantu saya dalam merencanakan masa depan keluarga, khususnya untuk pendidikan anak. Dengan adanya bantuan PKH, kebutuhan sekolah anak bisa terpenuhi, sehingga saya bisa lebih fokus memikirkan rencana ke depan tanpa terlalu terbebani biaya pendidikan."*

Kemudian masih berkaitan dengan pertanyaan yang sama, informan ketiga yaitu Ibu “MD”, selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2024 hingga saat ini (2025), pada hari Senin, 29 Desember 2025 pukul 14.00 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

> *“Untuk rencana meningkatkan ekonomi ke depan, sejujurnya saya belum terlalu memikirkan secara khusus, karena saya masih fokus pada pemenuhan kebutuhan anak, terutama pendidikan. Namun saya tetap berusaha agar nantinya, meskipun sudah tidak menerima PKH, saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja semampu saya.”*

Pertanyaan kedua, informan menjawab:

> *“PKH sangat membantu saya dalam merencanakan masa depan keluarga, khususnya untuk pendidikan anak. Dengan adanya bantuan PKH, kebutuhan sekolah anak bisa terpenuhi, sehingga saya lebih tenang dan memiliki harapan agar anak saya bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.”*

Selanjutnya, masih pada pertanyaan yang sama, informan keempat yaitu Bapak “SM”, selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2022 hingga saat ini (2025), yang diwawancarai pada hari Senin, 29 Desember 2025 pukul 14.30 WITA, menyampaikan tanggapannya pada pertanyaan pertama sebagai berikut:

> *“Untuk rencana meningkatkan kondisi ekonomi ke depan, sejujurnya saya belum terlalu memikirkan secara matang karena kondisi ekonomi saat ini masih sulit. Saya masih fokus memenuhi kebutuhan anak-anak, terutama pendidikan. Namun, saya tetap berharap ke depan bisa mendapatkan pekerjaan yang tetap dan layak agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga tanpa bergantung pada PKH.”*

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

> *“Bantuan PKH sangat membantu saya dalam merencanakan masa depan keluarga, khususnya untuk kebutuhan anak sekolah. Dengan adanya PKH, saya bisa lebih tenang karena kebutuhan pendidikan anak bisa dipenuhi, meskipun untuk rencana jangka panjang meningkatkan ekonomi keluarga masih terasa sulit.”*

Masih berkaitan dengan pertanyaan yang sama, informan kelima yaitu Ibu “D”, selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 hingga saat ini (2026), pada hari Senin, 12 Desember 2025 pukul 14.34 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

> *“Untuk rencana meningkatkan ekonomi ke depan, saya belum terlalu memikirkan membuka usaha karena fokus utama saya masih pada pemenuhan kebutuhan anak-anak yang masih sekolah. Namun saya menyadari bahwa ke depan saya harus berusaha agar bisa mandiri.”*

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menjawab:

“Bantuan PKH membantu saya dalam merencanakan masa depan keluarga, terutama memastikan kebutuhan pendidikan anak terpenuhi. Dengan adanya PKH, saya bisa lebih tenang memikirkan kelanjutan sekolah anak-anak saya.”

Selanjutnya, sebagai informan keenam sekaligus informan terakhir, Ibu “SN”, selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 yang berhasil graduasi atau mandiri pada tahun 2022, pada hari Senin, 12 Januari 2026 pukul 14.50 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

“Sekarang kami sudah graduasi atau mandiri. Kalau ditanya bagaimana rencana kami sampai bisa di titik ini, sejak awal kami selalu berusaha dan mengubah pola pikir bahwa bantuan itu hanya sementara. Setelah mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, kami mulai menyusun rencana untuk membangun usaha kecil-kecilan, sampai akhirnya semua berjalan sesuai rencana dan kami berhasil graduasi.”

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

“Waktu masih menerima PKH, bantuan itu sangat membantu kami memenuhi kebutuhan anak. Dari situ kami jadi bisa menyusun rencana untuk masa depan, terutama bagaimana caranya meningkatkan ekonomi keluarga secara mandiri.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan keenam informan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dapat disimpulkan bahwa pada indikator *Plan* sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memandang PKH sebagai bantuan sementara yang membantu memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pendidikan anak. Meskipun sebagian informan belum memiliki perencanaan ekonomi jangka panjang yang matang karena fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, terdapat keinginan untuk mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial. Informan yang telah berhasil graduasi menunjukkan adanya perencanaan yang lebih jelas, ditandai dengan perubahan pola pikir dan upaya membangun sumber penghasilan secara mandiri. Dengan demikian, PKH berperan sebagai stimulus awal dalam mendorong kesadaran perencanaan ekonomi keluarga, meskipun tingkat kematangannya masih bervariasi.

4.3.2 Pattern

Pattern dalam Mintzberg 5P menekankan pada konsistensi pola tindakan atau perilaku organisasi yang terbentuk dari praktik kebijakan yang dilakukan secara berulang. Dalam konteks penelitian ini, indikator *Pattern* digunakan untuk melihat bagaimana pola pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang

dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam mendorong kemandirian KPM di Kecamatan Limboto Barat.

Pola ini tercermin dari rutinitas pembinaan, pendampingan, penyaluran bantuan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsistensi pola pelaksanaan menjadi indikator penting untuk menilai apakah PKH benar-benar diarahkan pada pemberdayaan atau hanya berfokus pada penyaluran bantuan semata. Dengan adanya pola yang jelas dan berkelanjutan, diharapkan KPM mampu mengalami perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas menuju kemandirian sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial / Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bapak “IN”, yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025, diperoleh informasi mengenai pola pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat.

Adapun pertanyaan pertama yang diajukan pada indikator *Pattern* yaitu “Pola pelaksanaan kegiatan apa yang selama ini paling sering dilakukan oleh bidang yang Bapak pimpin dalam mendukung kemandirian KPM PKH?” Informan menyampaikan:

> *“Pola pelaksanaan kegiatan yang paling sering dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat. Sosialisasi tersebut dilakukan baik atas inisiatif bidang terkait maupun atas permintaan pemerintah desa. Dalam kegiatan ini, saya sendiri sering terlibat langsung sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terlalu bergantung pada bantuan sosial, karena bantuan sosial bersifat sementara dan dapat dihentikan sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemerintah.”*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu “Dari pelaksanaan tersebut, bagaimana Bapak menilai pola kegiatan yang sudah berjalan selama ini?” Informan menyampaikan:

> *“Pola kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendorong kemandirian KPM. Dalam dua tahun terakhir, terdapat kebijakan dari Kementerian Sosial yang menginstruksikan pelaksanaan graduasi, baik secara mandiri maupun non-mandiri, bagi KPM yang dinilai sudah tidak layak menerima bantuan.”*

Informan menjelaskan bahwa edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi, pertemuan kelompok, dan kunjungan rumah mendorong KPM memahami regulasi dan tujuan PKH. Hal ini ditunjukkan dengan adanya KPM yang

secara sukarela mengundurkan diri dari kepesertaan PKH, serta pemanfaatan aplikasi Cek Bansos sebagai sarana kontrol ketepatan sasaran bantuan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pola pelaksanaan kegiatan PKH bersifat konsisten dan berulang dengan penekanan pada edukasi. Dalam perspektif teori Mintzberg, hal ini mencerminkan konsep *Pattern* sebagai pola tindakan berkelanjutan dalam mendorong kemandirian KPM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Teknis Dinas Sosial, Bapak "FSN", yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025 pukul 12.19 WITA, diperoleh informasi mengenai pola pelaksanaan kegiatan teknis dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat.

Adapun pertanyaan pertama yang diajukan pada indikator *Pattern* yaitu "Pola kegiatan teknis apa yang paling sering dilakukan setiap tahun?" Informan menyampaikan:

> *"Kegiatan teknis yang paling sering dilakukan setiap tahun adalah Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Melalui kegiatan ini, masyarakat dibekali pengetahuan dan keterampilan, di mana pendamping dan KPM belajar bersama, bukan dalam posisi menggurui. Contohnya pada materi pencegahan stunting, pendamping menyampaikan materi secara partisipatif agar mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat."*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu "Menurut Bapak, apakah ada pola keberhasilan atau hambatan yang sering muncul saat kegiatan berjalan?" Informan menyatakan:

> *"Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat pola keberhasilan yang ditandai dengan adanya graduasi, yaitu ketika keluarga penerima manfaat secara sadar mengundurkan diri dari program PKH atau bantuan sosial lainnya karena merasa sudah berada pada kategori sejahtera. Namun, hambatan yang sering dihadapi adalah pola pikir atau mindset sebagian KPM yang masih bergantung pada bantuan, karena belum memiliki kesadaran bahwa bantuan sosial bersifat sementara."*

Informan menegaskan bahwa peran pendamping sangat penting dalam mendorong perubahan pola pikir KPM melalui edukasi berkelanjutan, agar KPM memahami bahwa bantuan sosial bersifat sementara. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pola pelaksanaan kegiatan PKH pada tingkat teknis bersifat konsisten dan berulang. Dalam perspektif teori Mintzberg, hal ini mencerminkan konsep *Pattern* sebagai pola tindakan berkelanjutan untuk mendorong kemandirian KPM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Limboto Barat, Bapak "SHM", yang dilaksanakan pada

Selasa, 30 Desember 2025 pukul 10.59 WITA, diperoleh informasi mengenai pola pelaksanaan pendampingan serta kebiasaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan.

Adapun pertanyaan pertama yang diajukan pada indikator *Pattern* yaitu "Pola atau kebiasaan apa yang Bapak lihat dari KPM saat mengikuti pendampingan atau kegiatan pemberdayaan?"

Informan menyampaikan:

> *"Pola atau kebiasaan KPM dalam mengikuti pendampingan sangat beragam, karena setiap KPM memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda. Ada KPM yang aktif, mudah memahami materi, dan cepat merespons setiap penyampaian pendamping. Namun, ada juga KPM yang cenderung pasif dan membutuhkan pendekatan yang lebih intensif."*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu "Apakah ada hambatan atau keberhasilan yang sering muncul dan Bapak perhatikan?"

Informan menyatakan:

> *"Hambatan yang paling sering muncul dalam pelaksanaan PKH adalah terkait perubahan komponen bantuan, khususnya pada KPM yang memiliki anak usia sekolah. Ketika anak berpindah jenjang dari SD ke SMP, bantuan sering tidak dapat dicairkan karena data pendidikan di sistem Dapodik sekolah belum aktif atau belum sinkron dengan data di Kementerian Sosial."*
> Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan PKH lebih banyak bersifat administratif dan teknis, terutama terkait sinkronisasi data antar sistem. Dalam perspektif teori Mintzberg, kondisi ini mencerminkan konsep *Pattern*, di mana pola pelaksanaan program menunjukkan kecenderungan yang berulang, baik dalam bentuk partisipasi KPM maupun hambatan teknis yang sering terjadi selama pelaksanaan pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, yaitu Bapak "IAH", yang dilaksanakan pada Senin, 29 Desember 2025, pukul 11.18 WITA, diperoleh gambaran mengenai pola pemanfaatan bantuan PKH serta pola keberhasilan dan hambatan yang diamati desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di tingkat masyarakat.

Pertanyaan pertama pada indikator *Pattern* yaitu "Pola pemanfaatan bantuan PKH seperti apa yang paling sering terlihat di masyarakat?" Informan menjelaskan bahwa:

> *"Yang saya lihat di masyarakat, sebagian besar memang menggunakan bantuan PKH untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan anak. Tapi ada juga yang setelah menerima bantuan justru menjadi malas bekerja.*

Kadang kalau sudah dapat bantuan, semangat kerjanya jadi berkurang. Itu yang sering kami temui di lapangan."

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu "Apakah ada pola keberhasilan atau hambatan yang desa amati dari KPM?" Informan menyampaikan bahwa:

"Hambatan yang sering terjadi itu biasanya masalah administrasi, seperti saldo bantuan yang tidak masuk ke rekening. Kalau ada masalah begitu, biasanya mereka datang mengadu ke desa. Selain itu, ada juga penerima yang sebenarnya sudah bisa dikatakan mandiri, tapi dari pusat masih tercatat sebagai penerima PKH, padahal di desa sudah kami rapatkan dan menilai bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak lagi menerima bantuan."

Jawaban tersebut menunjukkan bahwa pola hambatan yang sering dihadapi KPM tidak hanya bersumber dari aspek perilaku, tetapi juga dari aspek administratif dan ketidaksinkronan data antara desa dan pusat. Meskipun desa telah melakukan penilaian terhadap kondisi sosial ekonomi KPM, dalam praktiknya masih terdapat KPM yang dinilai telah mandiri namun belum terakomodasi dalam pembaruan data program. Dalam perspektif teori Mintzberg, kondisi ini mencerminkan *Pattern*, yaitu pola tindakan dan kejadian yang berulang dalam pelaksanaan strategi PKH di tingkat desa, baik dalam pemanfaatan bantuan maupun dalam hambatan administratif yang dihadapi.

Peneliti selanjutnya masih melihat perspektif masyarakat sebagai penerima langsung Program Keluarga Harapan (PKH) pada indikator *Pattern,* untuk mengetahui pola pemanfaatan bantuan serta perubahan kebiasaan keluarga setelah mengikuti pendampingan PKH. Wawancara dilakukan dengan informan yang sama, yaitu "LD", pada Senin, 29 Desember 2025 pukul 11.00 WITA.

Pertanyaan pertama yang diajukan yaitu "Biasanya bantuan PKH digunakan untuk apa saja dalam kehidupan sehari-hari?" Informan menyampaikan bahwa:

"Selama menerima PKH, bantuan itu saya gunakan khusus untuk kebutuhan sekolah anak-anak, seperti perlengkapan sekolah dan kebutuhan pendidikan lainnya. Saya tidak menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan lain di luar pendidikan."

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu "Sejak ikut pendampingan PKH, apakah ada perubahan kebiasaan atau perilaku di keluarga?" Informan menyampaikan bahwa:

"Sejak ikut kegiatan PKH, ada perubahan dalam cara saya mengatur keluarga, terutama dalam mendidik anak dan mengelola masalah rumah tangga. Dari pendampingan, saya banyak belajar tentang peran orang tua,

cara menghadapi masalah, dan bagaimana menjadi keluarga yang lebih mandiri."

Selanjutnya, informan kedua yaitu Ibu "H", selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2019 hingga 2026, pada hari Senin, 29 Desember 2025 pukul 13.00 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

"Setiap kali PKH cair, bantuan tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sekolah anak, seperti perlengkapan sekolah dan keperluan pendidikan lainnya. Saya berusaha menggunakan bantuan itu sesuai peruntukannya dan tidak untuk kebutuhan lain."

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

"Setelah ikut pendampingan PKH, ada perubahan dalam kebiasaan saya, terutama dalam mengatur keuangan keluarga. Saya jadi lebih memahami mana kebutuhan yang harus diprioritaskan dan lebih terbiasa mengikuti arahan dari pendamping."

Kemudian masih berkaitan dengan pertanyaan yang sama, informan ketiga yaitu Ibu "MD", selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2024 hingga saat ini (2025), pada hari Senin, 29 Desember 2025 pukul 14.00 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

"Bantuan PKH yang saya terima biasanya saya gunakan untuk kebutuhan anak sekolah, seperti perlengkapan sekolah. Selain itu, sebagian juga digunakan untuk sembako, tetapi tetap lebih difokuskan pada kebutuhan pendidikan anak."

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

"Setelah ikut PKH, saya merasakan perubahan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang sekarang lebih terbantu. Saya juga menjadi lebih disiplin karena setiap bulan ada pendataan, pengecekan kehadiran anak di sekolah, serta keaktifan dalam kegiatan posyandu dan pertemuan PKH."

Selanjutnya, masih pada pertanyaan yang sama, informan keempat yaitu Bapak "SM", selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2022 hingga saat ini (2025), yang diwawancarai pada hari Senin, 29 Desember 2025 pukul 14.30 WITA, menyampaikan tanggapannya pada pertanyaan pertama sebagai berikut:

"Bantuan PKH yang saya terima biasanya saya gunakan untuk biaya anak sekolah. Selain itu, jika memang belum ada pemasukan, uang PKH juga saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras, daging, atau ayam. Namun, saya tetap mengutamakan kebutuhan anak terlebih dahulu."

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

"Sejak ikut PKH, ada perubahan yang saya rasakan, terutama dari segi ekonomi. Saya sekarang bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti membeli beras dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Saya juga menjadi

lebih aktif mengikuti kegiatan karena setiap bulan ada pertemuan, edukasi, dan arahan dari pendamping."

Kemudian masih berkaitan dengan pertanyaan yang sama, informan kelima yaitu Ibu "D", selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 hingga saat ini (2026), pada hari Senin, 12 Desember 2025 pukul 14.34 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

"Uang PKH saya gunakan terutama untuk kebutuhan anak sekolah. Jika ada sisa, saya gunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras dan kebutuhan makan keluarga."

Pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

"Sejak ikut pendampingan PKH, saya menjadi lebih rutin mengikuti kegiatan dan lebih memahami tentang pengasuhan anak serta pengelolaan keluarga. Saya juga menjadi lebih disiplin karena setiap kegiatan ada absensi".

Selanjutnya, sebagai informan keenam sekaligus informan terakhir, Ibu "SN", selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 yang berhasil graduasi atau mandiri pada tahun 2022, pada hari Senin, 12 Januari 2026 pukul 14.50 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

"Selama menerima PKH, bantuan tersebut kami gunakan sesuai peruntukannya, terutama untuk kebutuhan pendidikan anak. Kami berusaha disiplin supaya bantuan itu benar-benar bermanfaat."

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

"Seiring ikut pendampingan PKH, kebiasaan di keluarga juga mulai berubah. Kami jadi lebih terbiasa mengatur keuangan dan tidak lagi mengandalkan bantuan sepenuhnya."

Hasil wawancara dengan enam informan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), menunjukan bahwa pada indikator *Pattern* terdapat pola pemanfaatan bantuan yang relatif konsisten, yaitu bantuan PKH digunakan terutama untuk kebutuhan pendidikan anak, seperti perlengkapan sekolah dan biaya penunjang pendidikan. Pada kondisi tertentu, sebagian informan juga memanfaatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti pangan, dengan tetap memprioritaskan kebutuhan anak.

Selain itu, pendampingan PKH mendorong perubahan kebiasaan dan perilaku keluarga penerima manfaat, terutama dalam pengelolaan keuangan, pengasuhan anak, kedisiplinan, serta keaktifan mengikuti kegiatan dan arahan pendamping. Informan yang telah graduasi menunjukkan pola perilaku yang lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan. Dengan demikian, pada indikator *Pattern*, PKH tidak hanya membentuk pola pemanfaatan bantuan yang terarah,

tetapi juga berkontribusi pada perubahan kebiasaan keluarga menuju kemandirian secara bertahap.

4.3.3 *Position*

Position dalam pendekatan Mintzberg 5P berkaitan dengan bagaimana organisasi menempatkan program atau kebijakannya dalam lingkungan eksternal, termasuk hubungan dengan masyarakat, pemangku kepentingan, dan program lain yang sejenis. Dalam penelitian ini, indikator *Position* digunakan untuk menganalisis bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo memposisikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Limboto Barat.

Posisi PKH tidak hanya sebagai program bantuan tunai, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial yang terintegrasi dengan program pemberdayaan lainnya. Penempatan posisi yang tepat memungkinkan PKH berperan sebagai jembatan bagi KPM untuk mengakses peluang peningkatan kapasitas, baik melalui pendidikan, kesehatan, maupun kegiatan ekonomi produktif, sehingga tujuan kemandirian dapat tercapai secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial / Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bapak “IN”, yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025 pukul 11.04 WITA, diperoleh informasi mengenai posisi strategis bidang dalam koordinasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial di Kecamatan Limboto Barat.

Adapun pertanyaan pertama yang diajukan pada indikator *Position* yaitu “Menurut Bapak, bagaimana posisi bidang yang Bapak pimpin dalam koordinasi dengan unit lain atau pihak terkait dalam pelaksanaan PKH dan bantuan sosial?” Informan menyampaikan:

> *“Bidang yang saya pimpin memiliki peran strategis sebagai fungsi koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan PKH dan bantuan sosial. Koordinasi dilakukan dengan koordinator PKH, pendamping lapangan, serta pihak perbankan sebagai penyalur bantuan. Secara umum koordinasi berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala terkait keterlambatan akses data dari bank penyalur.”*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu “Jika dibandingkan dengan stakeholder lain, kontribusi apa yang menunjukkan peran strategis bidang Bapak dalam pemberdayaan dan perlindungan KPM PKH?”

Informan menyatakan:

"Kontribusi strategis bidang ini terlihat dari keterlibatan langsung saya dalam menangani permasalahan yang terjadi di lapangan. Setiap temuan atau permasalahan yang membutuhkan pembenahan akan segera ditindaklanjuti melalui penekanan dan arahan kepada koordinator maupun pendamping PKH agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa posisi strategis bidang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat operasional dan pengendalian. Dalam perspektif teori Mintzberg, kondisi ini mencerminkan konsep *Position*, di mana organisasi menempatkan diri secara strategis dalam jaringan pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan dan program berjalan sesuai tujuan, khususnya dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Teknis Dinas Sosial, Bapak "FSN", yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025 pukul 12.19 WITA, diperoleh informasi mengenai posisi strategis unit teknis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya pada aspek pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Adapun pertanyaan pertama yang diajukan pada indikator *Position* yaitu "Bagaimana posisi unit teknis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program PKH, terutama bagian pemberdayaan?" Informan menyampaikan:

"Unit teknis Dinas Sosial menempati posisi sebagai pengawas sekaligus pelaksana lapangan dalam mendukung pemberdayaan KPM PKH. Kami memastikan kegiatan pemberdayaan, seperti P2K2 dan pendampingan, berjalan sesuai dengan arahan program. Apabila terdapat permasalahan yang masih dapat ditangani di tingkat teknis, kami langsung menindaklanjutinya tanpa harus menunggu intervensi dinas, sehingga pelaksanaan program tetap berjalan efektif dan tidak terhambat."

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu "Bagaimana hubungan kerja antara unit teknis dan pendamping sosial dalam menjalankan kegiatan?" Informan menyatakan:

"Hubungan kerja antara unit teknis dan pendamping sosial berjalan dengan baik. Kami terlibat dan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, perbankan, serta unit kerja kesehatan dan fasilitas kesehatan. Harmonisasi antar pihak tersebut berjalan dengan baik karena masing-masing saling membutuhkan dalam mendukung pelaksanaan PKH."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa posisi unit teknis berada dalam jaringan kerja lintas sektor yang terintegrasi. Dalam perspektif teori Mintzberg, kondisi ini mencerminkan konsep *Position*, di mana unit teknis menempatkan diri secara strategis sebagai penghubung antara kebijakan, pelaksana lapangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan, khususnya dalam mendorong pemberdayaan KPM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping PKH Kecamatan Limboto Barat, Bapak "SHM", yang dilaksanakan pada Selasa, 30 Desember 2025 pukul 10.59 WITA, diperoleh gambaran mengenai posisi strategis pendamping dalam memengaruhi motivasi, perubahan perilaku, serta keberhasilan program pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pertanyaan pertama pada indikator *Position* yaitu "Menurut Bapak, bagaimana posisi pendamping dalam memengaruhi motivasi dan perubahan perilaku KPM?" Informan menjelaskan bahwa:

> *"Pendamping berada pada posisi yang sangat dekat dengan KPM karena kami berinteraksi langsung dan rutin. Melalui pembaruan data secara berkala serta pendampingan dalam pertemuan kelompok, kami tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan pemahaman tentang kewajiban KPM dan tujuan PKH. Dari proses tersebut, motivasi KPM perlahan terbentuk dan perilaku mereka mulai berubah, terutama dalam kepatuhan terhadap aturan dan kesadaran bahwa bantuan ini bersifat sementara."*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu "Seberapa besar peran pendamping dalam keberhasilan program pemberdayaan PKH menurut Bapak?" Informan menyampaikan bahwa:

> *"Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada peran pendamping. Kami terlibat langsung dalam penyaluran bantuan, pelaksanaan pertemuan kelompok, serta penyelesaian kendala teknis seperti KKS tidak aktif atau data KPM bermasalah. Jika pendamping tidak aktif, maka bantuan bisa tertunda dan kegiatan pemberdayaan tidak berjalan optimal."*

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pendamping memiliki peran kunci dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan program pemberdayaan PKH. Dalam perspektif teori Mintzberg, kondisi ini mencerminkan konsep *Position*, di mana pendamping PKH menempati posisi strategis sebagai penghubung utama antara kebijakan program dan pelaksanaan di lapangan, sekaligus sebagai penentu keberhasilan pencapaian tujuan pemberdayaan dan kemandirian KPM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Bapak “IAH”, yang dilaksanakan pada Senin, 29 Desember 2025 pukul 11.18 WITA, diperoleh gambaran mengenai posisi dan peran desa dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya dalam mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pertanyaan pertama pada indikator *Position* yaitu “Menurut Bapak, bagaimana posisi desa dalam mendukung pelaksanaan program PKH?” Informan menjelaskan bahwa:

> *“Kami sebagai aparat desa itu posisinya lebih sebagai pendukung dan penghubung. Kami tidak bisa menentukan siapa yang menerima atau tidak menerima PKH karena itu kewenangan pusat. Tapi kalau ada masyarakat yang mengadu atau mengalami masalah, kami tetap membantu, mengarahkan, dan menyampaikan ke pendamping PKH atau pihak terkait.”*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu “Sejauh mana desa merasa memiliki tanggung jawab terhadap kemandirian KPM?” Informan menyampaikan bahwa:

> *“Kami merasa punya tanggung jawab untuk mendorong masyarakat supaya bisa mandiri. Tugas kami bukan hanya mengurus administrasi, tapi juga memberikan motivasi dan nasihat agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan. Kami selalu menyampaikan bahwa PKH itu sifatnya sementara, jadi masyarakat harus berusaha meningkatkan kehidupan ekonominya sendiri.”*

Jawaban tersebut menegaskan bahwa desa memandang kemandirian KPM sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial aparat desa. Dalam perspektif teori Mintzberg, kondisi ini mencerminkan konsep *Position*, di mana desa menempatkan diri sebagai pihak yang berfungsi mendukung dan memperkuat pelaksanaan strategi PKH melalui peran motivasional, pendampingan sosial, serta penyampaian nilai bahwa bantuan sosial bersifat sementara dan bertujuan mendorong peningkatan kesejahteraan secara mandiri.

Peneliti selanjutnya melihat perspektif masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak langsung dari pelaksanaan program, khususnya dalam upaya peningkatan kondisi ekonomi keluarga. Pada indikator *Position*, untuk mengetahui sejauh mana peran dan sikap informan dalam mengikuti program. Wawancara dilakukan dengan “LD”, Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Sejak tahun 2015, pada Senin, 29 Desember 2025 pukul 11.00 WITA.

Pertanyaan pertama yang diajukan yaitu “Menurut anda, anda berada di posisi seperti apa dalam program PKH lebih pasif atau ingin berkembang?” Informan menyampaikan bahwa:

> *“Saya merasa berada pada posisi ingin berkembang. Walaupun menerima PKH, saya tidak ingin hanya bergantung pada bantuan tersebut, sehingga saya tetap bekerja dan mengikuti semua kegiatan PKH dengan aktif karena itu juga menjadi kewajiban bagi penerima.”*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu “Bagaimana peran PKH dalam membantu keluarga mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik?” Informan menyampaikan bahwa:

> *“PKH berperan sebagai bantuan tambahan yang sangat membantu ekonomi keluarga, terutama di bidang pendidikan. Namun bagi saya, PKH bukan sumber utama penghasilan, melainkan dukungan sementara sambil tetap berusaha meningkatkan ekonomi keluarga melalui pekerjaan.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PKH diposisikan sebagai dukungan pendukung, sementara upaya utama peningkatan ekonomi tetap berasal dari usaha keluarga sendiri.

Selanjutnya, informan kedua yaitu Ibu “H”, selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2019 hingga 2026, pada hari Senin, 29 Desember 2025 pukul 13.00 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

> *“Saya merasa berada di posisi ingin berkembang. Saya mengikuti semua kegiatan PKH yang diwajibkan karena saya sadar PKH bukan hanya bantuan uang, tetapi juga pembinaan agar penerima bisa mandiri.”*

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

> *“Peran PKH bagi keluarga saya adalah sebagai bantuan pendukung, bukan sumber utama ekonomi. PKH membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak sehingga kondisi ekonomi keluarga lebih terbantu.”*

Kemudian masih berkaitan dengan pertanyaan yang sama, informan ketiga yaitu Ibu “MD”, selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2024 hingga saat ini (2025), pada hari Senin, 29 Desember 2025 pukul 14.00 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

> *“Saya merasa berada pada posisi mengikuti dan berusaha berkembang. Saya selalu hadir dalam kegiatan PKH karena memang diwajibkan dan ada absensi yang dicek setiap bulan oleh pendamping.”*

Menanggapi pertanyaan kedua, informan mengatakan bahwa:

> *“PKH sangat berperan dalam membantu kondisi ekonomi keluarga saya. Dengan adanya bantuan ini, saya tidak terlalu kesulitan lagi memenuhi kebutuhan anak, terutama untuk sekolah, sehingga kondisi ekonomi keluarga menjadi lebih stabil.”*

Selanjutnya, masih pada pertanyaan yang sama, informan keempat yaitu Bapak “SM”, selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2022 hingga saat ini (2025), yang diwawancarai pada hari Senin, 29 Desember 2025 pukul 14.30 WITA, menyampaikan tanggapannya pada pertanyaan pertama sebagai berikut:

> *“Saya merasa berada di posisi ingin berkembang, karena saya selalu hadir dalam setiap kegiatan PKH dan mengikuti arahan dari pendamping. Pendamping juga pernah datang langsung ke rumah untuk mendata dan mengecek kondisi keluarga.”*

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

> *“PKH sangat berperan dalam membantu ekonomi keluarga saya. Bahkan jika dibandingkan dengan penghasilan saya saat ini, uang bantuan PKH masih lebih besar. Karena itu, PKH menjadi penopang utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun saya sadar bahwa kondisi ini belum bisa disebut mandiri.”*

Kemudian masih berkaitan dengan pertanyaan yang sama, informan kelima yaitu Ibu “D”, selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 hingga saat ini (2026), pada hari Senin, 12 Desember 2025 pukul 14.34 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

> *“Saya berada pada posisi mengikuti dan ingin berkembang. Saya selalu ikut kegiatan pendampingan karena itu wajib, dan pendamping juga pernah turun langsung ke rumah untuk mendata kondisi keluarga.”*

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

> *“PKH sangat membantu ekonomi keluarga saya, terutama untuk kebutuhan anak sekolah. Namun saya menyadari bahwa PKH hanya bantuan, bukan sumber penghasilan utama.”*

Selanjutnya, sebagai informan keenam sekaligus informan terakhir, Ibu “SN”, selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 yang berhasil graduasi atau mandiri pada tahun 2022, pada hari Senin, 12 Januari 2026 pukul 14.50 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

> *“Dalam program PKH, saya melihat diri saya bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai keluarga yang ingin berkembang. Saya berusaha mengikuti arahan pendamping agar suatu saat bisa keluar dari program.”*

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

> *“Bagi kami, PKH itu seperti penopang di masa sulit. Bantuan tersebut membantu kami bertahan sampai akhirnya kami bisa memperbaiki kondisi ekonomi sendiri.”*

Pada indikator *Position*, hasil wawancara denngan ke enam informan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan bahwa sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memposisikan diri sebagai pihak yang ingin

berkembang dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini tercermin dari keaktifan informan dalam mengikuti kegiatan pendampingan serta kesadaran bahwa PKH tidak hanya berupa bantuan tunai, tetapi juga sarana pembinaan menuju kemandirian ekonomi.

PKH umumnya dipandang sebagai bantuan pendukung yang membantu memenuhi kebutuhan keluarga, terutama pendidikan anak. Namun demikian, terdapat perbedaan tingkat ketergantungan, di mana sebagian keluarga masih menjadikan PKH sebagai penopang utama ekonomi, sementara keluarga yang telah graduasi menunjukkan posisi yang lebih mandiri. Dengan demikian, pada indikator *Position*, PKH berperan sebagai dukungan sementara yang mendorong perubahan sikap penerima dari sekadar penerima bantuan menuju keluarga yang berorientasi pada kemandirian.

4.3.4 *Perspective*

Perspective dalam Mintzberg 5P menggambarkan cara pandang, nilai, dan budaya organisasi dalam memahami serta menjalankan suatu kebijakan atau program. Dalam penelitian ini, indikator *Perspective* digunakan untuk melihat bagaimana cara pandang Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo terhadap Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya dalam memaknai kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Cara pandang ini tercermin dari komitmen organisasi untuk menjadikan PKH tidak sekadar sebagai program bantuan sosial, tetapi sebagai sarana perubahan sosial yang mendorong kemandirian dan pengurangan ketergantungan. Perspektif yang berorientasi pada pemberdayaan akan memengaruhi sikap aparatur, pendamping PKH, serta pendekatan yang digunakan dalam membina KPM. Dengan perspektif yang tepat, implementasi PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial / Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bapak “IN”, yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025 pukul 11.04 WITA, diperoleh gambaran mengenai nilai, prinsip, dan cara pandang yang menjadi dasar dalam memaknai pemberdayaan serta kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Pertanyaan pertama pada indikator *Perspective* yaitu “Nilai atau prinsip apa yang menjadi pegangan Bapak dalam memaknai pemberdayaan dan kemandirian KPM PKH?” Informan menyampaikan:

> *“Prinsip utama yang kami pegang adalah perubahan pola pikir atau mindset KPM. Banyak KPM yang masih menganggap bantuan sosial sebagai penghasilan tetap, bahkan seolah bisa diterima terus-menerus. Karena itu, sebelum bicara kemandirian, yang harus diubah terlebih dahulu adalah cara pandang mereka terhadap bantuan sosial.”*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu “Bagaimana Bapak memandang perubahan sikap dan perilaku KPM dari yang awalnya bergantung menjadi lebih mandiri?” Informan menjawab:

> *“Perubahan itu tidak bisa instan, tetapi melalui proses sosialisasi dan edukasi yang terus dilakukan. Pendamping dibekali pemahaman regulasi supaya bisa menjelaskan kepada KPM bahwa graduasi adalah kebijakan pemerintah, bukan kemauan pribadi. Kalau KPM sudah paham aturannya, biasanya sikap dan perilakunya perlahan berubah.”*

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perubahan perilaku KPM dipandang sebagai proses bertahap yang harus didukung dengan pendekatan edukatif dan berbasis regulasi. Dalam perspektif teori Mintzberg, kondisi ini mencerminkan konsep Perspective, yaitu cara pandang bersama yang menjadi landasan strategi organisasi dalam membentuk sikap, perilaku, dan orientasi kemandirian KPM PKH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Teknis Dinas Sosial, Bapak “FSN”, yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025 pukul 12.19 WITA, diperoleh gambaran mengenai cara pandang unit teknis dalam memaknai pemberdayaan serta menilai kesiapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH).

Pertanyaan pertama pada indikator *Perspective* yaitu “Prinsip atau cara pandang apa yang menjadi dasar unit teknis dalam menyusun kebijakan pemberdayaan?”

Informan menyampaikan:

> *”pemberdayaan dipandang sebagai proses pembelajaran dan pembentukan kesadaran KPM secara bertahap. Kami menekankan pendekatan partisipatif, di mana KPM tidak hanya menerima arahan, tetapi dilibatkan secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan. Melalui pendekatan tersebut, KPM diharapkan mampu memahami tujuan program serta menyadari bahwa bantuan sosial bersifat sementara dan ditujukan untuk mendorong kemandirian keluarga”*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu “Bagaimana Bapak menilai kesiapan KPM untuk mengikuti program pemberdayaan?”

Informan menyampaikan bahwa:

> *“Dari yang saya lihat, KPM sangat antusias untuk mengikuti program pemberdayaan, karena salah satunya merupakan kegiatan yang bersifat wajib dan setiap KPM harus hadir.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KPM dinilai memiliki kesiapan yang cukup baik dalam mengikuti program pemberdayaan. Tingkat kehadiran dan antusiasme KPM menjadi modal awal bagi unit teknis dan pendamping untuk menanamkan pemahaman serta membangun kesadaran KPM terhadap tujuan pemberdayaan.

Dalam *perspektif* teori Mintzberg, kondisi ini mencerminkan konsep Perspective, yaitu cara pandang bersama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan strategi organisasi. Unit teknis memaknai pemberdayaan sebagai proses pembelajaran berkelanjutan yang bertujuan membentuk kesadaran, kepatuhan, dan kesiapan KPM menuju kemandirian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping PKH Kecamatan Limboto Barat, Bapak “SHM”, yang dilaksanakan pada Selasa, 30 Desember 2025 pukul 10.59 WITA, diperoleh gambaran mengenai cara pandang pendamping dalam menilai kemampuan, potensi, serta peluang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk berkembang menuju kemandirian.

Pertanyaan pertama pada indikator *Perspective* yaitu “Bagaimana Bapak melihat kemampuan KPM untuk berkembang menjadi mandiri berdasarkan pengalaman sehari-hari?”

Informan menyampaikan:

> *“Kemampuan KPM untuk menjadi mandiri sangat bergantung pada kondisi sosial dan ekonomi masing-masing keluarga. Setiap KPM memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Berdasarkan pengalaman pendampingan, ada KPM yang sudah mampu mandiri dan bersedia mengundurkan diri dari program PKH melalui mekanisme graduasi mandiri. Dalam satu tahun, sekitar sepuluh KPM melakukan graduasi mandiri karena kondisi sosial ekonominya sudah membaik.”*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu “Nilai atau keyakinan apa yang Bapak pegang dalam memahami karakter dan potensi KPM?”

Informan menyampaikan bahwa:

> *“Untuk mendorong kemandirian, kami melakukan penguatan materi melalui pertemuan kelompok dan juga kunjungan rumah (home visit). Dengan pendekatan tersebut, kami bisa memahami kondisi nyata KPM dan*

memberikan motivasi yang sesuai dengan kebutuhan serta situasi masing-masing keluarga."

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pendamping memegang keyakinan bahwa setiap KPM memiliki potensi untuk berkembang apabila didampingi dengan pendekatan yang tepat dan personal. Dalam perspektif teori Mintzberg, kondisi ini mencerminkan konsep *Perspective*, yaitu cara pandang pendamping sebagai pelaksana lapangan yang memahami pemberdayaan sebagai proses bertahap, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan potensi KPM menuju kemandirian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Bapak "IAH", yang dilaksanakan pada Senin, 29 Desember 2025 pukul 11.18 WITA, diperoleh gambaran mengenai cara pandang desa terhadap potensi kemandirian serta nilai sosial yang memengaruhi perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Pertanyaan pertama pada indikator Perspective yaitu "Bagaimana pandangan desa terhadap potensi KPM untuk mandiri?" Informan menjelaskan bahwa:

"Kalau menurut saya, sebenarnya masyarakat itu punya potensi untuk mandiri. Rata-rata mereka petani, jadi kalau dikelola dengan baik, mereka bisa meningkatkan pendapatan. Tapi semua itu tergantung dari kemauan mereka sendiri. Kalau mereka mau bekerja dan berusaha, tentu bisa mandiri."

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu "Nilai sosial apa yang menurut desa memengaruhi perilaku KPM?" Informan menyampaikan bahwa:

"Nilai yang paling memengaruhi itu rasa ketergantungan. Ada masyarakat yang sudah merasa nyaman dengan bantuan, sehingga jadi enggan bekerja. Ini yang kami lihat dan kami coba ubah melalui motivasi dan dorongan supaya mereka kembali semangat bekerja dan tidak hanya menunggu bantuan."

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ketergantungan terhadap bantuan sosial menjadi nilai sosial yang memengaruhi perilaku KPM. Oleh karena itu, desa berupaya membangun cara pandang baru melalui motivasi dan dorongan agar KPM memiliki kesadaran untuk bekerja dan tidak terus bergantung pada bantuan PKH.

Peneliti selanjutnya melihat perspektif masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak langsung dari pelaksanaan program, khususnya Pada indikator *Perspective*. Wawancara dilakukan dengan ibu "LD", Penerima Program Keluarga

Harapan (PKH) Sejak tahun 2015, pada Senin, 29 Desember 2025 pukul 11.00 WITA.

Pertanyaan pertama yang diajukan yaitu “Bagaimana pandangan anda tentang kemampuan keluarga untuk mandiri suatu hari nanti?” Informan menyampaikan bahwa:

> *“Saya yakin keluarga saya bisa mandiri. Terbukti saat PKH dihentikan karena anak-anak sudah lulus sekolah dan saya dikategorikan mandiri, saya tidak merasa berat karena sejak awal saya sudah menyiapkan diri untuk tidak terus bergantung pada bantuan.”*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu “Nilai atau keyakinan apa yang membuat anda berusaha memanfaatkan PKH dengan baik?” Informan menyampaikan bahwa:

> *“Saya berpegang pada keyakinan bahwa bantuan PKH itu hanya sementara dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Oleh karena itu, saya gunakan bantuan tersebut sesuai peruntukannya dan tetap bekerja supaya kehidupan keluarga bisa terus berjalan dengan baik.”*

Selanjutnya, informan kedua yaitu Ibu “H”, selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2019 hingga 2026, pada hari Senin, 29 Desember 2025 pukul 13.00 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

> *“Saya yakin keluarga saya bisa mandiri. Dari pendampingan PKH kami selalu diingatkan bahwa penerima akan dievaluasi setiap tahun, sehingga itu menjadi motivasi untuk terus berusaha.”*

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

> *“Saya meyakini PKH itu hanya sementara, sehingga harus dimanfaatkan dengan baik sesuai peruntukannya sambil tetap berusaha agar tidak terus bergantung pada bantuan.”*

Kemudian masih berkaitan dengan pertanyaan yang sama, informan ketiga yaitu Ibu “MD”, selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2024 hingga saat ini (2025), pada hari Senin, 29 Desember 2025 pukul 14.00 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

> *“Saya yakin suatu hari keluarga saya bisa mandiri. Walaupun saat ini masih menerima PKH, saya berharap ke depan tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga sendiri melalui pekerjaan yang saya lakukan.”*

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

> *“Saya meyakini bahwa PKH adalah bantuan sementara dan harus digunakan sesuai peruntukannya. Karena itu, saya berusaha memanfaatkan bantuan ini sebaik mungkin untuk kebutuhan anak, terutama pendidikan dan kesehatan.”*

Selanjutnya, masih pada pertanyaan yang sama, informan keempat yaitu Bapak “SM”, selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2022 hingga saat ini (2025), yang diwawancarai pada hari Senin, 29 Desember 2025 pukul 14.30 WITA, menyampaikan tanggapannya pada pertanyaan pertama sebagai berikut:

> *“Dengan jujur saya mengatakan bahwa sampai saat ini saya belum merasa mandiri. Kondisi ekonomi masih sulit, kebutuhan anak banyak, dan saya memiliki tiga orang anak. Namun, saya tetap berharap suatu hari nanti bisa mandiri jika mendapatkan pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang cukup.”*

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

> *“Saya meyakini bahwa PKH bersifat sementara dan bukan untuk selamanya. Pendamping juga sering menyampaikan bahwa semua kembali pada kemauan diri sendiri. Karena itu, saya berusaha memanfaatkan PKH sebaik mungkin sambil tetap berusaha agar suatu saat bisa mandiri.”*

Kemudian masih berkaitan dengan pertanyaan yang sama, informan kelima yaitu Ibu “D”, selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 hingga saat ini (2026), pada hari Senin, 12 Desember 2025 pukul 14.34 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

> *“Saya menyadari bahwa sampai saat ini keluarga saya belum bisa dikatakan mandiri karena kondisi ekonomi masih lemah dan masih ada tanggungan anak sekolah. Namun saya tetap yakin suatu hari nanti bisa mandiri.”*

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

> *“Saya percaya bahwa PKH bukan bantuan jangka panjang. Karena itu saya berusaha memanfaatkan PKH sebaik mungkin sesuai peruntukannya, sambil tetap berusaha agar ke depan bisa hidup mandiri.”*

Selanjutnya, sebagai informan keenam sekaligus informan terakhir, Ibu “SN”, selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 yang berhasil graduasi atau mandiri pada tahun 2022, pada hari Senin, 12 Januari 2026 pukul 14.50 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

> *“Menurut saya, kemandirian itu bisa dicapai kalau ada kemauan dan usaha. Pengalaman kami membuktikan bahwa bantuan hanya sementara, tetapi usaha yang menentukan.”*

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

> *“Saya selalu berpikir bahwa PKH bukan untuk selamanya. Karena itu, bantuan yang diterima kami manfaatkan sebaik mungkin sambil tetap berusaha mandiri.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam informan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dapat disimpulkan bahwa pada

indikator *Perspective,* menunjukkan adanya keyakinan yang relatif kuat bahwa kemandirian ekonomi keluarga dapat dicapai, meskipun dengan kondisi dan waktu yang berbeda-beda. Sebagian informan merasa telah siap dan membuktikan kemandirian setelah keluar dari program, sementara informan lain mengakui belum sepenuhnya mandiri karena keterbatasan ekonomi, namun tetap memiliki harapan dan motivasi untuk mencapainya di masa depan.

Secara umum, PKH dipersepsikan sebagai bantuan yang bersifat sementara dan bukan untuk jangka panjang. Nilai dan keyakinan tersebut mendorong keluarga penerima manfaat untuk menggunakan bantuan sesuai peruntukannya, terutama bagi pendidikan dan kesehatan anak, sambil tetap berusaha meningkatkan kemampuan ekonomi secara mandiri. Dengan demikian, pada indikator Perspective, PKH turut membentuk cara pandang penerima terhadap pentingnya usaha, kemandirian, dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

4.3.5 *Ploy*

Ploy dalam pendekatan Mintzberg 5P merujuk pada strategi atau langkah taktis yang dirancang secara khusus untuk mengantisipasi tantangan, hambatan, maupun dinamika yang muncul dalam pelaksanaan suatu program. Dalam penelitian ini, indikator *Ploy* digunakan untuk melihat bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, khususnya Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, merumuskan strategi tertentu guna mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), terutama yang berkaitan dengan rendahnya tingkat kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Strategi tersebut dapat berupa pendekatan persuasif kepada KPM, penguatan peran pendamping PKH, hingga penyesuaian mekanisme pembinaan dan pengawasan. *Ploy* menjadi penting karena keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam merespons situasi lapangan secara adaptif agar tujuan pemberdayaan dan pengurangan ketergantungan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial / Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**,**

Bapak **"**IN"**,** yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025 pukul 11.04 WITA**,** diperoleh gambaran mengenai langkah-langkah taktis yang diambil dalam menghadapi hambatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial.

Pertanyaan pertama pada indikator *Ploy* yaitu "Ketika kegiatan pemberdayaan atau bantuan sosial menghadapi hambatan, langkah cepat apa yang biasanya Bapak ambil sebagai Kepala Bidang?"

Informan menyampaikan:

> *"Langkah cepat yang kami ambil adalah menginstruksikan pendamping untuk segera melakukan koordinasi. Jika hambatan terjadi pada proses transaksi bantuan, pendamping diarahkan untuk mendampingi KPM ke bank penyalur. Apabila kendala disebabkan oleh kesalahan data, kami berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perbaikan data serta pembaruan melalui sistem yang tersedia."*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu "Jika KPM menunjukkan kurangnya minat atau resistensi terhadap kegiatan, pendekatan apa yang biasanya Bapak/Ibu arahkan kepada pelaksana di lapangan?"

Informan menyampaikan bahwa:

> *"Pendekatan yang digunakan adalah penguatan regulasi. Kehadiran dalam pertemuan P2K2 merupakan kewajiban, dengan ketentuan adanya perwakilan anggota keluarga apabila KPM berhalangan hadir. Jika ketentuan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan sanksi hingga pemberhentian dari program atau graduasi."*

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penguatan regulasi digunakan sebagai langkah taktis untuk menumbuhkan kedisiplinan dan kepatuhan KPM terhadap ketentuan program. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memastikan bahwa bantuan sosial dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kemandirian KPM.

Dalam perspektif teori Mintzberg, kondisi ini mencerminkan konsep *Ploy*, yaitu manuver atau langkah taktis yang digunakan pimpinan untuk mengatasi hambatan dan resistensi dalam pelaksanaan strategi, sehingga tujuan Program Keluarga Harapan dapat tetap tercapai secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Teknis Dinas Sosial, Bapak "FSN", yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025 pukul 12.19 WITA, diperoleh gambaran mengenai langkah-langkah taktis yang dilakukan unit teknis dalam menghadapi kendala pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH),

khususnya pada kegiatan pemberdayaan dan pendampingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pertanyaan pertama pada indikator *Ploy* yaitu “Jika terjadi kendala teknis dalam kegiatan, apa langkah yang biasanya Bapak/Ibu lakukan?” Informan menyampaikan:

> *“Dalam pelaksanaan kegiatan, kami berpedoman pada petunjuk teknis atau juknis yang telah ditetapkan. Juknis itu menjadi acuan utama dalam menyelesaikan kendala teknis yang muncul di lapangan.”*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu “Bagaimana strategi penyesuaian kegiatan dilakukan ketika ada masalah mendadak?” Informan menyampaikan:

> *“dalam kondisi tertentu, penyesuaian kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat urgensi dan jenis permasalahan yang dihadapi. Apabila masalah masih dapat ditangani di tingkat teknis, kami bersama pendamping segera melakukan penyesuaian di lapangan tanpa menunda pelaksanaan kegiatan. Namun, jika permasalahan memerlukan koordinasi lintas instansi, maka kami akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar kegiatan tetap dapat berjalan meskipun dengan penyesuaian waktu atau mekanisme pelaksanaan.”*

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa unit teknis memiliki fleksibilitas dalam mengambil langkah taktis untuk menjaga keberlangsungan kegiatan PKH. Dalam perspektif teori Mintzberg, kondisi ini mencerminkan konsep *Ploy*, yaitu langkah-langkah taktis yang digunakan organisasi untuk merespons situasi tidak terduga, mengatasi hambatan teknis, serta memastikan strategi program tetap berjalan efektif sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping PKH Kecamatan Limboto Barat, Bapak “SHM”, yang dilaksanakan pada Selasa, 30 Desember 2025 pukul 10.59 WITA, diperoleh gambaran mengenai langkah-langkah taktis yang dilakukan pendamping dalam menghadapi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menunjukkan kurangnya respons atau partisipasi dalam kegiatan pendampingan dan pemberdayaan.

Pertanyaan pertama pada indikator *Ploy* yaitu “Jika KPM tidak menunjukkan respons positif, pendekatan apa yang biasanya Bapak lakukan?” Informan menjawab:

> *“Jika KPM tidak menunjukkan respons positif, kami melakukan kunjungan rumah atau home visit untuk melihat langsung kondisi sosial ekonomi keluarga. Kami menggali informasi terkait kondisi ekonomi, jumlah tanggungan, dan keadaan anggota keluarga lainnya.”*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu *"*Bagaimana cara Bapak menghadapi KPM yang enggan mengikuti kegiatan pemberdayaan?" Informan menyampaikan bahwa:

> *"Dalam PKH ada aturan yang mewajibkan KPM mengikuti pertemuan kelompok. Namun, biasanya KPM yang tidak hadir memiliki alasan tertentu, seperti pekerjaan, kondisi kesehatan, atau sudah menyampaikan izin sebelumnya. Untuk KPM yang memang tidak berkomitmen dan tidak bisa mengikuti aturan program secara berkelanjutan, mereka dapat memilih untuk mengundurkan diri dari PKH, terutama jika berada di luar daerah dan tidak memungkinkan mengikuti pertemuan secara rutin."*

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pendamping mengedepankan pendekatan persuasif dan pemahaman kondisi KPM, namun tetap berpegang pada aturan program sebagai langkah pengendalian. Dalam perspektif teori Mintzberg, kondisi ini mencerminkan konsep *Ploy*, yaitu langkah taktis yang digunakan pendamping untuk mengatasi resistensi, menjaga kedisiplinan program, serta memastikan kegiatan pemberdayaan tetap berjalan sesuai tujuan Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Bapak "IAH", yang dilaksanakan pada Senin, 29 Desember 2025 pukul 11.18 WITA, diperoleh gambaran mengenai langkah taktis desa dalam merespons kendala yang dihadapi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta strategi desa dalam menjaga partisipasi KPM dalam kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pertanyaan pertama pada indikator *Ploy* yaitu "Jika KPM mengalami kendala dalam kegiatan, apa yang biasanya desa lakukan untuk membantu?" Informan menyampaikan bahwa:

> *"Kalau ada KPM yang mengalami kendala, biasanya mereka datang ke desa. Kami memberikan penjelasan, membantu mengarahkan, dan menyampaikan ke bagian kesejahteraan rakyat atau ke pendamping PKH supaya masalahnya bisa ditindaklanjuti. Kami juga berusaha menjelaskan kondisi sebenarnya kepada masyarakat supaya mereka paham."*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu "Apa strategi desa agar KPM tetap mengikuti kegiatan pemberdayaan?" Informan menyampaikan:

> *"Strategi kami itu lebih ke pendekatan persuasif. Kami memberikan dorongan dan motivasi agar mereka tetap ikut kegiatan. Selain itu, karena kegiatan PKH memang diwajibkan, masyarakat biasanya tetap hadir. Kami terus mengingatkan bahwa kegiatan itu tujuannya supaya mereka bisa mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya."*

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa strategi taktis desa dalam menjaga partisipasi KPM dilakukan melalui pendekatan persuasif dan motivasional. Dengan menekankan tujuan jangka panjang program, yaitu kemandirian dan peningkatan kualitas hidup, desa berupaya membangun kesadaran KPM agar tetap mengikuti kegiatan pemberdayaan secara berkelanjutan. Dalam perspektif teori Mintzberg, kondisi ini mencerminkan konsep *Ploy*, yaitu langkah-langkah taktis yang digunakan untuk mengatasi hambatan dan memastikan tujuan program tetap tercapai

Peneliti kemudian melihat langkah-langkah taktis yang dilakukan informan pertama dalam menghadapi kesulitan ekonomi melalui indikator *Ploy*. Wawancara dilakukan dengan Ibu ‘LD”, Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2015 pada Senin, 29 Desember 2025 pukul 11.00 WITA.

Pertanyaan pertama yang diajukan yaitu “Kalau menghadapi kesulitan ekonomi, apa biasanya yang keluarga lakukan?” Informan menyampaikan bahwa:

> *“Kalau menghadapi kesulitan ekonomi, saya lebih memilih untuk meningkatkan usaha dan bekerja lebih giat. Saya tidak langsung bergantung pada bantuan, karena sejak awal saya menanamkan pada diri sendiri bahwa bantuan itu hanya penunjang.”*

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang diajukan yaitu “Ketika usaha atau kegiatan ekonomi keluarga terhambat, langkah apa yang paling sering keluarga ambil?” Informan menyampaikan bahwa:

> *“Jika kegiatan ekonomi terhambat, saya biasanya mencari cara lain untuk tetap bekerja dan menyesuaikan pengeluaran keluarga. Selain itu, pengalaman dan pembelajaran dari kegiatan PKH juga membantu saya lebih kuat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan memiliki strategi adaptif dalam menghadapi hambatan ekonomi, dengan memanfaatkan pengalaman pendampingan PKH sebagai bekal menghadapi kondisi sulit.

Selanjutnya, informan kedua yaitu Ibu “H”, selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2019 hingga 2026, pada hari Senin, 29 Desember 2025 pukul 13.00 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

> *“Kalau menghadapi kesulitan ekonomi, saya berusaha menyesuaikan pengeluaran keluarga dan mengutamakan kebutuhan yang paling penting, terutama kebutuhan anak sekolah.”*

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

"Jika ada hambatan, saya biasanya berkomunikasi dengan pendamping dan tetap berusaha mengatur keuangan sebaik mungkin agar tidak bermasalah dalam program PKH."

Kemudian masih berkaitan dengan pertanyaan yang sama, informan ketiga yaitu Ibu "MD", selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2024 hingga saat ini (2025), pada hari Senin, 29 Desember 2025 pukul 14.00 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

"Kalau menghadapi kesulitan ekonomi, saya mengandalkan PKH untuk membantu memenuhi kebutuhan utama keluarga, terutama kebutuhan anak. Selain itu, saya juga menyesuaikan pengeluaran agar tidak melebihi kemampuan."

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

"Jika ada kendala, saya tetap mengikuti arahan pendamping PKH dan berusaha aktif dalam kegiatan yang diwajibkan. Saya juga memastikan anak tetap sekolah dan mengikuti posyandu karena jika tidak aktif bisa dikenakan sanksi hingga pemberhentian PKH."

Selanjutnya, masih pada pertanyaan yang sama, informan keempat yaitu Bapak "SM", selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2022 hingga saat ini (2025), yang diwawancarai pada hari Senin, 29 Desember 2025 pukul 14.30 WITA, menyampaikan tanggapannya pada pertanyaan pertama sebagai berikut:

"Jika menghadapi kesulitan ekonomi, satu-satunya harapan saya dan keluarga saat ini adalah bantuan PKH. Karena penghasilan saya belum tetap dan belum cukup menutupi kebutuhan keluarga, PKH sangat membantu dalam kondisi tersebut."

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

"Ketika ekonomi terhambat, saya tetap mengikuti arahan dan motivasi dari pendamping PKH. Walaupun saya merasa saat ini masih sangat sulit untuk meningkatkan ekonomi, saya tetap berusaha dan berharap suatu saat bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik agar tidak terus bergantung pada PKH."

Kemudian masih berkaitan dengan pertanyaan yang sama, informan kelima yaitu Ibu 'D", selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 hingga saat ini (2026), pada hari Senin, 12 Desember 2025 pukul 14.34 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

"Jika menghadapi kesulitan ekonomi, saya mengandalkan bantuan PKH untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, terutama kebutuhan anak-anak."

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

"Saat kondisi ekonomi terhambat, saya tetap mengikuti arahan dan pendampingan dari pendamping PKH. Saya juga terus berusaha mencari

cara agar ke depan bisa meningkatkan ekonomi keluarga dan tidak terus berharap pada PKH."

Selanjutnya, sebagai informan keenam sekaligus informan terakhir, Ibu "SN", selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 yang berhasil graduasi atau mandiri pada tahun 2022, pada hari Senin, 12 Januari 2026 pukul 14.50 WITA, menanggapi pertanyaan pertama sebagai berikut:

"Kalau menghadapi kesulitan ekonomi, dulu kami mengandalkan PKH sambil mencari tambahan penghasilan. Sekarang, setelah mandiri, kami lebih mengandalkan usaha yang sudah kami jalani."

Menanggapi pertanyaan kedua, informan menyampaikan bahwa:

"Saat usaha sempat terhambat, kami memilih untuk bertahan dan mencari cara lain, misalnya dengan menghemat pengeluaran dan mencari peluang kerja tambahan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke enam Penerima Program Kleuarga Harapan (PKH) Pola tindakan informan menunjukkan adanya strategi taktis yang beragam dalam menghadapi kesulitan ekonomi, seperti meningkatkan usaha, menyesuaikan pengeluaran, dan mencari sumber penghasilan alternatif. Dalam kondisi tertentu, PKH dimanfaatkan sebagai penopang sementara untuk memenuhi kebutuhan utama keluarga, terutama kebutuhan anak. Pendampingan PKH juga menjadi rujukan penting melalui arahan dan motivasi. Informan yang telah graduasi cenderung lebih mandiri, sementara penerima aktif masih memadukan bantuan PKH dengan upaya adaptif. Dengan demikian, pada indikator *Ploy*, PKH berperan sebagai penyangga sekaligus pemicu dalam menghadapi tekanan ekonomi.

4.4 Pembahasan

Dalam penelitian ini, fokus utama pembahasan diarahkan pada strategi intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam mendorong transformasi kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat. Adapun permasalahan yang menjadi perhatian utama meliputi: (1) masih tingginya fenomena ketergantungan (*dependency*) di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) meskipun program telah berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama**,** serta (2) strategi intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian dijadikan dasar oleh peneliti

dalam merumuskan fokus dan pertanyaan penelitian yang mengacu pada teori strategi yang dikemukakan oleh Mintzberg melalui konsep *5P Strategy*. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana strategi intervensi disusun, dijalankan, dan diarahkan oleh Dinas Sosial dalam pelaksanaan PKH, serta sejauh mana strategi tersebut mampu mengurangi ketergantungan dan membangun kemandirian KPM di Kecamatan Limboto Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi intervensi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam mendorong transformasi kemandirian penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat dengan menggunakan lima indikator utama, yaitu *Plan, Pattern, Position, Perspective, dan Ploy*. Kelima indikator tersebut akan dibahas secara sistematis dan mendalam pada bagian pembahasan berikutnya, berdasarkan hasil temuan penelitian yang diperoleh di lapangan.

4.4.1 *Plan*

Dalam penelitian ini, indikator *Plan* dimaknai sebagai kemampuan organisasi dalam menyusun perencanaan strategis secara sadar, terarah, dan sistematis sebelum melaksanakan kebijakan atau program. Sejalan dengan pandangan George R. Terry, perencanaan *(planning)* merupakan fungsi manajemen yang paling awal dan fundamental, yang mencakup proses penetapan tujuan serta penentuan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dipahami sebagai tindakan sadar dan rasional yang menjadi dasar bagi pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi agar berjalan secara terarah dan efektif. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), perencanaan tidak hanya dipahami sebagai penyusunan agenda kegiatan tahunan, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk mengarahkan program agar tidak sekadar berorientasi pada penyaluran bantuan, melainkan mampu mendorong perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Limboto Barat telah disusun melalui mekanisme formal yang melibatkan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dan para pemangku kepentingan terkait. Perencanaan dilakukan pada awal tahun anggaran melalui rapat koordinasi yang membahas agenda kegiatan selama satu tahun, termasuk strategi sosialisasi, edukasi, serta pendampingan kepada KPM. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan PKH telah dilakukan secara terstruktur dan terencana,

sejalan dengan konsep *Plan* dalam teori Mintzberg yang menekankan perencanaan sebagai tindakan sadar untuk mencapai tujuan organisasi.

Selain itu, perencanaan yang disusun Dinas Sosial juga berlandaskan pada kerangka regulatif dan normatif, khususnya amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1). Pendekatan ini menunjukkan bahwa perencanaan PKH tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki orientasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dorongan kepada pendamping PKH untuk melakukan kunjungan rumah *(home visit)* dan melaporkan masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan mencerminkan upaya perencanaan yang bersifat proaktif dan inklusif.

Berdasarkan hasil wawancara pada tingkat teknis, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan pemberdayaan masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan arahan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Penentuan prioritas kegiatan lebih menitikberatkan pada kepatuhan terhadap jadwal dan target waktu yang telah ditetapkan, sehingga ruang fleksibilitas daerah dalam mengembangkan strategi pemberdayaan yang kontekstual masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan PKH di tingkat daerah lebih berfungsi sebagai instrumen implementasi kebijakan pusat dibandingkan sebagai ruang inovasi strategis. Kondisi tersebut selaras dengan pandangan John M. Bryson yang menekankan bahwa perencanaan strategis dalam organisasi sektor publik pada umumnya sangat dipengaruhi oleh mandat regulatif, kebijakan pemerintah pusat, serta tuntutan kepatuhan administratif. Bryson menjelaskan bahwa dalam konteks pemerintahan, perencanaan sering kali berfungsi sebagai mekanisme implementasi kebijakan yang telah ditetapkan secara hierarkis, sehingga ruang fleksibilitas dan inovasi strategis di tingkat lokal menjadi terbatas. Hal ini menjelaskan mengapa perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat daerah cenderung bersifat top-down dan berorientasi pada pencapaian target yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Di tingkat pendampingan, perencanaan dilakukan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan secara rutin. Pembentukan kelompok KPM berdasarkan kedekatan wilayah, usia, dan kondisi sosial ekonomi menunjukkan bahwa perencanaan pendampingan tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis program, tetapi juga aspek sosial dan

psikologis KPM. Hal ini memperlihatkan adanya upaya menciptakan lingkungan pendampingan yang partisipatif dan suportif sebagai bagian dari strategi perencanaan menuju kemandirian.

Sementara itu, perencanaan yang dilakukan pemerintah desa dalam mendukung KPM PKH bersifat realistis dan adaptif terhadap keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Dukungan desa lebih difokuskan pada pemberian motivasi, dorongan kerja, serta pemanfaatan potensi lokal, seperti pertanian dan usaha kecil. Dalam perspektif Mintzberg, kondisi ini mencerminkan perencanaan yang menyesuaikan tujuan pemberdayaan dengan kapasitas dan kondisi riil di tingkat lokal.

Dari sisi Keluarga Penerima Manfaat, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar KPM memandang PKH sebagai bantuan sementara yang membantu memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pendidikan anak. Meskipun belum seluruh KPM memiliki perencanaan ekonomi jangka panjang yang matang, terdapat kesadaran untuk tidak terus bergantung pada bantuan sosial. KPM yang telah berhasil graduasi menunjukkan perencanaan yang lebih jelas, ditandai dengan perubahan pola pikir serta upaya membangun sumber penghasilan secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa PKH berperan sebagai stimulus awal dalam membangun kesadaran perencanaan ekonomi keluarga.

Dengan demikian, indikator *Plan* dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Limboto Barat dapat dinilai telah berjalan dengan cukup baik. Perencanaan PKH telah disusun secara terstruktur dan berjenjang, mulai dari tingkat Dinas Sosial, pendamping, pemerintah desa, hingga Keluarga Penerima Manfaat. Namun, perencanaan tersebut masih cenderung bersifat top-down karena sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat, sehingga ruang inovasi daerah dalam mengembangkan strategi pemberdayaan yang kontekstual masih terbatas. Selain itu, perbedaan kapasitas dan kondisi ekonomi KPM menyebabkan tidak seluruh perencanaan dapat diterjemahkan secara optimal menjadi tindakan nyata menuju kemandirian.

4.4.2 *Pattern*

Dalam penelitian ini, indikator *Pattern* dimaknai sebagai konsistensi pola tindakan dan perilaku yang terbentuk dari praktik pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan secara berulang dan berkelanjutan. Pola tersebut mencerminkan bagaimana strategi yang telah direncanakan benar-benar

diwujudkan dalam praktik, serta sejauh mana pelaksanaan program diarahkan pada upaya pemberdayaan dan pengurangan ketergantungan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurut Mintzberg, strategi sebagai Pattern dipahami sebagai konsistensi pola tindakan yang terbentuk dari perilaku organisasi yang dilakukan secara berulang dari waktu ke waktu. Strategi tidak hanya tercermin dari rencana yang tertulis, tetapi juga dari praktik nyata yang terus dilakukan dan menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, indikator Pattern menekankan bagaimana strategi benar-benar diwujudkan melalui pola pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan dalam praktik di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, pola pelaksanaan PKH di Kecamatan Limboto Barat menunjukkan adanya konsistensi kegiatan yang berfokus pada sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta monitoring terhadap KPM. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat, baik melalui pertemuan kelompok maupun kunjungan langsung ke desa. Pola ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diarahkan pada pembentukan pemahaman KPM mengenai tujuan program dan sifat bantuan sosial yang bersifat sementara.

Pola pelaksanaan tersebut sejalan dengan pandangan B. Guy Peters yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada dasarnya dibentuk oleh rutinitas organisasi yang berlangsung secara berulang dan konsisten. Rutinitas tersebut berperan penting dalam membentuk pola perilaku pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran, sehingga keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh konsistensi praktik yang dijalankan di lapangan. Dalam konteks PKH, rutinitas sosialisasi, edukasi, dan pendampingan menjadi mekanisme utama dalam membentuk pemahaman dan perilaku KPM.

Pola pelaksanaan tersebut diperkuat dengan adanya kebijakan graduasi yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir, baik secara mandiri maupun non-mandiri. Kebijakan ini menjadi bagian dari pola strategis yang berulang dalam pelaksanaan PKH, di mana KPM yang dinilai telah mampu secara ekonomi diarahkan untuk keluar dari kepesertaan program. Temuan adanya KPM yang secara sukarela mengundurkan diri dari PKH menunjukkan bahwa pola edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan mulai membentuk kesadaran sebagian penerima manfaat untuk tidak bergantung pada bantuan sosial.

Pada tingkat teknis, pola pelaksanaan PKH tercermin dari konsistensi kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan secara rutin. Melalui kegiatan ini, pendamping dan KPM terlibat dalam proses pembelajaran bersama yang bersifat partisipatif. Pola pendampingan ini menunjukkan bahwa PKH tidak hanya membentuk rutinitas kegiatan, tetapi juga menciptakan ruang interaksi yang mendorong perubahan pola pikir, khususnya terkait pengasuhan anak, pengelolaan keuangan, dan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya pola hambatan yang muncul secara berulang dalam pelaksanaan PKH. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan aspek administratif dan teknis, seperti ketidaksinkronan data pendidikan anak dalam sistem Dapodik yang berdampak pada keterlambatan pencairan bantuan. Pola hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan program telah berjalan secara konsisten, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sistem pendukung dan koordinasi antarinstansi.

Di tingkat desa, pola pelaksanaan PKH memperlihatkan adanya kecenderungan pemanfaatan bantuan yang relatif seragam, yaitu untuk kebutuhan pendidikan anak dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Namun, desa juga mengamati adanya pola perilaku sebagian KPM yang cenderung bergantung pada bantuan, yang ditandai dengan menurunnya motivasi kerja setelah bantuan diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola pelaksanaan PKH belum sepenuhnya menghasilkan perubahan perilaku yang merata di seluruh KPM.

Dari perspektif KPM, hasil penelitian menunjukkan adanya pola pemanfaatan bantuan yang cukup konsisten, di mana bantuan PKH digunakan sesuai peruntukannya, terutama untuk pendidikan anak. Selain itu, pendampingan PKH juga membentuk pola kebiasaan baru dalam keluarga, seperti meningkatnya kedisiplinan, kemampuan mengatur keuangan, serta keaktifan mengikuti kegiatan pendampingan. KPM yang telah berhasil graduasi menunjukkan pola perilaku yang lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial, yang menandakan keberhasilan pola pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, indikator *Pattern* dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Limboto Barat dapat dinilai telah berjalan secara cukup

konsisten, khususnya dalam pola edukasi dan pendampingan KPM. Pola pelaksanaan yang berulang melalui kegiatan sosialisasi, P2K2, dan pendampingan rutin telah membentuk kebiasaan dan perilaku positif pada sebagian KPM, terutama dalam pemanfaatan bantuan dan pengelolaan kebutuhan keluarga. Namun, pola pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berorientasi pada pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, karena masih ditemukan hambatan administratif serta kecenderungan ketergantungan pada sebagian KPM. Hal ini menunjukkan bahwa pola pelaksanaan PKH telah berjalan, tetapi efektivitasnya dalam mendorong kemandirian ekonomi secara merata masih perlu diperkuat

4.4.3 *Position*

Dalam pendekatan Mintzberg 5P, *Position* dipahami sebagai cara organisasi menempatkan kebijakan atau programnya dalam lingkungan eksternal, termasuk relasi dengan pemangku kepentingan dan persepsi masyarakat terhadap program tersebut. Dalam konteks penelitian ini, indikator Position digunakan untuk menganalisis bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo memposisikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen perlindungan sosial yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Limboto Barat.

Berdasarkan hasil penelitian, PKH diposisikan oleh Dinas Sosial sebagai program strategis yang berada pada simpul koordinasi lintas aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping sosial, hingga pemerintah desa. Posisi ini menempatkan Dinas Sosial tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai pengendali dan pengawas pelaksanaan program di lapangan. Keterlibatan aktif pimpinan bidang dalam menangani permasalahan serta memberikan arahan kepada koordinator dan pendamping menunjukkan bahwa posisi strategis tersebut bersifat operasional dan responsif terhadap dinamika lapangan.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori pemangku kepentingan (Stakeholder Theory) yang dikemukakan oleh R. Edward Freeman, yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengelola hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping

sosial, pemerintah desa, serta masyarakat penerima manfaat merupakan aktor-aktor kunci yang memiliki peran dan kepentingan berbeda dalam pelaksanaan PKH. Oleh karena itu, posisi Dinas Sosial sebagai koordinator dan penghubung antaraktor menjadi krusial dalam memastikan tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Pada tingkat teknis, unit teknis Dinas Sosial menempati posisi sebagai penghubung antara kebijakan dan implementasi. Unit ini berperan memastikan bahwa kegiatan pemberdayaan, seperti pendampingan dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), berjalan sesuai dengan tujuan program. Posisi unit teknis yang berada dalam jaringan kerja lintas sektor melibatkan perbankan, fasilitas kesehatan, dan institusi pendidikan menunjukkan bahwa PKH diposisikan sebagai program yang terintegrasi dengan layanan sosial lainnya, bukan berdiri sendiri sebagai bantuan tunai semata.

Pendamping PKH menempati posisi yang sangat strategis dalam struktur pelaksanaan program karena berinteraksi langsung dan intens dengan KPM. Posisi pendamping sebagai perantara antara kebijakan dan masyarakat menjadikan mereka aktor kunci dalam membentuk persepsi, motivasi, dan perubahan perilaku KPM. Melalui pendampingan rutin, pembaruan data, serta pengawasan kepatuhan KPM terhadap kewajiban program, pendamping berperan penting dalam menanamkan pemahaman bahwa PKH bersifat sementara dan bertujuan mendorong kemandirian.

Di tingkat desa, PKH diposisikan sebagai program yang didukung dan diperkuat melalui peran sosial aparat desa. Meskipun desa tidak memiliki kewenangan dalam penentuan penerima manfaat, desa tetap memosisikan diri sebagai penghubung antara masyarakat dan pendamping, serta sebagai pihak yang memberikan motivasi dan dorongan moral kepada KPM agar tidak bergantung secara berkelanjutan pada bantuan sosial. Posisi ini memperlihatkan bahwa PKH dipahami sebagai tanggung jawab bersama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif KPM, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat memposisikan diri bukan sekadar sebagai penerima bantuan pasif, tetapi sebagai pihak yang ingin berkembang. PKH dipandang sebagai bantuan pendukung yang membantu memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pendidikan anak, sementara upaya peningkatan ekonomi keluarga tetap

diusahakan secara mandiri melalui pekerjaan atau aktivitas ekonomi lainnya. Namun demikian, terdapat perbedaan posisi di antara KPM, di mana sebagian masih menjadikan PKH sebagai penopang utama ekonomi keluarga, sedangkan KPM yang telah berhasil graduasi menunjukkan posisi yang lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan.

Dengan demikian, indikator *Position* menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan di Kecamatan Limboto Barat telah diposisikan sebagai instrumen perlindungan sosial yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai bantuan sementara sekaligus sarana pembinaan menuju kemandirian. Dinas Sosial menempati posisi strategis sebagai pengendali dan penghubung antaraktor, sementara pendamping dan pemerintah desa berperan sebagai perantara langsung dengan KPM. Namun, posisi strategis tersebut belum sepenuhnya diperkuat melalui integrasi program pemberdayaan ekonomi lintas sektor, sehingga dalam praktiknya PKH masih lebih dominan dipersepsikan sebagai bantuan sosial. Kondisi ini menyebabkan upaya pengurangan ketergantungan belum berjalan secara merata pada seluruh KPM

4.4.4 *Perspective*

Dalam pendekatan Mintzberg 5P, *Perspective* merujuk pada cara pandang, nilai, dan kerangka berpikir bersama yang menjadi dasar organisasi dalam merumuskan dan menjalankan strategi. Dalam penelitian ini, indikator Perspective digunakan untuk menganalisis bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo memaknai Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya dalam memahami konsep pemberdayaan dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Limboto Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial memandang PKH bukan sekadar sebagai program bantuan sosial, tetapi sebagai instrumen perubahan sosial yang bertujuan membentuk kemandirian penerima manfaat secara bertahap. Cara pandang ini berangkat dari keyakinan bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan PKH bukan hanya keterbatasan ekonomi, tetapi juga pola pikir ketergantungan yang berkembang di kalangan sebagian KPM. Oleh karena itu, perubahan mindset diposisikan sebagai prasyarat utama sebelum kemandirian ekonomi dapat dicapai.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann, yang menyatakan bahwa cara pandang, nilai, dan pemahaman individu maupun kelompok dibentuk melalui proses interaksi sosial

dan sosialisasi yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam perspektif Berger dan Luckmann, realitas sosial tidak bersifat alamiah, melainkan dikonstruksi melalui kebiasaan, komunikasi, dan pembelajaran sosial yang berulang. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), proses pendampingan, sosialisasi, serta pertemuan kelompok menjadi sarana utama dalam membentuk pemahaman KPM bahwa bantuan sosial bersifat sementara dan kemandirian merupakan tujuan yang harus dicapai secara bertahap.

Perspektif tersebut tercermin dalam pendekatan yang menekankan proses edukasi, sosialisasi regulasi, serta penanaman kesadaran bahwa bantuan sosial bersifat sementara. Perubahan perilaku KPM dipahami sebagai proses jangka panjang yang tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kemandirian tidak dipersepsikan sebagai kondisi yang muncul secara tiba-tiba, tetapi sebagai hasil dari proses pembelajaran sosial yang konsisten.

Pada tingkat teknis, unit teknis Dinas Sosial memaknai pemberdayaan sebagai proses pembelajaran partisipatif. KPM tidak hanya ditempatkan sebagai objek penerima kebijakan, tetapi dilibatkan secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan, seperti pertemuan kelompok dan pendampingan. Tingginya tingkat kehadiran dan partisipasi KPM dipandang sebagai modal awal untuk membangun kesadaran dan kesiapan menuju kemandirian, meskipun dalam praktiknya kehadiran tersebut juga dipengaruhi oleh sifat kegiatan yang wajib diikuti.

Pendamping PKH memiliki perspektif yang lebih kontekstual terhadap potensi kemandirian KPM. Pendamping memandang bahwa setiap keluarga memiliki kemampuan dan kecepatan yang berbeda dalam mencapai kemandirian, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masing-masing. Oleh karena itu, pendekatan personal melalui kunjungan rumah dan pendampingan intensif dipandang penting untuk menggali potensi serta memberikan motivasi yang sesuai dengan kebutuhan KPM. Perspektif ini menegaskan bahwa kemandirian tidak dapat diseragamkan, melainkan harus disesuaikan dengan realitas setiap keluarga.

Menurut Max Weber mengenai tindakan sosial, yang menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh makna subjektif, nilai, serta latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang dimiliki. Weber memandang bahwa setiap

individu menafsirkan realitas berdasarkan pengalaman dan kondisi sosialnya masing-masing, sehingga respons terhadap kebijakan tidak selalu seragam. Dalam pelaksanaan PKH, perbedaan perspektif antara KPM mencerminkan variasi makna subjektif yang mereka berikan terhadap bantuan sosial dan kemandirian, yang kemudian memengaruhi kecepatan serta kesiapan setiap keluarga dalam mencapai kemandirian.

Dari sudut pandang pemerintah desa, kemandirian KPM dipahami sebagai sesuatu yang mungkin dicapai, terutama karena sebagian besar masyarakat memiliki potensi ekonomi, seperti sektor pertanian. Namun, nilai sosial berupa rasa nyaman terhadap bantuan masih menjadi hambatan utama. Ketergantungan terhadap bantuan sosial dipandang sebagai tantangan kultural yang harus diubah melalui dorongan, motivasi, dan penanaman nilai kerja keras agar masyarakat tidak hanya menunggu bantuan, tetapi kembali aktif berusaha.

Sementara itu, dari perspektif KPM sebagai penerima manfaat, hasil penelitian menunjukkan adanya keyakinan yang relatif kuat bahwa kemandirian dapat dicapai, meskipun dalam waktu dan kondisi yang berbeda-beda. Sebagian KPM telah membuktikan kemandiriannya melalui mekanisme graduasi, sementara sebagian lainnya mengakui belum sepenuhnya mandiri karena keterbatasan ekonomi, namun tetap memiliki harapan dan motivasi untuk mencapainya. PKH secara umum dipersepsikan sebagai bantuan sementara yang harus dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk pendidikan dan kesehatan anak, sambil tetap berusaha meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.

Dengan demikian, indikator *Perspective* menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan di Kecamatan Limboto Barat telah membentuk cara pandang bersama bahwa bantuan sosial bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat. Nilai-nilai mengenai usaha, tanggung jawab, dan kesadaran bahwa bantuan bersifat sementara telah tertanam baik di tingkat organisasi, pendamping, pemerintah desa, maupun sebagian KPM. Namun, meskipun perspektif yang berkembang telah sejalan dengan tujuan pemberdayaan, perubahan cara pandang tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kapasitas ekonomi seluruh KPM. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan perspektif merupakan prasyarat penting, tetapi belum cukup tanpa dukungan strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih konkret dan berkelanjutan

4.4.5 *Ploy*

Dalam penelitian ini, *Ploy* merujuk pada strategi atau langkah taktis yang digunakan untuk menghadapi hambatan dan dinamika yang muncul dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Indikator Ploy digunakan untuk melihat bagaimana para pihak terkait, mulai dari Dinas Sosial, pendamping PKH, hingga keluarga penerima manfaat, merumuskan tindakan adaptif untuk mengatasi kendala, menjaga partisipasi, dan memastikan tujuan pemberdayaan tercapai. Strategi taktis ini penting karena keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh perencanaan program, tetapi juga oleh kemampuan untuk merespons masalah yang muncul secara fleksibel dan efektif. Pandangan ini sejalan dengan konsep manajemen adaptif *(adaptive management)* yang menekankan bahwa organisasi publik harus mampu menyesuaikan tindakan dan strategi secara dinamis dalam menghadapi ketidakpastian dan perubahan kondisi lapangan, sehingga kebijakan tetap berjalan efektif meskipun dihadapkan pada berbagai kendala implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial / Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bapak Imran Napu, S.ST., M.Si., diperoleh gambaran bahwa langkah taktis yang dilakukan meliputi koordinasi cepat dengan pendamping, penanganan kendala transaksi bantuan di bank, serta perbaikan data melalui kerja sama lintas instansi. Selain itu, penguatan regulasi terhadap KPM yang kurang patuh juga diterapkan untuk menumbuhkan disiplin, sekaligus memastikan bahwa bantuan sosial dimanfaatkan sesuai tujuan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa pimpinan memanfaatkan Ploy sebagai manuver strategis untuk menghadapi hambatan dan resistensi dalam pelaksanaan PKH.

Selanjutnya, wawancara dengan pejabat teknis Dinas Sosial, Bapak Fajar Sidic Napu, menegaskan adanya fleksibilitas dalam menyelesaikan masalah teknis di lapangan. Penyesuaian kegiatan dilakukan berdasarkan urgensi dan jenis masalah, baik secara mandiri di tingkat teknis maupun melalui koordinasi lintas instansi. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana unit teknis menerapkan langkah taktis ***(Ploy)*** agar kegiatan pemberdayaan tetap berjalan meski menghadapi kendala tak terduga.

Dari perspektif pendamping PKH, seperti Bapak Shayipul H. Moonti, strategi taktis diterapkan melalui kunjungan rumah (*home visit*), pemahaman kondisi sosial

ekonomi keluarga, dan penguatan motivasi KPM yang enggan berpartisipasi. Pendekatan persuasif ini tetap diimbangi dengan penegakan aturan program, sehingga kegiatan pemberdayaan berjalan sesuai tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa pendamping menggunakan *Ploy* untuk menyeimbangkan adaptasi lapangan dengan kepatuhan terhadap regulasi.

Pendekatan taktis serupa juga dilakukan oleh desa, seperti dijelaskan oleh Kepala Desa Yosonegoro, Bapak Isa Amir Hanapi. Desa memberikan arahan, penjelasan, dan motivasi agar KPM tetap mengikuti kegiatan, sekaligus memastikan masalah yang dialami KPM dapat ditindaklanjuti melalui pendampingan dan koordinasi dengan dinas terkait. Strategi persuasif dan motivasional ini menjadi bentuk *Ploy* yang diterapkan di tingkat lokal untuk menjaga keberlanjutan program.

Dari sisi penerima manfaat, wawancara dengan enam KPM menunjukkan adanya pola tindakan adaptif dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Informan aktif, seperti Ibu Lilis Desiu dan Ibu Herlina, memanfaatkan PKH sebagai penopang sementara sambil menyesuaikan pengeluaran, meningkatkan usaha, atau mencari sumber penghasilan tambahan. Sementara itu, informan yang telah graduasi, seperti Ibu Siti Napu, cenderung mengandalkan usaha mandiri dan strategi adaptif lain ketika menghadapi hambatan ekonomi. Pendampingan PKH menjadi rujukan penting dalam memberikan arahan dan motivasi, sehingga KPM dapat tetap produktif meskipun menghadapi kendala.

Dengan demikian, indikator *Ploy* dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Limboto Barat menunjukkan bahwa langkah-langkah taktis telah dilakukan oleh Dinas Sosial, pendamping PKH, pemerintah desa, dan KPM untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul di lapangan. Strategi seperti koordinasi cepat, perbaikan data, kunjungan rumah, serta pendekatan persuasif terbukti membantu menjaga partisipasi dan keberlanjutan program. Namun, langkah-langkah tersebut masih bersifat reaktif dan situasional, belum dirancang sebagai strategi khusus yang terencana untuk mempercepat kemandirian KPM yang pasif atau masih sangat bergantung pada bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator Ploy telah diterapkan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mendorong transformasi kemandirian secara berkelanjutan

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pendekatan Mintzberg 5P, strategi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat telah dilaksanakan secara terstruktur dan menunjukkan arah yang positif. Pada indikator *Plan*, perencanaan program telah disusun secara berjenjang dan diarahkan pada pemberdayaan serta kemandirian KPM, namun masih didominasi kebijakan pemerintah pusat sehingga fleksibilitas daerah dalam merancang strategi berbasis potensi lokal masih terbatas. Pada indikator *Pattern*, pelaksanaan PKH berjalan konsisten melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan monitoring yang membentuk kebiasaan positif pada sebagian KPM. Meskipun demikian, pola pelaksanaan masih belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi secara merata dan sebagian KPM masih menunjukkan ketergantungan terhadap bantuan. Indikator *Position* menunjukkan bahwa PKH diposisikan sebagai program strategis yang melibatkan berbagai aktor, namun integrasinya dengan program pemberdayaan ekonomi lintas sektor belum optimal sehingga persepsi PKH sebagai bantuan sosial masih cukup kuat. Selanjutnya, indikator *Perspective* memperlihatkan adanya perubahan cara pandang yang positif di tingkat organisasi, pelaksana, dan sebagian KPM bahwa PKH merupakan sarana pemberdayaan dan bukan tujuan akhir. Namun, perubahan perspektif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kapasitas ekonomi seluruh KPM. Sementara itu, indikator *Ploy* menunjukkan adanya langkah-langkah adaptif untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program, meskipun strategi tersebut masih bersifat reaktif dan belum dirancang secara khusus untuk mempercepat transformasi kemandirian. Secara keseluruhan, strategi PKH di Kecamatan Limboto Barat telah berkontribusi dalam membangun kesadaran dan perubahan perilaku KPM menuju kemandirian, namun masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kemandirian yang berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, diharapkan dapat memperkuat strategi pemberdayaan ekonomi KPM melalui peningkatan fleksibilitas kebijakan di tingkat daerah serta penguatan kerja sama lintas sektor, seperti dengan dinas ketenagakerjaan, UMKM, dan instansi terkait lainnya, agar proses kemandirian KPM dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
2. Pendamping PKH, diharapkan dapat mengembangkan pola pendampingan yang lebih variatif dan kontekstual, terutama bagi KPM yang masih pasif atau sangat bergantung pada bantuan, melalui pendekatan personal, pembinaan ekonomi keluarga, dan pendampingan yang lebih intensif.
3. Pemerintah desa dan instansi terkait, diharapkan dapat memperkuat koordinasi, komunikasi, dan monitoring dalam pelaksanaan PKH, serta mengoptimalkan potensi lokal desa sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi KPM.
4. Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diharapkan dapat memanfaatkan bantuan PKH sebagai penopang sementara dan terus berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi melalui usaha, pekerjaan, atau kegiatan produktif lainnya agar tidak bergantung secara berkelanjutan pada bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, A. A., Nurwati, R. N., & Mulyana, N. (2019). Intervensi Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal Di Daerah Transmigrasi Desa Topoyo. *Jurnal Public Policy*, *5*(2), 111. https://doi.org/10.35308/jpp.v5i2.1128

Albertus, R. (2024). *Ilmu Administrasi Publik_v.2.0_FULL ISBN_rev.pdf*.

Ani, J., Lumanauw, B., & Tampenawas, J. L. A. (2021). Pengaruh Citra Merek, Promosi, Dan. *663 Jurnal EMBA*, *9*(2), 663–674.

Ataza, P., Ronadia, Andreansyah, M., Safitri, S., & Syarifuddin. (2025). Membangun Kemandirian Remaja: Kunci Sukses dalam Karir. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *2*(4), 43–50.

Bakulu, B., Pangkey, M., & Kolondam, H. (2021). Efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, *7*(101), 18–28.

Deva Ilham Koirunnada, Eka Nadila Luis, Nabila Khoirunisa, & Liss Dyah Dewi A. (2024). Strategi Intervensi Sosial Mikro dalam Mengatasi Individu dengan Gangguan Bipolar. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan*, *2*(3), 74–87. https://doi.org/10.59841/jumkes.v2i3.1225

Endriani, A., Aswansyah, I., & Sanjaya, A. (2020). Pengaruh Bimbingan Sosial Terhadap Kemandirian. *Jurnal Visionary : Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, *5*(1). https://doi.org/10.33394/vis.v5i1.3118

Fadilah, S. N., & Himmawan, D. (2023). Desain Bimbingan Belajar yang Efektif untuk Kemandirian Belajar (Studi di MTs An-Nur Kota Cirebon dan SMP Muhammadiyah Cirebon). *Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *9*(2), 960–967. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.552

Gede Wirata, I Wayan Astawa, Sri Sulandari, I Nyoman Suargita, K. S. (2024). Administrasi Publik. In *Universitas Brawijaya* (Vol. 53, Issue 9).

Hakim, S. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, *6*(3), 58–69. http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/08/Sarifudin Hakim (08-13-18-11-23-47).pdf

Hasbullah. (2016). Menejemen Srtategi Mutu Terpadu Menejemen Strategi Dan

Mutu Terpadu Dalam Pendidikan. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *3*(1), 13–22.

Husna, A. N., & Wungu, E. (2018). Emotional Autonomy in Early Adolescents: Study at SMPN 1 Margaasih, Band- ung Regency. *Jurnal Psikologi Sains Dan Profesi*, *2*(3), 222–228.

Izza, N. N., Afifuddin, & Suyeno. (2021). Strategi Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu). *Jurnal Respon Publik*, *15*(5), 16–22.

Kholik, N. A. A. (2021). Pemberdayaan Santri dalam Public Relations Lembaga Ittihadul Muballighin (LIM) Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. *Etheses IAIN Kediri*, 13.

Mahmuddin. (2017). Transformasi Sosial. In *Tangerang: Lembaga Literasi Dayak*.

Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, *11*(1), 72–88.

Model, P., Untuk, P. L., & Kemandirian, M. (2018). *Wilda Mutya Sari,2018 PENERAPAN MODEL PROJECT-BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN ANAK Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu*. 1–5.

Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, *8*(2), 69–87.

Nur Aeda, & Riadul Jannah. (2022). Implementasi dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Economics and Business*, *8*(1), 165–186. https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.98

Nuraida, N. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, *1*(2), 148–165. https://doi.org/10.37950/paj.vi.741

Nurhayati, E. (2025). Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Mencapai Graduasi Mandiri Kpm Pkh Di Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. *Pekerjaan Sosial*, *23*(2). https://doi.org/10.31595/peksos.v23i2.1392

Oktober, N., Melayani, B., Provinsi, D. I., & Utara, M. (2022). *SENTRI : Jurnal Riset*

Ilmiah. *1*(2), 297–303.

Porter, M. E. (2024). *Bab Ii Landasan Teori*. https://kbbi.web.id/strategi,

Rachman, T. (2018). Strategi pengembangan pasar tradisonal. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 10–27.

Raidifi, E., & Emiyati, A. (2024). Transformasi Sosial oleh Generasi Z dalam Konteks Masyarakat Majemuk. *Proceeding National Conference of Christian Education and Theology*, *2*(2), 143–153. https://doi.org/10.46445/nccet.v2i2.961

RD Tiani. (2022). *BAB II LANDASAN TEORI A.pemberdayaan*. 1–23.

Rivaldi, M., Kusmawati, A., & Tohari, M. A. (2020). Intervensi sosial melalui terapi psikoreligius pada remaja penyalahgunaan narkoba. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Service*, *1*(2), 2721–6918.

Sana, W. (2023). *Analisis Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*. http://repository.uniks.ac.id/id/eprint/400/1/SANA WANI - Sana Wani.pdf

Setyawardani, D. T. R., Paat, C. J., & Lesawengen, L. (2020). Dampak Bantuan PKH terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Kebiijakan Publik*, *13*(2), 1–14.

Silviana, D., & Chilmy, N. W. (2024). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mencapai Graduasi Mandiri di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. *FORMULA Jurnal Administrasi Publik*, 133–143. https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/fml/article/view/3099%0Ahttps://ejurnal.uij.ac.id/index.php/fml/article/download/3099/2153

Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Suherman, E. A., Safira, S. S., Putri, K. R., Ramadhini, A. novi, Hendryan, T., & Supriyadi, T. (2025). Peran Strategi Intervensi Sosial Dalam Pendidikan Untuk Mengatasi Kenakalan Remaja. *Adiba: Journal of Education*, *5*(2), 321–330.

Susanti, A. S., Aini, D. N., & Fitriyah, N. S. (2024). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Tahun 2023 Di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. *Acton*, *20*(2), 40. https://doi.org/10.36841/acton.v20i2.6048

zuchri abdussamad. (2021). *Metode penelitian kualitatif*.

Lampiran 1. Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kab. Gorontalo pada tanggal 12 Juli 2004. Penulis yang biasa disapa Putri merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari bapak Irfan Amuntu dan Ibu Nurhayati Zees, dan memiliki seorang adik laki laki bernama Muhammad Rizki Amuntu. Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 8 Limboto (2010-2016). Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama, di SMP Negeri 1 Limboto Barat (2016-2019), dan melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas, di SMA Negeri 2 Limboto (2019-2022). Setelah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas, pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa Program Studi (S1) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Dalam masa perkuliahan, penulis melaksanakan kegiatan magang dan di tempatkan di Kantor Camat Kota Selatan Kab. Gorontalo dibagian Pelayanan. Selanjutnya, penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Dakwah (KKD) di Desa Sukamulya Kec. Wonosari selama 45 Hari. Pada tahun 2023-2024 penulis menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HIMADIK). Selain itu, Penulis juga merupakan Penerima Beasiswa Bank Indonesia atau GENBI Komisariat UMGO tahun 2023. Dan terakhir penulis merupakan kader dari organisasi kampus yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Strategi Intervensi Dinas Sosial Dalam Mendorong Transformasi Kemandirian Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Limboto Barat

---

Nama : Anatasia Putri Amuntu
NIM : D02422001
Fakultas : Ilmu Sosial

I. Pertanyaan untuk Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1) *Plan*
   a. Bagaimana langkah yang Dinas lakukan saat menyusun rencana untuk mendorong kemandirian KPM PKH di Limboto Barat?
   b. Apa saja hal penting yang biasanya dipertimbangkan Dinas ketika merancang kegiatan pemberdayaan bagi penerima PKH?
2) *Pattern*
   a. Selama ini, pola kegiatan pemberdayaan seperti apa yang paling sering dilakukan Dinas?
   b. Bagaimana Bapak/Ibu menilai pola kegiatan yang sudah berjalan? Apakah ada pola yang dinilai efektif atau kurang efektif?
3) *Position*
   a. Menurut Bapak/Ibu, di posisi mana Dinas Sosial berada dalam bekerja sama dengan lembaga lain untuk mendukung kemandirian KPM?
   b. Jika dibandingkan dengan stakeholder lain, kontribusi apa yang membuat posisi Dinas Sosial memiliki peran penting dalam pemberdayaan keluarga miskin?
4) *Perspective*
   a. Nilai atau prinsip apa yang Dinas pegang dalam memaknai kemandirian KPM PKH?
   b. Bagaimana Bapak/Ibu melihat perubahan sikap KPM dari yang awalnya pasif menjadi lebih mandiri?

5) *Ploy*

a. Jika ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, langkah cepat apa yang biasanya Dinas ambil?
b. Ketika KPM menunjukkan kurangnya minat atau penolakan, apa pendekatan yang biasanya digunakan?

II. Pertanyaan untuk Pendamping Sosia Program Keluarga Harapan (PKH)

1) *Plan*

a. Bagaimana Bapak/Ibu biasanya menyusun rencana pendampingan untuk membantu KPM lebih mandiri?
b. Apa saja hal yang Bapak/Ibu pertimbangkan sebelum menentukan pendekatan pendampingan?

2) *Pattern*

1. Dari pengalaman Bapak/Ibu, pola perilaku seperti apa yang paling sering muncul dari KPM selama pendampingan?
2. Apakah ada pola perkembangan atau kendala yang berulang selama proses pendampingan?

3) *Position*

a. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana posisi pendamping dalam memengaruhi motivasi dan perubahan perilaku KPM?
b. Seberapa besar peran pendamping dalam keberhasilan program pemberdayaan PKH?

4) *Perspective*

a. Bagaimana Bapak/Ibu melihat kemampuan KPM untuk berkembang menjadi mandiri berdasarkan pengalaman sehari-hari?
b. Nilai atau keyakinan apa yang Bapak/Ibu pegang dalam memahami karakter dan potensi KPM?

5) *Ploy*

a. Jika KPM tidak menunjukkan respons positif, pendekatan apa yang biasanya Bapak/Ibu lakukan?
b. Bagaimana cara Bapak/Ibu menghadapi KPM yang enggan mengikuti kegiatan pemberdayaan?

III. Pertanyaan untuk Kepala Seksi / Pejabat Teknis Dinas Sosial

1) *Plan*
   a. Bagaimana proses unit teknis menyusun rencana kegiatan pemberdayaan?
   b. Apa pertimbangan teknis utama dalam menentukan kegiatan mana yang perlu diprioritaskan?
2) *Pattern*
   a. kegiatan teknis apa yang paling sering dilakukan setiap tahun?
   b. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada pola keberhasilan atau hambatan yang sering muncul saat kegiatan berjalan?
3) *Position*
   a. Bagaimana posisi unit teknis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program PKH, terutama bagian pemberdayaan?
   b. Bagaimana hubungan kerja antara unit teknis dan pendamping sosial dalam menjalankan kegiatan?
4) *Perspective*
   a. Prinsip atau cara pandang apa yang menjadi dasar unit teknis dalam menyusun kebijakan pemberdayaan?
   b. Bagaimana Bapak/Ibu menilai kesiapan KPM untuk mengikuti program pemberdayaan?
5) *Ploy*
   a. Jika terjadi kendala teknis dalam kegiatan, apa langkah yang biasanya Bapak/Ibu lakukan?
   b. Bagaimana strategi penyesuaian kegiatan dilakukan ketika ada masalah mendadak?

IV. Pertanyaan untuk Aparat Desa Kecamatan Limboto Barat

1) *Plan*
   a. Bagaimana desa merencanakan dukungan bagi KPM PKH agar bisa lebih mandiri?
   b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan desa saat menentukan program bantuan atau pemberdayaan?
2) *Pattern*
   a. Pola pemanfaatan bantuan PKH seperti apa yang paling sering terlihat di masyarakat?

b. Apakah ada pola keberhasilan atau hambatan yang desa amati dari KPM?

3) *Position*
   a. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana posisi desa dalam mendukung pelaksanaan program PKH?
   b. Sejauh mana desa merasa memiliki tanggung jawab terhadap kemandirian KPM?
4) *Perspective*
   a. Bagaimana pandangan desa terhadap potensi KPM untuk mandiri?
   b. Nilai sosial apa yang menurut desa memengaruhi perilaku KPM?
5) *Ploy*
   a. Jika KPM mengalami kendala dalam kegiatan, apa yang biasanya desa lakukan untuk membantu?
   b. Apa strategi desa agar KPM tetap mengikuti kegiatan pemberdayaan?

V. Pertanyaan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)

1) *Plan*
   a. Apa rencana Bapak/Ibu untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga ke depannya?
   b. Bagaimana bantuan PKH membantu Bapak/Ibu dalam membuat rencana untuk masa depan keluarga?
2) Pattern
   a. Biasanya bantuan PKH digunakan untuk apa saja dalam kehidupan sehari-hari?
   b. Sejak ikut pendampingan PKH, apakah ada perubahan kebiasaan atau perilaku di keluarga?
3) *Position*
   a. Menurut Bapak/Ibu, Bapak/Ibu berada di posisi seperti apa dalam program PKH—lebih pasif atau ingin berkembang?
   b. Bagaimana peran PKH dalam membantu keluarga mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik?
4) *Perspective*
   a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang kemampuan keluarga untuk mandiri suatu hari nanti?

b. Nilai atau keyakinan apa yang membuat Bapak/Ibu berusaha memanfaatkan PKH dengan baik?

5) *Ploy*

a. Kalau menghadapi kesulitan ekonomi, apa biasanya yang keluarga lakukan?

b. Ketika usaha atau kegiatan ekonomi keluarga terhambat, langkah apa yang paling sering keluarga ambil?

Lampiran 3. Data Informan

DATA INFORMAN

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN	KODE INFORMAN
1	Imran Napu	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	(IN)
2	Fajar Sidic Napu	Pejabat Teknis Dinas Sosial	(FSN)
3	Shayipul H. Moonti	Pendamping PKH Kecamatan Limboto Barat	(SHM)
4	Isa Amir Hanapi	Kepala Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat	(IAH)
5	Lilis Desiu	Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	(LD)
6	Herlina	Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	(H)
7	Melisa Djafar	Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	(MD)
8	Suwandi Mayang	Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	(SM)
9	Darniyati	Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	(D)
10	Siti Napu	Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	(ST)

Lampiran 4. Matriks Hasil Penelitian

MATRIKS HASIL WAWANCARA

No	Indikator	Uraian Pertanyaan	Informan	Jawaban
1	*Plan*	Bagaimana Bapak selaku Kepala Bidang menyusun rencana kegiatan yang berkaitan langsung dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial untuk mendorong kemandirian KPM di Kecamatan Limboto Barat	(Imran Napu) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*Perencanaan kegiatan dilakukan pada awal tahun anggaran melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan pelaksana program, termasuk SDM PKH. Dalam rapat tersebut dibahas agenda kegiatan selama satu tahun ke depan, salah satunya terkait strategi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat, baik secara individu maupun kelompok*
		Apa saja hal utama yang Bapak pertimbangkan dalam merancang kegiatan pemberdayaan atau perlindungan sosial bagi penerima PKH?	(Imran Napu) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*Dalam merancang kegiatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, kami berpedoman pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pendamping PKH juga kami dorong untuk melaporkan masyarakat kurang mampu yang belum tersentuh bantuan agar dapat diusulkan ke program bantuan lain selain PKH*
		Bagaimana proses unit teknis menyusun rencana kegiatan pemberdayaan?	(Fajar Sidic Napu) Pejabat Teknis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*"Dalam proses penyusunan perencanaan pemberdayaan SDM PKH, setiap pendamping memiliki wilayah kerja masing-masing. Pelaksanaan kegiatan pendamping disesuaikan dengan arahan dan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kegiatan yang*

			dilaksanakan cukup beragam, seperti pertemuan kelompok, P2K2, pendataan, hingga pembaruan data. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan oleh pendamping dengan menyesuaikan kondisi wilayah dan jumlah target survei yang harus dicapai.
	Apa pertimbangan teknis utama dalam menentukan kegiatan mana yang perlu diprioritaskan?	(Fajar Sidic Napu) Pejabat Teknis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*Prioritas kegiatan pada dasarnya telah diatur oleh Kementerian Sosial. Kami bekerja berdasarkan waktu yang telah ditentukan, sehingga apabila diberikan batas waktu satu hari, maka kegiatan tersebut harus diselesaikan dalam waktu satu hari sesuai dengan arahan yang ada*
	Menurut Bapak, bagaimana proses perencanaan pendampingan untuk membantu KPM supaya lebih mandiri?	(Shayipul H. Moonti) Pendamping PKH Kecamatan Limboto Barat	*Pendampingan dalam Program Keluarga Harapan direncanakan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan secara rutin minimal satu kali dalam sebulan. Setiap desa dibagi ke dalam beberapa kelompok PKH yang beranggotakan sekitar 20 sampai 30 KPM berdasarkan kedekatan wilayah tempat tinggal, seperti pembagian per dusun.*
	Faktor apa saja yang biasanya Bapak pertimbangkan saat merencanakan kegiatan pendampingan?	(Shayipul H. Moonti) Pendamping PKH Kecamatan Limboto Barat	*Faktor utama yang dipertimbangkan dalam perencanaan pendampingan adalah kondisi sosial dan kondisi tempat tinggal KPM. Pembentukan kelompok dilakukan berdasarkan kedekatan wilayah dan karakteristik KPM, termasuk usia dan kondisi ekonomi. KPM yang berusia lanjut biasanya digabungkan dengan KPM usia produktif agar tercipta interaksi dan saling mendukung dalam kelompok.*
	Bagaimana desa merencanakan dukungan bagi KPM PKH agar bisa lebih mandiri?	(Isa Amir Hanapi) Aparat Desa Kecamatan Limboto Barat	*Langkah awal yang dilakukan adalah melihat terlebih dahulu kondisi para penerima PKH. Rata-rata mereka berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, sebagian sudah lanjut usia dan masih memiliki tanggungan anak yang bersekolah. Karena keterbatasan dana desa, kami belum*

			bisa menyediakan program khusus yang besar. Oleh karena itu, bentuk dukungan utama yang kami lakukan adalah memberikan motivasi dan dorongan agar mereka tetap berusaha dan bekerja sesuai kemampuan masing-masing, sehingga tidak terus bergantung pada bantuan PKH.
	Apa yang menjadi dasar pertimbangan desa saat menentukan program bantuan atau pemberdayaan	(Isa Amir Hanapi) Aparat Desa Kecamatan Limboto Barat	*Dasar pertimbangan desa dalam menentukan program bantuan atau pemberdayaan adalah tingkat kemiskinan dan kondisi kehidupan masyarakat. Namun, untuk penentuan penerima PKH secara teknis lebih diketahui oleh pendamping PKH. Kami di desa hanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Selain itu, keterbatasan anggaran dana desa juga menjadi pertimbangan, sehingga kami lebih fokus pada kegiatan yang sifatnya mendorong dan memotivasi masyarakat, seperti bantuan pertanian jagung dan padi, atau mendorong usaha kecil bagi warga yang memiliki keterampilan.*
	Apa rencana anda untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga ke depannya?	(Lilis Desiu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Kalau menghadapi kesulitan ekonomi, saya lebih memilih untuk meningkatkan usaha dan bekerja lebih giat. Saya tidak langsung bergantung pada bantuan, karena sejak awal saya menanamkan pada diri sendiri bahwa bantuan itu hanya penunjang.*
		(Herlina) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Jadi rencana saya ke depan tetap berusaha untuk mandiri dan tidak bergantung pada PKH. Walaupun saat ini saya masih menerima PKH karena masih masuk desil 3, saya tetap berusaha mengatur keuangan dengan baik dan mencukupi kebutuhan keluarga dari hasil usaha sendiri, supaya kalau suatu saat PKH dihentikan saya sudah siap*

	(Melisa Djafar) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Untuk rencana meningkatkan ekonomi ke depan, sejujurnya saya belum terlalu memikirkan secara khusus, karena saya masih fokus pada pemenuhan kebutuhan anak, terutama pendidikan. Namun saya tetap berusaha agar nantinya, meskipun sudah tidak menerima PKH, saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja semampu saya.*
	(Suwandi Mayang) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Untuk rencana meningkatkan kondisi ekonomi ke depan, sejujurnya saya belum terlalu memikirkan secara matang karena kondisi ekonomi saat ini masih sulit. Saya masih fokus memenuhi kebutuhan anak-anak, terutama pendidikan. Namun, saya tetap berharap ke depan bisa mendapatkan pekerjaan yang tetap dan layak agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga tanpa bergantung pada PKH.*
	(Darniyati) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Untuk rencana meningkatkan ekonomi ke depan, saya belum terlalu memikirkan membuka usaha karena fokus utama saya masih pada pemenuhan kebutuhan anak-anak yang masih sekolah. Namun saya menyadari bahwa ke depan saya harus berusaha agar bisa mandiri.*
	(Siti Napu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Sekarang kami sudah graduasi atau mandiri. Kalau ditanya bagaimana rencana kami sampai bisa di titik ini, sejak awal kami selalu berusaha dan mengubah pola pikir bahwa bantuan itu hanya sementara. Setelah mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, kami mulai menyusun rencana untuk membangun usaha kecil-kecilan, sampai akhirnya semua berjalan sesuai rencana dan kami berhasil graduasi.*

	Ketika usaha atau kegiatan ekonomi keluarga terhambat, langkah apa yang paling sering keluarga ambil?	(Lilis Desiu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Jika kegiatan ekonomi terhambat, saya biasanya mencari cara lain untuk tetap bekerja dan menyesuaikan pengeluaran keluarga. Selain itu, pengalaman dan pembelajaran dari kegiatan PKH juga membantu saya lebih kuat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit*.
		(Herlina) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*PKH sangat membantu saya dalam merencanakan masa depan keluarga, khususnya untuk pendidikan anak. Dengan adanya bantuan PKH, kebutuhan sekolah anak bisa terpenuhi, sehingga saya bisa lebih fokus memikirkan rencana ke depan tanpa terlalu terbebani biaya pendidikan*
		(Melisa Djafar) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*PKH sangat membantu saya dalam merencanakan masa depan keluarga, khususnya untuk pendidikan anak. Dengan adanya bantuan PKH, kebutuhan sekolah anak bisa terpenuhi, sehingga saya lebih tenang dan memiliki harapan agar anak saya bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.*
		(Suwandi Mayang) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Bantuan PKH sangat membantu saya dalam merencanakan masa depan keluarga, khususnya untuk kebutuhan anak sekolah. Dengan adanya PKH, saya bisa lebih tenang karena kebutuhan pendidikan anak bisa dipenuhi, meskipun untuk rencana jangka panjang meningkatkan ekonomi keluarga masih terasa sulit.*
		(Darniyati) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Bantuan PKH membantu saya dalam merencanakan masa depan keluarga, terutama memastikan kebutuhan pendidikan anak terpenuhi. Dengan adanya PKH, saya bisa lebih tenang memikirkan kelanjutan sekolah anak-anak saya.*

			(Siti Napu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Waktu masih menerima PKH, bantuan itu sangat membantu kami memenuhi kebutuhan anak. Dari situ kami jadi bisa menyusun rencana untuk masa depan, terutama bagaimana caranya meningkatkan ekonomi keluarga secara mandiri.*
2	*Pattern*	Pola pelaksanaan kegiatan apa yang selama ini paling sering dilakukan oleh bidang yang Bapak pimpin dalam mendukung kemandirian KPM PKH?	(Imran Napu) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*Pola pelaksanaan kegiatan yang paling sering dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat. Sosialisasi tersebut dilakukan baik atas inisiatif bidang terkait maupun atas permintaan pemerintah desa. Dalam kegiatan ini, saya sendiri sering terlibat langsung sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terlalu bergantung pada bantuan sosial, karena bantuan sosial bersifat sementara dan dapat dihentikan sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemerintah.*
		Dari pelaksanaan tersebut, bagaimana Bapak menilai pola kegiatan yang sudah berjalan selama ini?	(Imran Napu) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*Pola kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendorong kemandirian KPM. Dalam dua tahun terakhir, terdapat kebijakan dari Kementerian Sosial yang menginstruksikan pelaksanaan graduasi, baik secara mandiri maupun non-mandiri, bagi KPM yang dinilai sudah tidak layak menerima bantuan.*
		Pola kegiatan teknis apa yang paling sering dilakukan setiap tahun?	(Fajar Sidic Napu) Pejabat Teknis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*Kegiatan teknis yang paling sering dilakukan setiap tahun adalah Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Melalui kegiatan ini, masyarakat dibekali pengetahuan dan keterampilan, di mana pendamping dan KPM belajar bersama, bukan dalam posisi menggurui. Contohnya pada materi pencegahan stunting, pendamping menyampaikan materi secara partisipatif agar mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat*

	Menurut Bapak, apakah ada pola keberhasilan atau hambatan yang sering muncul saat kegiatan berjalan?	(Fajar Sidic Napu) Pejabat Teknis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat pola keberhasilan yang ditandai dengan adanya graduasi, yaitu ketika keluarga penerima manfaat secara sadar mengundurkan diri dari program PKH atau bantuan sosial lainnya karena merasa sudah berada pada kategori sejahtera. Namun, hambatan yang sering dihadapi adalah pola pikir atau mindset sebagian KPM yang masih bergantung pada bantuan, karena belum memiliki kesadaran bahwa bantuan sosial bersifat sementara.*
	Pola atau kebiasaan apa yang Bapak lihat dari KPM saat mengikuti pendampingan atau kegiatan pemberdayaan?	(Shayipul H. Moonti) Pendamping PKH Kecamatan Limboto Barat	*Pola atau kebiasaan KPM dalam mengikuti pendampingan sangat beragam, karena setiap KPM memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda. Ada KPM yang aktif, mudah memahami materi, dan cepat merespons setiap penyampaian pendamping. Namun, ada juga KPM yang cenderung pasif dan membutuhkan pendekatan yang lebih intensif.*
	Apakah ada hambatan atau keberhasilan yang sering muncul dan Bapak perhatikan?	(Shayipul H. Moonti) Pendamping PKH Kecamatan Limboto Barat	*Hambatan yang paling sering muncul dalam pelaksanaan PKH adalah terkait perubahan komponen bantuan, khususnya pada KPM yang memiliki anak usia sekolah. Ketika anak berpindah jenjang dari SD ke SMP, bantuan sering tidak dapat dicairkan karena data pendidikan di sistem Dapodik sekolah belum aktif atau belum sinkron dengan data di K.ementerian Sosial.*
	Pola pemanfaatan bantuan PKH seperti apa yang paling sering terlihat di masyarakat?	(Isa Amir Hanapi) Aparat Desa Kecamatan Limboto Barat	*Yang saya lihat di masyarakat, sebagian besar memang menggunakan bantuan PKH untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan anak. Tapi ada juga yang setelah menerima bantuan justru menjadi malas bekerja. Kadang*

			kalau sudah dapat bantuan, semangat kerjanya jadi berkurang. Itu yang sering kami temui di lapangan.
	Apakah ada pola keberhasilan atau hambatan yang desa amati dari KPM?	(Isa Amir Hanapi) Aparat Desa Kecamatan Limboto Barat	*Hambatan yang sering terjadi itu biasanya masalah administrasi, seperti saldo bantuan yang tidak masuk ke rekening. Kalau ada masalah begitu, biasanya mereka datang mengadu ke desa. Selain itu, ada juga penerima yang sebenarnya sudah bisa dikatakan mandiri, tapi dari pusat masih tercatat sebagai penerima PKH, padahal di desa sudah kami rapatkan dan menilai bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak lagi menerima bantuan.*
	Biasanya bantuan PKH digunakan untuk apa saja dalam kehidupan sehari-hari?	(Lilis Desiu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Selama menerima PKH, bantuan itu saya gunakan khusus untuk kebutuhan sekolah anak-anak, seperti perlengkapan sekolah dan kebutuhan pendidikan lainnya. Saya tidak menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan lain di luar pendidikan.*
		(Herlina) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Setiap kali PKH cair, bantuan tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sekolah anak, seperti perlengkapan sekolah dan keperluan pendidikan lainnya. Saya berusaha menggunakan bantuan itu sesuai peruntukannya dan tidak untuk kebutuhan lain.*
		(Melisa Djafar) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Bantuan PKH yang saya terima biasanya saya gunakan untuk kebutuhan anak sekolah, seperti perlengkapan sekolah. Selain itu, sebagian juga digunakan untuk sembako, tetapi tetap lebih difokuskan pada kebutuhan pendidikan anak.*

		(Suwandi Mayang) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Bantuan PKH yang saya terima biasanya saya gunakan untuk biaya anak sekolah. Selain itu, jika memang belum ada pemasukan, uang PKH juga saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras, daging, atau ayam. Namun, saya tetap mengutamakan kebutuhan anak terlebih dahulu.*
		(Darniyati) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Uang PKH saya gunakan terutama untuk kebutuhan anak sekolah. Jika ada sisa, saya gunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras dan kebutuhan makan keluarga*
		(Siti Napu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Selama menerima PKH, bantuan tersebut kami gunakan sesuai peruntukannya, terutama untuk kebutuhan pendidikan anak. Kami berusaha disiplin supaya bantuan itu benar-benar bermanfaat.*
	Sejak ikut pendampingan PKH, apakah ada perubahan kebiasaan atau perilaku di keluarga?	(Lilis Desiu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Sejak ikut kegiatan PKH, ada perubahan dalam cara saya mengatur keluarga, terutama dalam mendidik anak dan mengelola masalah rumah tangga. Dari pendampingan, saya banyak belajar tentang peran orang tua, cara menghadapi masalah, dan bagaimana menjadi keluarga yang lebih mandiri.*
		(Herlina) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Setelah ikut pendampingan PKH, ada perubahan dalam kebiasaan saya, terutama dalam mengatur keuangan keluarga. Saya jadi lebih memahami mana kebutuhan yang harus diprioritaskan dan lebih terbiasa mengikuti arahan dari pendamping.*

			(Melisa Djafar) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Setelah ikut PKH, saya merasakan perubahan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang sekarang lebih terbantu. Saya juga menjadi lebih disiplin karena setiap bulan ada pendataan, pengecekan kehadiran anak di sekolah, serta keaktifan dalam kegiatan posyandu dan pertemuan PKH*
			(Suwandi Mayang) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Sejak ikut PKH, ada perubahan yang saya rasakan, terutama dari segi ekonomi. Saya sekarang bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti membeli beras dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Saya juga menjadi lebih aktif mengikuti kegiatan karena setiap bulan ada pertemuan, edukasi, dan arahan dari pendamping.*
			(Darniyati) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Sejak ikut pendampingan PKH, saya menjadi lebih rutin mengikuti kegiatan dan lebih memahami tentang pengasuhan anak serta pengelolaan keluarga. Saya juga menjadi lebih disiplin karena setiap kegiatan ada absensi.*
			(Siti Napu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Seiring ikut pendampingan PKH, kebiasaan di keluarga juga mulai berubah. Kami jadi lebih terbiasa mengatur keuangan dan tidak lagi mengandalkan bantuan sepenuhnya.*
3	*Position*	Menurut Bapak, bagaimana posisi bidang yang Bapak pimpin dalam koordinasi dengan unit lain atau pihak terkait dalam pelaksanaan PKH dan bantuan sosial?	(Imran Napu) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*Bidang yang saya pimpin memiliki peran strategis sebagai fungsi koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan PKH dan bantuan sosial. Koordinasi dilakukan dengan koordinator PKH, pendamping lapangan, serta pihak perbankan sebagai penyalur bantuan. Secara umum koordinasi berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala terkait keterlambatan akses data dari bank penyalur.*

	Jika dibandingkan dengan stakeholder lain, kontribusi apa yang menunjukkan peran strategis bidang Bapak dalam pemberdayaan dan perlindungan KPM PKH?”	(Imran Napu) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*Kontribusi strategis bidang ini terlihat dari keterlibatan langsung saya dalam menangani permasalahan yang terjadi di lapangan. Setiap temuan atau permasalahan yang membutuhkan pembenahan akan segera ditindaklanjuti melalui penekanan dan arahan kepada koordinator maupun pendamping PKH agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.*
	Bagaimana posisi unit teknis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program PKH, terutama bagian pemberdayaan?	(Fajar Sidic Napu) Pejabat Teknis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*Unit teknis Dinas Sosial menempati posisi sebagai pengawas sekaligus pelaksana lapangan dalam mendukung pemberdayaan KPM PKH. Kami memastikan kegiatan pemberdayaan, seperti P2K2 dan pendampingan, berjalan sesuai dengan arahan program. Apabila terdapat permasalahan yang masih dapat ditangani di tingkat teknis, kami langsung menindaklanjutinya tanpa harus menunggu intervensi dinas, sehingga pelaksanaan program tetap berjalan efektif dan tidak terhambat.*
	Bagaimana hubungan kerja antara unit teknis dan pendamping sosial dalam menjalankan kegiatan?	(Fajar Sidic Napu) Pejabat Teknis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*Hubungan kerja antara unit teknis dan pendamping sosial berjalan dengan baik. Kami terlibat dan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, perbankan, serta unit kerja kesehatan dan fasilitas kesehatan. Harmonisasi antar pihak tersebut berjalan dengan baik karena masing-masing saling membutuhkan dalam mendukung pelaksanaan PKH.*

	Menurut Bapak, bagaimana posisi pendamping dalam memengaruhi motivasi dan perubahan perilaku KPM?	(Shayipul H. Moonti) Pendamping PKH Kecamatan Limboto Barat	*Pendamping berada pada posisi yang sangat dekat dengan KPM karena kami berinteraksi langsung dan rutin. Melalui pembaruan data secara berkala serta pendampingan dalam pertemuan kelompok, kami tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan pemahaman tentang kewajiban KPM dan tujuan PKH. Dari proses tersebut, motivasi KPM perlahan terbentuk dan perilaku mereka mulai berubah, terutama dalam kepatuhan terhadap aturan dan kesadaran bahwa bantuan ini bersifat sementara.*
	Seberapa besar peran pendamping dalam keberhasilan program pemberdayaan PKH menurut Bapak?”	(Shayipul H. Moonti) Pendamping PKH Kecamatan Limboto Barat	*Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada peran pendamping. Kami terlibat langsung dalam penyaluran bantuan, pelaksanaan pertemuan kelompok, serta penyelesaian kendala teknis seperti KKS tidak aktif atau data KPM bermasalah. Jika pendamping tidak aktif, maka bantuan bisa tertunda dan kegiatan pemberdayaan tidak berjalan optimal.*
	Menurut Bapak, bagaimana posisi desa dalam mendukung pelaksanaan program PKH?	(Isa Amir Hanapi) Aparat Desa Kecamatan Limboto Barat	*Kami sebagai aparat desa itu posisinya lebih sebagai pendukung dan penghubung. Kami tidak bisa menentukan siapa yang menerima atau tidak menerima PKH karena itu kewenangan pusat. Tapi kalau ada masyarakat yang mengadu atau mengalami masalah, kami tetap membantu, mengarahkan, dan menyampaikan ke pendamping PKH atau pihak terkait.*
	Sejauh mana desa merasa memiliki tanggung jawab terhadap kemandirian KPM?	(Isa Amir Hanapi) Aparat Desa Kecamatan Limboto Barat	*Kami merasa punya tanggung jawab untuk mendorong masyarakat supaya bisa mandiri. Tugas kami bukan hanya mengurus administrasi, tapi juga memberikan motivasi dan nasihat agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan. Kami selalu menyampaikan bahwa PKH itu sifatnya*

			sementara, jadi masyarakat harus berusaha meningkatkan kehidupan ekonominya sendiri.
	Menurut anda, anda berada di posisi seperti apa dalam program PKH lebih pasif atau ingin berkembang?	(Lilis Desiu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Saya merasa berada pada posisi ingin berkembang. Walaupun menerima PKH, saya tidak ingin hanya bergantung pada bantuan tersebut, sehingga saya tetap bekerja dan mengikuti semua kegiatan PKH dengan aktif karena itu juga menjadi kewajiban bagi penerima.*
		(Herlina) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Saya merasa berada di posisi ingin berkembang. Saya mengikuti semua kegiatan PKH yang diwajibkan karena saya sadar PKH bukan hanya bantuan uang, tetapi juga pembinaan agar penerima bisa mandiri.*
		(Melisa Djafar) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Saya merasa berada pada posisi mengikuti dan berusaha berkembang. Saya selalu hadir dalam kegiatan PKH karena memang diwajibkan dan ada absensi yang dicek setiap bulan oleh pendamping.*
		(Suwandi Mayang) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Saya merasa berada di posisi ingin berkembang, karena saya selalu hadir dalam setiap kegiatan PKH dan mengikuti arahan dari pendamping. Pendamping juga pernah datang langsung ke rumah untuk mendata dan mengecek kondisi keluarga.*
		(Darniyati) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Saya berada pada posisi mengikuti dan ingin berkembang. Saya selalu ikut kegiatan pendampingan karena itu wajib, dan pendamping juga pernah turun langsung ke rumah untuk mendata kondisi keluarga.*

		(Siti Napu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Dalam program PKH, saya melihat diri saya bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai keluarga yang ingin berkembang. Saya berusaha mengikuti arahan pendamping agar suatu saat bisa keluar dari program.*
	Bagaimana peran PKH dalam membantu keluarga mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik?”	(Lilis Desiu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*PKH berperan sebagai bantuan tambahan yang sangat membantu ekonomi keluarga, terutama di bidang pendidikan. Namun bagi saya, PKH bukan sumber utama penghasilan, melainkan dukungan sementara sambil tetap berusaha meningkatkan ekonomi keluarga melalui pekerjaan.*
		(Herlina) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Peran PKH bagi keluarga saya adalah sebagai bantuan pendukung, bukan sumber utama ekonomi. PKH membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak sehingga kondisi ekonomi keluarga lebih terbantu.*
		(Melisa Djafar) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*PKH sangat berperan dalam membantu kondisi ekonomi keluarga saya. Dengan adanya bantuan ini, saya tidak terlalu kesulitan lagi memenuhi kebutuhan anak, terutama untuk sekolah, sehingga kondisi ekonomi keluarga menjadi lebih stabil.*
		(Suwandi Mayang) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*PKH sangat berperan dalam membantu ekonomi keluarga saya. Bahkan jika dibandingkan dengan penghasilan saya saat ini, uang bantuan PKH masih lebih besar. Karena itu, PKH menjadi penopang utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun saya sadar bahwa kondisi ini belum bisa disebut mandiri.*
		(Darniyati) Penerima Program	*PKH sangat membantu ekonomi keluarga saya, terutama untuk kebutuhan anak sekolah. Namun saya menyadari*

			Keluarga Harapan (PKH)	*bahwa PKH hanya bantuan, bukan sumber penghasilan utama.*
			(Siti Napu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Bagi kami, PKH itu seperti penopang di masa sulit. Bantuan tersebut membantu kami bertahan sampai akhirnya kami bisa memperbaiki kondisi ekonomi sendiri.*
4	*Perspective*	Nilai atau prinsip apa yang menjadi pegangan Bapak dalam memaknai pemberdayaan dan kemandirian KPM PKH?	(Imran Napu) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*Prinsip utama yang kami pegang adalah perubahan pola pikir atau mindset KPM. Banyak KPM yang masih menganggap bantuan sosial sebagai penghasilan tetap, bahkan seolah bisa diterima terus-menerus. Karena itu, sebelum bicara kemandirian, yang harus diubah terlebih dahulu adalah cara pandang mereka terhadap bantuan sosial.*
		Bagaimana Bapak memandang perubahan sikap dan perilaku KPM dari yang awalnya bergantung menjadi lebih mandiri?	(Imran Napu) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*Perubahan itu tidak bisa instan, tetapi melalui proses sosialisasi dan edukasi yang terus dilakukan. Pendamping dibekali pemahaman regulasi supaya bisa menjelaskan kepada KPM bahwa graduasi adalah kebijakan pemerintah, bukan kemauan pribadi. Kalau KPM sudah paham aturannya, biasanya sikap dan perilakunya perlahan berubah.*
		Prinsip atau cara pandang apa yang menjadi dasar unit teknis dalam menyusun kebijakan pemberdayaan?”	(Fajar Sidic Napu) Pejabat Teknis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*Pemberdayaan dipandang sebagai proses pembelajaran dan pembentukan kesadaran KPM secara bertahap. Kami menekankan pendekatan partisipatif, di mana KPM tidak hanya menerima arahan, tetapi dilibatkan secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan. Melalui pendekatan tersebut, KPM diharapkan mampu memahami tujuan program serta menyadari bahwa bantuan sosial bersifat*

			sementara dan ditujukan untuk mendorong kemandirian keluarga.
	Bagaimana Bapak menilai kesiapan KPM untuk mengikuti program pemberdayaan?”	(Fajar Sidic Napu) Pejabat Teknis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*Dari yang saya lihat, KPM sangat antusias untuk mengikuti program pemberdayaan, karena salah satunya merupakan kegiatan yang bersifat wajib dan setiap KPM harus hadir.*
	Bagaimana Bapak melihat kemampuan KPM untuk berkembang menjadi mandiri berdasarkan pengalaman sehari-hari?	(Shayipul H. Moonti) Pendamping PKH Kecamatan Limboto Barat	*Kemampuan KPM untuk menjadi mandiri sangat bergantung pada kondisi sosial dan ekonomi masing-masing keluarga. Setiap KPM memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Berdasarkan pengalaman pendampingan, ada KPM yang sudah mampu mandiri dan bersedia mengundurkan diri dari program PKH melalui mekanisme graduasi mandiri. Dalam satu tahun, sekitar sepuluh KPM melakukan graduasi mandiri karena kondisi sosial ekonominya sudah membaik.*
	Nilai atau keyakinan apa yang Bapak pegang dalam memahami karakter dan potensi KPM?”	(Shayipul H. Moonti) Pendamping PKH Kecamatan Limboto Barat	*Untuk mendorong kemandirian, kami melakukan penguatan materi melalui pertemuan kelompok dan juga kunjungan rumah (home visit). Dengan pendekatan tersebut, kami bisa memahami kondisi nyata KPM dan memberikan motivasi yang sesuai dengan kebutuhan serta situasi masing-masing keluarga.*
	Bagaimana pandangan desa terhadap potensi KPM untuk mandiri?	(Isa Amir Hanapi) Aparat Desa Kecamatan Limboto Barat	*Kalau menurut saya, sebenarnya masyarakat itu punya potensi untuk mandiri. Rata-rata mereka petani, jadi kalau dikelola dengan baik, mereka bisa meningkatkan pendapatan. Tapi semua itu tergantung dari kemauan*

			mereka sendiri. Kalau mereka mau bekerja dan berusaha, tentu bisa mandiri.
	Nilai sosial apa yang menurut desa memengaruhi perilaku KPM?	(Isa Amir Hanapi) Aparat Desa Kecamatan Limboto Barat	*Nilai yang paling memengaruhi itu rasa ketergantungan. Ada masyarakat yang sudah merasa nyaman dengan bantuan, sehingga jadi enggan bekerja. Ini yang kami lihat dan kami coba ubah melalui motivasi dan dorongan supaya mereka kembali semangat bekerja dan tidak hanya menunggu bantuan.*
	Bagaimana pandangan anda tentang kemampuan keluarga untuk mandiri suatu hari nanti?	(Lilis Desiu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Saya yakin keluarga saya bisa mandiri. Terbukti saat PKH dihentikan karena anak-anak sudah lulus sekolah dan saya dikategorikan mandiri, saya tidak merasa berat karena sejak awal saya sudah menyiapkan diri untuk tidak terus bergantung pada bantuan.*
		(Herlina) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*"Saya yakin keluarga saya bisa mandiri. Dari pendampingan PKH kami selalu diingatkan bahwa penerima akan dievaluasi setiap tahun, sehingga itu menjadi motivasi untuk terus berusaha.*
		(Melisa Djafar) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Saya yakin suatu hari keluarga saya bisa mandiri. Walaupun saat ini masih menerima PKH, saya berharap ke depan tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga sendiri melalui pekerjaan yang saya lakukan.*

		(Suwandi Mayang) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Dengan jujur saya mengatakan bahwa sampai saat ini saya belum merasa mandiri. Kondisi ekonomi masih sulit, kebutuhan anak banyak, dan saya memiliki tiga orang anak. Namun, saya tetap berharap suatu hari nanti bisa mandiri jika mendapatkan pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang cukup.*
		(Darniyati) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Saya menyadari bahwa sampai saat ini keluarga saya belum bisa dikatakan mandiri karena kondisi ekonomi masih lemah dan masih ada tanggungan anak sekolah. Namun saya tetap yakin suatu hari nanti bisa mandiri.*
		(Siti Napu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Menurut saya, kemandirian itu bisa dicapai kalau ada kemauan dan usaha. Pengalaman kami membuktikan bahwa bantuan hanya sementara, tetapi usaha yang menentukan.*
	Nilai atau keyakinan apa yang membuat Ibu berusaha memanfaatkan PKH dengan baik?	(Lilis Desiu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Saya berpegang pada keyakinan bahwa bantuan PKH itu hanya sementara dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Oleh karena itu, saya gunakan bantuan tersebut sesuai peruntukannya dan tetap bekerja supaya kehidupan keluarga bisa terus berjalan dengan baik.*
		(Herlina) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Saya meyakini PKH itu hanya sementara, sehingga harus dimanfaatkan dengan baik sesuai peruntukannya sambil tetap berusaha agar tidak terus bergantung pada bantuan.*

			(Melisa Djafar) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Saya meyakini bahwa PKH adalah bantuan sementara dan harus digunakan sesuai peruntukannya. Karena itu, saya berusaha memanfaatkan bantuan ini sebaik mungkin untuk kebutuhan anak, terutama pendidikan dan kesehatan.*
			(Suwandi Mayang) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Saya meyakini bahwa PKH bersifat sementara dan bukan untuk selamanya. Pendamping juga sering menyampaikan bahwa semua kembali pada kemauan diri sendiri. Karena itu, saya berusaha memanfaatkan PKH sebaik mungkin sambil tetap berusaha agar suatu saat bisa mandiri.*
			(Darniyati) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Saya percaya bahwa PKH bukan bantuan jangka panjang. Karena itu saya berusaha memanfaatkan PKH sebaik mungkin sesuai peruntukannya, sambil tetap berusaha agar ke depan bisa hidup mandiri.*
			(Siti Napu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Saya selalu berpikir bahwa PKH bukan untuk selamanya. Karena itu, bantuan yang diterima kami manfaatkan sebaik mungkin sambil tetap berusaha mandiri."*
5	*Ploy*	Ketika kegiatan pemberdayaan atau bantuan sosial menghadapi hambatan, langkah cepat apa yang biasanya Bapak ambil sebagai Kepala Bidang?	(Imran Napu) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*Langkah cepat yang kami ambil adalah menginstruksikan pendamping untuk segera melakukan koordinasi. Jika hambatan terjadi pada proses transaksi bantuan, pendamping diarahkan untuk mendampingi KPM ke bank penyalur. Apabila kendala disebabkan oleh kesalahan data, kami berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perbaikan data serta pembaruan melalui sistem yang tersedia.*

	Jika KPM menunjukkan kurangnya minat atau resistensi terhadap kegiatan, pendekatan apa yang biasanya Bapak/Ibu arahkan kepada pelaksana di lapangan?	(Imran Napu) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*Pendekatan yang digunakan adalah penguatan regulasi. Kehadiran dalam pertemuan P2K2 merupakan kewajiban, dengan ketentuan adanya perwakilan anggota keluarga apabila KPM berhalangan hadir. Jika ketentuan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan sanksi hingga pemberhentian dari program atau graduasi.*
	Jika terjadi kendala teknis dalam kegiatan, apa langkah yang biasanya Bapak/Ibu lakukan?	(Fajar Sidic Napu) Pejabat Teknis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*Dalam pelaksanaan kegiatan, kami berpedoman pada petunjuk teknis atau juknis yang telah ditetapkan. Juknis itu menjadi acuan utama dalam menyelesaikan kendala teknis yang muncul di lapangan*
	Bagaimana strategi penyesuaian kegiatan dilakukan ketika ada masalah mendadak?	(Fajar Sidic Napu) Pejabat Teknis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo	*dalam kondisi tertentu, penyesuaian kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat urgensi dan jenis permasalahan yang dihadapi. Apabila masalah masih dapat ditangani di tingkat teknis, kami bersama pendamping segera melakukan penyesuaian di lapangan tanpa menunda pelaksanaan kegiatan. Namun, jika permasalahan memerlukan koordinasi lintas instansi, maka kami akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar kegiatan tetap dapat berjalan meskipun dengan penyesuaian waktu atau mekanisme pelaksanaan.*
	Jika KPM tidak menunjukkan respons positif, pendekatan apa yang biasanya Bapak lakukan?	(Shayipul H. Moonti) Pendamping PKH Kecamatan Limboto Barat	*Jika KPM tidak menunjukkan respons positif, kami melakukan kunjungan rumah atau home visit untuk melihat langsung kondisi sosial ekonomi keluarga. Kami menggali informasi terkait kondisi ekonomi, jumlah tanggungan, dan keadaan anggota keluarga lainnya.*

	Bagaimana cara Bapak menghadapi KPM yang enggan mengikuti kegiatan pemberdayaan?	(Shayipul H. Moonti) Pendamping PKH Kecamatan Limboto Barat	*Dalam PKH ada aturan yang mewajibkan KPM mengikuti pertemuan kelompok. Namun, biasanya KPM yang tidak hadir memiliki alasan tertentu, seperti pekerjaan, kondisi kesehatan, atau sudah menyampaikan izin sebelumnya. Untuk KPM yang memang tidak berkomitmen dan tidak bisa mengikuti aturan program secara berkelanjutan, mereka dapat memilih untuk mengundurkan diri dari PKH, terutama jika berada di luar daerah dan tidak memungkinkan mengikuti pertemuan secara rutin.*
	Jika KPM mengalami kendala dalam kegiatan, apa yang biasanya desa lakukan untuk membantu?	(Isa Amir Hanapi) Aparat Desa Kecamatan Limboto Barat	*Kalau ada KPM yang mengalami kendala, biasanya mereka datang ke desa. Kami memberikan penjelasan, membantu mengarahkan, dan menyampaikan ke bagian kesejahteraan rakyat atau ke pendamping PKH supaya masalahnya bisa ditindaklanjuti. Kami juga berusaha menjelaskan kondisi sebenarnya kepada masyarakat supaya mereka paham.*
	Apa strategi desa agar KPM tetap mengikuti kegiatan pemberdayaan?	(Isa Amir Hanapi) Aparat Desa Kecamatan Limboto Barat	*Strategi kami itu lebih ke pendekatan persuasif. Kami memberikan dorongan dan motivasi agar mereka tetap ikut kegiatan. Selain itu, karena kegiatan PKH memang diwajibkan, masyarakat biasanya tetap hadir. Kami terus mengingatkan bahwa kegiatan itu tujuannya supaya mereka bisa mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya.*
	Kalau menghadapi kesulitan ekonomi, apa biasanya yang keluarga lakukan?	(Lilis Desiu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Kalau menghadapi kesulitan ekonomi, saya lebih memilih untuk meningkatkan usaha dan bekerja lebih giat. Saya tidak langsung bergantung pada bantuan, karena sejak awal saya menanamkan pada diri sendiri bahwa bantuan itu hanya penunjang.*

		(Herlina) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Kalau menghadapi kesulitan ekonomi, saya berusaha menyesuaikan pengeluaran keluarga dan mengutamakan kebutuhan yang paling penting, terutama kebutuhan anak sekolah.*
		(Melisa Djafar) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Kalau menghadapi kesulitan ekonomi, saya mengandalkan PKH untuk membantu memenuhi kebutuhan utama keluarga, terutama kebutuhan anak. Selain itu, saya juga menyesuaikan pengeluaran agar tidak melebihi kemampuan.*
		(Suwandi Mayang) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Jika menghadapi kesulitan ekonomi, satu-satunya harapan saya dan keluarga saat ini adalah bantuan PKH. Karena penghasilan saya belum tetap dan belum cukup menutupi kebutuhan keluarga, PKH sangat membantu dalam kondisi tersebut.*
		(Darniyati) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Jika menghadapi kesulitan ekonomi, saya mengandalkan bantuan PKH untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, terutama kebutuhan anak-anak.*
		(Siti Napu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Kalau menghadapi kesulitan ekonomi, dulu kami mengandalkan PKH sambil mencari tambahan penghasilan. Sekarang, setelah mandiri, kami lebih mengandalkan usaha yang sudah kami jalani.*
	Ketika usaha atau kegiatan ekonomi keluarga terhambat, langkah apa yang paling sering keluarga ambil?”	(Lilis Desiu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Jika kegiatan ekonomi terhambat, saya biasanya mencari cara lain untuk tetap bekerja dan menyesuaikan pengeluaran keluarga. Selain itu, pengalaman dan pembelajaran dari kegiatan PKH juga membantu saya lebih kuat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit.*

	(Herlina) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Jika ada hambatan, saya biasanya berkomunikasi dengan pendamping dan tetap berusaha mengatur keuangan sebaik mungkin agar tidak bermasalah dalam program PKH.*
	(Melisa Djafar) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Jika ada kendala, saya tetap mengikuti arahan pendamping PKH dan berusaha aktif dalam kegiatan yang diwajibkan. Saya juga memastikan anak tetap sekolah dan mengikuti posyandu karena jika tidak aktif bisa dikenakan sanksi hingga pemberhentian PKH.*
	(Suwandi Mayang) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Ketika ekonomi terhambat, saya tetap mengikuti arahan dan motivasi dari pendamping PKH. Walaupun saya merasa saat ini masih sangat sulit untuk meningkatkan ekonomi, saya tetap berusaha dan berharap suatu saat bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik agar tidak terus bergantung pada PKH.*
	(Darniyati) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Saat kondisi ekonomi terhambat, saya tetap mengikuti arahan dan pendampingan dari pendamping PKH. Saya juga terus berusaha mencari cara agar ke depan bisa meningkatkan ekonomi keluarga dan tidak terus berharap pada PKH.*
	(Siti Napu) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	*Saat usaha sempat terhambat, kami memilih untuk bertahan dan mencari cara lain, misalnya dengan menghemat pengeluaran dan mencari peluang kerja tambahan.*

Lampiran 5.

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
NOMOR : 039/FIS-UMGO/D/KEP/2025
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DI FAKULTAS ILMU SOSIAL

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran pembimbingan penelitian di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, maka dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing Skripsi.
b. Bahwa untuk kepentingan dictum pertama di atas dipandang perlu menerbikan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

Mengingat :
1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 234/U/O/2000 tentang pedoman perguruan tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 98/D/O/2008 tentang izin operasional Program studi dan pendirian Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
6 Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI. Nomor 108/DIKTI/Kep/2000 tentang pedoman pembukaan program studi atau jurusan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang pedoman pendirian Perguruan Tinggi.
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III.B/I.a/1999 tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Statuta Universitas Muhammadiyah Gorontalo
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo tentang pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gorontalo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

No	Nama Dosen	Keterangan
1.	Dr. Muh. Firyal Akbar, S.IP., M.Si	Pembimbing I
2.	Sri Lestari H. Gintulangi, S.Sos., M.Si	Pembimbing II

Dalam penyusunan Skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Anastasia Putri Amuntu

NIM : D02422001

Program Studi : S1-Administrasi Publik

Kedua : Judul Proposal **"Strategi Intervensi Dinas Sosial dalam mendorong transformasi kemandirian penerima PKH di Kecamatan Limboto Barat"**

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal : 03 Juni 2025 M
07 Dzulhijjah 1446 H

Dekan

Dr. Apris Ara Tilome, S.Ag., M.Si
NIDN. 09 16 01 74 02

Tembusan Yth :

1. *Para Kaprodi*
2. *Para Pembimbing*
3. *Mahasiswa Ybs*
4. *Arsip*

Lampiran 6.



FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
Alamat : Jln.Prof.Dr. H. Mansoer Pateda.Pentadio Timur Kab. Gorontalo.
Website: Fis.umgo.ac.id

Prodi : Administrasi Publik
Prodi : Akuntansi
Prodi : Ekonomi Pembangunan
Prodi : Sastra Inggris
Prodi : Sastra Arab
Prodi : Hukum
Prodi : Pariwisata

Nomor : 114/FIS-UMGO/REK/B/2025
Lamp : -
Hal : ***Permohonan Rekomendasi Penelitian***

Gorontalo, 09 Desember 2025 M
18 Jumadil Akhir 1447 H

Kepada Yth,
Kepala Kesbangpol Kabupaten Gorontalo
Di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo maka perlu melaksanakan penelitian, untuk maksud tersebut kami bermohon kepada Bapak/Ibu dapat memberikan izin untuk memberikan data terkait penelitian skripsi kepada mahasiswa/i yang tercantum dibawah ini :

Nama	:	Anatasia Putri Amuntu
NIM	:	D02422001
Program Studi	:	S1 Administrasi Publik
Judul Penelitian	:	Srategi Intervensi Dinas Sosial Dalam Mendorong Transformasi Kemandirian Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat.
Lokasi Penelitian	:	Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dan Wilayah Kecamatan Limboto Barat.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui,
Wakil Dekan

Dr. Robin Pakudu, S.Sos., M.Si
NBM. 1079188

Lampiran 7.

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. ACHMAD A. WAHAB NO 65 TELP. 0435 (881060)
LIMBOTO

REKOMENDASI
Nomor :074 /BKBP/587 /XII/2025

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo Nomor : 114/FIS-UMGO/REK/B/2025 Tanggal 9 Desember 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian. Dengan ini kami memberikan Rekomendasi kepada :

N a m a	:	**ANATASIA PUTRI AMUNTU**
Nim	:	D02422001
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Mahasiswi
No. Handphone	:	0895-4039-59595
Email	:	putriamuntu12@gmail.com
Alamat	:	Desa Yosonegoro Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Maksud	:	Melaksanakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul **"Strategi Intervensi Dinas Sosial dalam Mendorong Transformasi Kemandirian Penerima Program Keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat"**
Lokasi	:	Dinas Sosial, Kab. Gorontalo
Waktu	:	Tanggal 10 Desember 2025 s/d 30 Januari 2026

Dalam melakukan kegiatan agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta melapor kepada Kepala Badan/Dinas terkait.

Demikian Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan selesai mengadakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Gorontalo Cq. Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 10 Desember 2025

A.n. KEPALA BADAN
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Harlan Gobel, S.IP
Penata
NIP. 198004252008011010

Tembusan Yth :
1. Bupati Gorontalo
2. Wakil Bupati Gorontalo
3. Kepala Dinas Sosial Kab. Gorontalo
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran 8.

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KANTOR CAMAT LIMBOTO BARAT
JL. AK.Luneto, No. 122 Desa Huidu

REKOMENDASI
NOMOR : 074/ 024 / Kec. LBB

Berdasarkan,surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gorontalo nomor : 074/BKBP/587/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025 Perihal Reomendasi melaksanakan penelitian, maka dengan ini Camat Limboto Barat memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	ANASTASIA PUTRI AMUNTU
NIM	:	D02422001
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Mahasiswa
No. Handphone	:	0895403959595
Email	:	putriamuntu2@gmail.com
Alamat	:	Desa Yosonegoro Kec. Limboto Barat
Maksud	:	Melaksanakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul " **Strategi Intervensi Dinas Sosial dalam Mendorong Transformasi Kemandirian Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat.**
Lokasi	:	Dinas Sosial, Kabupaten Gorontalo.
Waktu	:	Tanggal 10 Desember 2025 s/d 30 Januari 2026

Dalam melakukan kegiatan agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta melapor kepada Kepala Badan/Dinas terkait.

Demikian Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan selesai mengadakan kegiatan agar melaporkan hasil kepada pihak Dinas Sosial dan Pemerintah Kecamatan Limboto Barat.

Dikeluarkan di : Limboto Barat
Pada Tanggal : 13 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
CAMAT LIMBOTO BARAT

BONNY ABDURRAHMAN MOONTI, S.Sos, M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran 9.

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DINAS SOSIAL

Jln. A. A. Wahab No. 66 Telp. (0435) 881395

LIMBOTO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 09/Dinsos/148/IV/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Afriyani Katili, SKM, M.Kes
NIP	: 19760423 200112 2 007
Pangkat/Gol	: Pembina Tingkat I/IV b
Jabatan	: Kepala Dinas
Instansi	: Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama	: Anatasia Putri Amuntu
NIM	: D024220001
Prodi	: Administrasi Publik
Fakultas	: Ilmu Sosial

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Dinas Sosial berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : **"Strategi Intervensi Dinas Sosial dalam Mendorong Transformasi Kemandirian Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat**".

Bahwa sesuai ketentuan selesai mengadakan kegiatan, agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Gorontalo Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo dan salinan hasil penelitian dapat diserahkan ke Dinas Sosial.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS SOSIAL

AFRIYANI KATILI, SKM, M.Kes

yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KANTOR CAMAT LIMBOTO BARAT
JL. AK.Luneto, No. 122 Desa Huidu

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 074/ 151 / Kec. LBB

Berdasarkan,surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gorontalo nomor : 074/BKBP/587/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025 Perihal Reomendasi melaksanakan penelitian, maka dengan ini Camat Limboto Barat memberikan surat keterangan kepada :

Nama	:	ANATASIA PUTRI AMUNTU
NIM	:	D02422001
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Mahasiswa
No. Handphone	:	0895403959595
Email	:	putriamuntu2@gmail.com
Alamat	:	Desa Yosonegoro Kec. Limboto Barat

Telah melaksanakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul " **Strategi Intervensi Dinas Sosial dalam Mendorong Transformasi Kemandirian Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Limboto Barat** tanggal 10 Desember 2025 s.d tanggal 30 Januari 2026

Demikian surat keterangan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Dikeluarkan di : Limboto Barat
Pada Tanggal : 21 April 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
CAMAT LIMBOTO BARAT

BONNY ABDURRAHMAN MOONTI, S.Sos, M.Si
yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

Lampiran 10

Dokumentasi Penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo





Wawancara dengan Bapak *Imran Napu, S.ST., M.Si., selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial / Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin*



Wawancara dengan Bapak Bapak Fajar Sidic Napu selaku Pejabat Teknis Dinas Sosial

Dokumentasi Penelitian di Kecamatan Limboto barat



Wawancara dengan dengan Bapak Shayipul H. Moonti, selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Limboto Barat



Wawancara dengan dengan Bapak Isa Amir Hanapi, selaku Kepala Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat



Wawancara dengan dengan Ibu Lilis Desiu, selaku Penerima Program manfaat (PKM) Program keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2015 hingga 2025 Kecamatan Limboto Barat



Wawancara dengan dengan Ibu Herlina, selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2019 hingga 2026, pada hari Senin, 29 Desember 2025 Kecamatan Limboto Barat



Wawancara dengan dengan Ibu Melisa Djafar, selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2024, Kecamatan Limboto Barat



Wawancara dengan dengan Bapak Suwandi Mayang, selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2022, Kecamatan Limboto Barat



Wawancara dengan dengan Ibu Darniyati selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017 dan Ibu Siti Napu, selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2017 yang berhasil Graduasi 2022 Kecamatan Limboto Barat